

711  
wid  
s e-1

**STUDI KINERJA PERKEMBANGAN  
WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**MM HERMINI WIDYASTUTI  
L4D000124**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Oktober 2002



**MM HERMINI WIDYASTUTI**  
**NIM. L4D 000 124**

# **STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**MM HERMINI WIDYASTUTI  
L4D000124**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

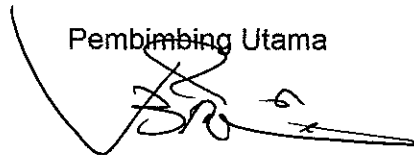
Semarang,

Pembimbing Pendamping



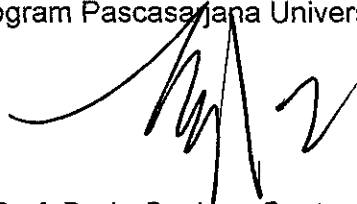
Samsul Ma'arif, SP, MT.

Pembimbing Utama



PM Brotosunaryo, SE, MSP.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA.

*" Ia memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya "*

*Kenangan bagi  
Almarhumah Mamak terkasih*

## ABSTRAK

Peningkatan aktifitas perkotaan seperti perdagangan, pemerintahan serta permukiman, semakin lama membutuhkan lahan yang semakin luas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan perluasan wilayah administrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, wilayah administrasi Kota Salatiga diperluas dari 3.890,86 ha menjadi 5.678,11 ha dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Tujuan diadakannya perluasan wilayah adalah (1) mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, serta kota transit pariwisata, (2) tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan (3) sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan dan kontribusinya bagi perkembangan Kota Salatiga sejak diundangkannya PP No. 60 Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000, dikaitkan dengan tujuan diadakannya perluasan wilayah. Aspek - aspek yang diamati adalah aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Wilayah studi secara mikro adalah desa-desa yang termasuk wilayah perluasan, meliputi 13 (tiga belas) desa dan secara makro adalah wilayah Kota Salatiga sesuai PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dalam studi ini penilaian terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dilakukan dengan metode (1) analisis skoring terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, (2) analisis persepsi narasumber terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga yang berasal dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat, serta (3) analisis pembiayaan sektor publik, dalam hal ini pengeluaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga terhadap wilayah perluasan Kota Salatiga dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000.

Berdasarkan analisis skoring dapat disimpulkan bahwa dari aspek pemerintahan belum terdapat perubahan bentuk lembaga pengelola. Dari aspek pembangunan, parameter yang menunjukkan perkembangan adalah fasilitas perdagangan (pasar), sarana listrik, keadaan jalan, sistem penataan ruang dan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, parameter yang perkembangannya tetap adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan wilayah terbangun, dan parameter yang menunjukkan perkembangan kurang adalah fasilitas hiburan, sarana komunikasi dan sarana air bersih. Dari aspek pemerintahan parameter yang menunjukkan perkembangan adalah tata kehidupan masyarakat dan parameter yang perkembangannya kurang adalah organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan analisis persepsi narasumber yang berasal dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan menunjukkan bahwa wilayah perluasan belum berkembang seperti yang diharapkan. Dari sisi pembiayaan sektor publik, wilayah perluasan belum memberikan kontribusi perkembangan Kota Salatiga. Penerimaan yang berasal dari wilayah perluasan hanya memberikan kontribusi sebesar 24,6 % dari total pengeluaran. Dengan demikian perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga belum mengarah pada tujuan diadakannya perluasan wilayah seperti tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

Hasil studi ini perlu ditindaklanjuti, dengan menetapkan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan wilayah perluasan, sehingga untuk masa mendatang wilayah perluasan tersebut dapat mendukung perkembangan Kota Salatiga seperti yang diharapkan. Kebijakan yang dapat diambil dengan 1) mengembangkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi di luar kawasan inti kota, dan 2) melakukan intensifikasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah perluasan.

## ABSTRACT

*An increasing urban activities such as trade, government and housing, the longer the time the wider the land is needed. To overcome the problem, one of the policies taken is by expanding administrative area. Based on the rule number 69, 1992 on the changes of the border area of Salatiga municipality and Semarang Regency, administrative area of Salatiga City was expanded from 3,890.86 ha becomes 5,678.11 ha by merging a part of Semarang Regency area consisting of 13 (thirteen) villages. The expansion objectives are (1) supporting the Salatiga City function as a trading, education and sport city; a regional health facility center as well as a tourism transit city. (2) Demand on increasing public service needs, and (3) as an area arrangement in the hinterland and urban area in one unit planning.*

*The study objectives are to know the development performance of the expansion area and its contribution for Salatiga City development since the issues of the rule number 69, 1992, that was purposely related to the objectives of the region expansion. Aspects to be observed are government, development, and society aspects. The micro studied area are villages including in the expansion area covering 13 (thirteen) villages and macro studied area are Salatiga City area quoted in rules number 69, 1992 on the changes of the border area of Salatiga municipality and Semarang Regency.*

*In this study, an appraisal on the performance of the development of the expansion area of Salatiga City was executed by using methods of (1) scoring analysis towards government, development as well as society aspects. (2) resource-person's perception analysis towards the development of the expansion area of Salatiga City that are originated from government, private and society. (3) Public finance analysis towards the expanded area. In this case is the development expenditure belonging to the Salatiga City responsibility towards Salatiga City expansion area starting from 1992 up to 2000.*

*According to the scoring analysis, it can be inferred that there are no changes of management institution forms yet from the government aspect of view. From the government aspect of view, the parameters showing the development are trade facilities (market), electricity utilities, road condition, land use system and population growth and density. Parameters that consistently grow are education, health, and worship facilities as well as built area. And parameters less developed are entertainment facility, communication and clean water infrastructure. From the government aspect, the parameter shows the growth is society life arrangement and the parameter less developed is society organization. Based on resource-person's perception from government, private, and society sides toward the development of the expansion region are the expansion region has not been developed yet as expected. From the public finance sector side, the expansion area has not contributed yet to Salatiga City development. Revenue that is originated from the expansion region only contributes 24.6 % of the total expenditures. So the development of expansion region of the Salatiga City hasn't lead to the way of the objectives of the expansion as implied on the rules number 69, 1992.*

*This study needs to be followed by determining policies that are able to push the expansion area development so that in the future the expansion area can support the Salatiga City development as expected. The policies that can be taken by (1) developing the centers of the activities and socioeconomic services out of city nucleus area. (2) Intensifying the rules on the local tax and retribution in the expansion area.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Kami menyadari bahwa di dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang datang dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya laporan Tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor UNDIP Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP.
3. Bapak PM Brotosunaryo, SE, MSP selaku pembimbing utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatan beliau.
4. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau mengajar dan melakukan aktifitas lainnya.
5. Ibu Hj.Ir.Nany Yulastuti, MSP selaku pembahas, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan laporan Tesis.
6. Bapak Ir. Wisnu Pradoto, MT selaku penguji, yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan Tesis ini.
7. Ketua Project CPCO-Capacity Building in Urban Infrastructur Management, yang telah memberikan kesempatan beasiswa untuk melanjutkan studi.
8. Bapak Walikota Salatiga yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi.
9. Teman-teman CBUIM Angkatan IV, sebagai teman seperjuangan yang telah memberikan kritik, masukan dan informasi yang berharga.
10. Seluruh staf MTPK-UNDIP dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan ataupun kritik dan saran yang sangat berharga bagi penyelesaian laporan Tesis ini, karena terbatasnya tempat yang tersedia, maka tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam laporan.

Semoga segala bimbingan, dukungan, kritik, saran, dorongan dan perhatian yang telah Bapak/Ibu/Teman-teman berikan mendapat berkat Tuhan.

Semarang, Oktober 2002.  
Penyusun.

MM Hermini W

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR & PETA	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi .....	5
1.3.1 Tujuan Studi .....	5
1.3.2 Sasaran Studi .....	5
1.3.3 Manfaat Studi .....	6
1.4 Ruang Lingkup Studi .....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Substansial .....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi .....	13
1.6.1 Pendekatan Studi .....	13
1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi .....	14
1.6.3 Teknik Analisis .....	19
1.7 Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II PERKEMBANGAN KOTA DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA</b>	
2.1 Pengertian Kota .....	29
2.2 Aspek-aspek Kota .....	30
2.2.1 Aspek Fisik .....	31
2.2.2 Aspek Sosial .....	31
2.2.2 Aspek Ekonomi .....	32
2.3 Perkembangan Kota .....	32
2.4 Perluasan / Pemekaran Kota .....	39
2.5 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota .....	43
2.6 Pembiayaan Pembangunan .....	44
2.7 Rangkuman Kajian Teori .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI</b>	
3.1 Gambaran Umum Kota Salatiga .....	50
3.2 Kondisi Fisik dan Struktur Ruang Kota .....	51
3.3 Peran dan Fungsi Kota .....	53



3.4 Kebijakan Penataan Ruang .....	54
3.5 Pola Penggunaan Lahan .....	57
3.6 Pola Transportasi .....	59
3.7 Kependudukan .....	61
3.8 Perekonomian Kota .....	62
3.8.1 Pengaruh Potensi Fisik .....	62
3.8.2 Pengaruh Potensi Kegiatan Ekonomi .....	63
3.9 Fasilitas Perkotaan di Kota Salatiga .....	65
3.10 Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	66
3.11 Karakteristik Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	68
3.11.1 Jumlah Penduduk di Wilayah Perluasan .....	68
3.11.2 Struktur Penduduk menurut mata pencaharian di Wilayah Perluasan .....	69
3.11.3 Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan .....	71
3.11.4 Sarana Pendidikan di Wilayah Perluasan .....	73
3.11.5 Sarana Kesehatan di Wilayah Perluasan .....	74
3.11.6 Sarana Peribadatan di Wilayah Perluasan .....	75
3.11.7 Sarana Perdagangan di Wilayah Perluasan .....	75
3.11.8 Sarana Komunikasi di Wilayah Perluasan .....	76
3.11.9 Sarana Air Bersih di Wilayah Perluasan .....	77
3.11.10 Sarana Listrik di Wilayah Perluasan .....	78
3.11.11 Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Perluasan .....	79

#### **BAB IV ANALISIS KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**

4.1 Aspek Pemerintahan .....	
4.2 Aspek Pembangunan .....	80
4.2.1 Fasilitas Perdagangan .....	81
4.2.2 Fasilitas Pendidikan .....	81
4.2.3 Fasilitas Kesehatan .....	82
4.2.4 Fasilitas Komunikasi .....	82
4.2.5 Fasilitas Peribadatan .....	83
4.2.6 Fasilitas Hiburan .....	83
4.2.7 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk .....	84
4.2.8 Wilayah Terbangun .....	85
4.2.9 Pelanggan Telpon .....	86
4.2.10 Sistem Penataan Ruang .....	89
4.2.11 Pelanggan Air Bersih .....	89
4.2.12 Pelanggan Listrik .....	90
4.2.13 Keadaan Jalan .....	90
4.2.14 Pembiayaan Sektor Publik .....	91
4.3 Aspek Kemasyarakatan .....	95
4.3.1 Perubahan Tata Kehidupan .....	105
4.3.2 Organisasi Kemasyarakatan .....	105
4.4 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga dari Aspek Pemerintahan, Aspek Pembangunan dan Aspek Kemasyarakatan .....	106

4.5 Persepsi Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan .....	107
4.5.1 Persepsi Terhadap Aspek Pemerintahan .....	110
4.5.2 Persepsi Terhadap Aspek Pembangunan .....	110
4.5.3 Persepsi Terhadap Aspek Kemasyarakatan .....	110
4.5.4 Persepsi Terhadap Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	111
4.6 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	112
4.7 Pengembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	114
	116

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

5.1 Kesimpulan Studi .....	123
5.2 Rekomendasi .....	124

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	126
-----------------------	-----

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Lingkup Substansi Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	7
Tabel I.2	Kebutuhan Data Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	16
Tabel I.3	Kebutuhan Responden Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	18
Tabel I.4	Kriteria Penetapan Skoring .....	19
Tabel I.5	Metode Perhitungan Nilai Persentase .....	20
Tabel I.6	Metode Perhitungan Nilai Rasio .....	21
Tabel I.7	Interval Nilai Rasio .....	21
Tabel I.8	Penetapan Skoring Variabel Menurut Perubahan Jumlah / Keadaan .....	23
Tabel I.9	Komponen Pengeluaran dan Penerimaan dari Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	27
Tabel III.1	Pola Penggunaan Lahan di Kota Salatiga Tahun 2000 .....	57
Tabel III.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2000 .....	61
Tabel III.3	Struktur Penduduk Kota Salatiga Menurut Mata Pencapaian Tahun 2000 .....	62
Tabel III.4	Struktur Penduduk Kota Salatiga Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2000 .....	62
Tabel III.5	Ketersediaan Fasilitas Perkotaan Kota Salatiga Tahun 2000 ...	65
Tabel III.6	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Salatiga .....	66
Tabel III.7	Jumlah Penduduk Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	68
Tabel III.8	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	69
Tabel III.9	Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	70
Tabel III.10	Pola Guna Lahan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	72
Tabel III.11	Sarana Pendidikan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	73
Tabel III.12	Sarana Kesehatan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	74
Tabel III.13	Sarana Peribadatan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	75
Tabel III.14	Sarana Perdagangan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	76
Tabel III.15	Sarana Komunikasi di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	77
Tabel III.16	Jumlah Pelanggan Air Bersih di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	78
Tabel III.17	Jumlah Pelanggan Listrik di Wilayah Perluasan Kota Salatiga	

	Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	79
Tabel IV.1	Perhitungan Skor Aspek Pembangunan Berdasar Rasio di Wilayah Perluasan Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	84
Tabel IV.2	Perhitungan Skor Aspek Pembangunan Berdasar Perubahan Keadaan / Jumlah di Wilayah Perluasan Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	85
Tabel IV.3	Perubahan Lahan Terbangun Desa-Desa Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992-2000 .....	87
Tabel IV.4	Perhitungan Skor Aspek Pembangunan Berdasar Persentase di Wilayah Perluasan Tahun 1992 dan 2000 .....	91
Tabel IV.5	Perhitungan Skor Aspek Pembangunan Berdasar Perubahan Keadaan / Jumlah di Wilayah Perluasan Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	92
Tabel IV.6	Hasil Perhitungan Skor Terhadap Aspek Pembangunan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	92
Tabel IV.7	Penerimaan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1994-2000 .....	99
Tabel IV.8	Tingkat Suku Bunga Bank Tahun 1992-2000 .....	100
Tabel IV.9	Penerimaan di Wilayah Perluasan Menurut Nilai Tahun 2000 ..	101
Tabel IV.10	Pengeluaran Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun 1990/1991 – 2000 .....	102
Tabel IV.11	Pengeluaran Pembangunan di Wilayah Perluasan Menurut Nilai Tahun 2000 .....	103
Tabel IV.12	Pengeluaran Pembangunan di Wilayah Perluasan yang Berasal Dari Dana Sumbangan/Bantuan Tahun Anggaran 1993/1994 – 2000 .....	103
Tabel IV.13	Selisih Penerimaan dan Pengeluaran di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – 2000 .....	104
Tabel IV.14	Perhitungan Skor Aspek Kemasyarakatan di Wilayah Perluasan Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	107
Tabel IV.15	Skor Perkembangan Wilayah Perluasan Th. 1992 – 2000 .....	108
Tabel IV.16	Interval Nilai Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 – 2000 .....	109
Tabel IV.17	Hasil Penilaian Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan ..	112
Tabel IV.18	Persandingan Nilai Skor Data Primer dan Data Sekunder .....	114
Tabel IV.19	Variabel Kinerja Berdasarkan Tingkat Perkembangannya di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – 2000 .....	117
Tabel IV.20	Tingkat Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Parameter Perkembangan Wilayah Perluasan .....	118

## DAFTAR GAMBAR DAN PETA

Gambar 1.1	Wilayah Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	9
Gambar 1.2	Bagan Kerangka Pemikiran Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	11
Gambar 1.3	Kerangka Analisis Studi Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	12
Gambar 3.1	Pembagian Wilayah Kota (BWK) Salatiga .....	56
Gambar 3.2	Penggunaan Lahan Kota Salatiga .....	58
Gambar 3.3	Jaringan Jalan Kota Salatiga .....	60
Gambar 3.4	Wilayah Administrasi Kota Salatiga .....	67
Gambar 4.1	Persentase Perubahan Lahan Terbangun Tahun 1992-2000 .....	88
Gambar 4.2	Tingkat Perkembangan Desa-desa Wilayah Perluasan Tahun 2000 .....	94
Gambar 4.3	Diagram Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Variabel Perkembangan Wilayah Perluasan .....	118

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	: Peraturan Pemerintah Nomor 699 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang .....	129
Lampiran B	: Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga	
Tabel B.1	: Jumlah Penduduk di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992-2000 .....	135
Tabel B.2	: Jumlah Rumah Tangga di Wilayah Perluasan Kota Salatiga Tahun 1992 dan Tahun 2000 .....	136
Lampiran C	: Nilai dan Interval Nilai untuk Persepsi Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga	
Tabel C.1	: Jumlah Pertanyaan Wawancara dan Nilai Skor untuk Persepsi Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan.....	137
Tabel C.2	: Interval Nilai untuk Persepsi dari masing-masing Unsur Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan .....	138
Tabel C.3	: Interval Nilai untuk Mengetahui Persepsi Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan .....	139
Tabel C.4	: Perhitungan Skor Parameter Aspek Pembangunan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga .....	140
Lampiran D	: Penerimaan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga	
Tabel D.1	: Penerimaan PBB di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – Tahun 2000 .....	141
Tabel D.2	: Perhitungan Bagi Hasil PBB di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – 2000 .....	142
Tabel D.3	: Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – Tahun 2000 .....	143
Tabel D.4	: Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Wilayah Perluasan Tahun 1992 – 2000 .....	144
Tabel D.5	: Penerimaan Ijin Gangguan/HO di Wilayah Perluasan Tahun 1994-2000 .....	145
Tabel D.6	: Penerimaan Puskesmas/Pelayanan Kesehatan di Wilayah Perluasan Tahun 1994 – 2000 .....	145
Tabel D.7	: Penerimaan Ijin Lokasi dan Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan Tahun 1994 – 2000 .....	145
Tabel D.8	: Penerimaan Ijin Trayek di Wilayah Perluasan Tahun 1994 – 2000 .....	146
Tabel D.9	: Penerimaan Retribusi pembuatan KTP di Wilayah Perluasan Tahun 1994 – 2000 .....	147
Lampiran E	: Pengeluaran Pembangunan di Wilayah Perluasan	
Tabel E.1	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1990/1991 – 1992/1993 .....	148

Tabel E.2	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1993/1994 .....	149
Tabel E.3	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1994/1995 .....	150
Tabel E.4	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1995/1996 .....	151
Tabel E.5	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1996/1997.....	153
Tabel E.6	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1997/1998 .....	155
Tabel E.7	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1998/1999 .....	156
Tabel E.8	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 1999/2000 .....	157
Tabel E.9	: Belanja Pembangunan di Wilayah Perluasan Tahun Anggaran 2000 .....	158
Tabel E.10	: Pembiayaan Pembangunan di Wilayah Perluasan Yang Berasal dari Dana Bantuan / Sumbangan Tahun Anggaran 1993/1994 - 2000 .....	159
Lampiran F	: Rekapitulasi Hasil Wawancara .....	160
Lampiran G	: Gambar Kondisi Sarana Pemerintahan, Sarana Perdagangan, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, dan Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan Kota Salatiga	
Gambar G-1	: Kondisi Sarana Pemerintahan di Wilayah Perluasan .....	172
Gambar G-2	: Kondisi Sarana Perdagangan di Wilayah Perluasan .....	173
Gambar G.3	: Kondisi Sarana Pendidikan di Wilayah Perluasan .....	174
Gambar G.4	: Kondisi Sarana Kesehatan di Wilayah Perluasan .....	175
Gambar G.5	: Kondisi Sarana Peribadatan di Wilayah Perluasan .....	176
Gambar G.6	: Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan .....	177

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan di kota seperti aktifitas perdagangan, pemerintahan, pemukiman semakin lama membutuhkan lahan yang semakin luas. Terjadi persaingan yang kuat di pusat kota, terutama di kawasan yang paling menguntungkan, disamping ketersediaan lahan yang tetap dan terbatas. Pertambahan penduduk di pusat kota, dan tuntutan kehidupan baik aspek sosial, politik, budaya pada akhirnya akan membutuhkan fasilitas dan utilitas, seperti pemukiman, pendidikan, kesehatan dan rekreasi, yang kesemuanya membutuhkan lahan untuk keberlangsungannya.

Pesatnya pertumbuhan perkotaan dapat dilihat dari segi fisik, yang ditandai dengan perluasan wilayah terbangun yang melewati batas administrasi kota, juga ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier yang pesat dan mempunyai nilai tambah tinggi dibanding sektor primer (Kusbiantoro, 1993). Permasalahan yang timbul adalah kesulitan untuk mencari lahan. Salah satu alternatif adalah dengan melakukan perluasan wilayah administratif.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kota di masa yang akan datang, maka wilayah administrasi Kota Salatiga perlu dilakukan perluasan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, wilayah Kota Salatiga yang semula terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 3.890,86 ha diperluas menjadi 5.678,11 ha dengan menambah 13 (tiga belas) desa yang berasal dari wilayah Kabupaten Semarang. Daerah perluasan tersebut meliputi :



- a. Sebagian wilayah Kecamatan Salatiga Luar Kota Kabupaten Semarang , terdiri dari Desa Bugel, Desa Kauman Kidul dan Desa Sidorejo Kidul.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang terdiri dari Desa Kalibening, Desa Cebongan, Desa Tingkir Lor, Desa Tingkir Tengah dan Desa Noborejo.
- c. Sebagian Wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang terdiri dari Desa Randuacir dan Desa Kumpulrejo.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang terdiri dari Desa Kecandran, Desa Pulutan dan Desa Blotongan.

Kebijakan perluasan wilayah tersebut membawa konsekuensi terhadap penyediaan infrastruktur / prasarana, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta kegiatan lain seperti pengaturan tata guna lahan, pengaturan letak bangunan yang menunjang pengembangan daerah perluasan, tuntutan perwujudan integrasi secara sosial maupun ekonomi di dalam wilayah Kota Salatiga.

Kota Salatiga, merupakan salah satu kota yang terbatas baik sumberdaya keuangan maupun sumberdaya alamnya. Terlebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama mengenai keberlanjutan daerahnya. Keberlanjutan ini terutama mengenai sumber daya keuangan / potensi ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk maupun keuntungan posisi geografi.

Meskipun dengan segala keterbatasannya, Kota Salatiga memiliki kemampuan dalam konstelasi antar daerah. Kota Salatiga berada diantara jalur utama Semarang – Surakarta yang merupakan Pusat Wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Dalam konstelasi regional, Kota Salatiga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Berperan sebagai *stop over* bagi para pelaku perjalanan antar dua kota besar yaitu Semarang dan Surakarta, yang akan mendorong berkembangnya perekonomian Kota Salatiga (perdagangan, industri dan jasa).
2. Berperan sebagai simpul distribusi pariwisata bagi wilayah sekitar kota (*hinterland*) maupun wilayah regional yang lebih luas, sehingga Kota Salatiga perlu dikembangkan dengan fasilitas yang menunjang sektor pariwisata (penginapan, transportasi dan promosi).
3. Berperan sebagai terminal hasil produksi pertanian wilayah belakangnya (*food station*) dan sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat mendukung produksi pertanian wilayah belakangnya. Jadi pengembangan Kota Salatiga diarahkan untuk penyediaan fasilitas perdagangan, industri pengolahan hasil pertanian, maupun prasarana dan sarana perekonomian lainnya (pasar induk, pasar buah dan lain-lain).

Hal tersebut diatas sesuai dengan Tri Krida Utama Kota Salatiga yakni pengembangan Kota Salatiga menuju :

1. Kota pendidikan dan olah raga
2. Pusat kegiatan perdagangan dan transportasi, skala lokal dan wilayah belakangnya.
3. Kota Transit Pariwisata.

Dengan adanya kebijakan keruangan, yaitu perluasan wilayah, maka upaya pembangunan yang dilakukan di daerah perluasan tentunya diarahkan pada upaya-upaya yang mendukung terwujudnya fungsi kota tersebut diatas.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi mengenai kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang lebih diarahkan

pada latar belakang / tujuan diundangkannya PP No. 69 Tahun 1992, apabila dilihat dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan.

Tujuan dilakukan perluasan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan seperti disebutkan diatas adalah:

- (1) mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, serta kota transit pariwisata,
- (2) tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- (3) sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan kota yang ditandai dengan perluasan wilayah. Tujuan dilakukannya perluasan wilayah seperti tersirat dalam PP No. 69 Tahun 1992 adalah (1) mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, serta kota transit pariwisata, (2) tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan (3) sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan.

Dengan perluasan wilayah administratif tersebut diharapkan terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan, terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Pembangunan daerah perkotaan merupakan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan sektoral termasuk penyediaan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana kota. Perluasan wilayah tersebut, meliputi daerah-daerah disekitar kota dengan pola melingkar, dan masih bersifat pedesaan dengan kegiatan pada umumnya adalah pertanian (agraris).

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tersebut, yang menjadi pertanyaan studi adalah:

1. Bagaimana kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga tersebut ?
2. Apakah perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga mengarah pada tujuan dilakukannya perluasan wilayah seperti tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992?
3. Apakah perkembangan wilayah perluasan memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Salatiga dari pembiayaan sektor publik?

### **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi**

#### **1.3.1 Tujuan Studi**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sampai dengan tahun 2000.

#### **1.3.2 Sasaran Studi**

Untuk mencapai tujuan studi seperti disebutkan pada butir 1.3.1, sasaran studi yang akan dilakukan meliputi :

1. Mengidentifikasi parameter-parameter dari tujuan perluasan wilayah Kota Salatiga.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga
3. Mengkaji kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dilihat dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan.
4. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, sarana pelayanan masyarakat di wilayah perluasan Kota Salatiga.

5. Mengkaji kontribusi wilayah perluasan terhadap perkembangan wilayah Kota Salatiga dilihat dari pembiayaan sektor publik.
6. Menentukan dan merumuskan kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga

### 1.3.3 Manfaat Studi

Manfaat dari studi ini adalah dapat diketahui kinerja wilayah perluasan Kota Salatiga, dan kontribusinya bagi perkembangan Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Selain hal tersebut, diharapkan hasil studi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan arah kebijakan pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga.

## 1.4 Ruang Lingkup

### 1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial dalam studi ini meliputi kajian terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dikaitkan dengan latar belakang / tujuan diadakannya perluasan wilayah sesuai Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992, serta kajian kontribusi wilayah perluasan Kota Salatiga terhadap perkembangan Kota Salatiga.

Tujuan diadakannya perluasan wilayah tersebut dijabarkan kedalam parameter-parameter yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Secara rinci tujuan perluasan wilayah tersebut dijabarkan kedalam aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan disajikan dalam Tabel I.1 berikut :

**TABEL I.1**  
**LINGKUP SUBSTANSI STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**

No.	Tujuan	Parameter	Keterangan
1	Mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat kesehatan serta kota transit pariwisata	1. Fasilitas perdagangan /perekonomian meliputi jumlah warung, toko, pasar, bank. 2. Fasilitas Pendidikan meliputi jumlah TK/SD, SLTP, SLTA, Akademi / PT 3. Fasilitas Kesehatan meliputi jumlah puskesmas pembantu, puskesmas, praktek dokter/mantri, poliklinik, 4. Fasilitas Komunikasi meliputi jumlah sambungan telpon, telpon umum, kiospon / wartel. 5. Fasilitas Hiburan meliputi jumlah rumah makan, penginapan / hotel, sarana rekreasi 6. Sarana peribadatan meliputi jumlah surau, mesjid, gereja, Pura / Vihara 7. Kependudukan meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk. 8. Ketersediaan air bersih meliputi jumlah pelanggan PDAM 9. Ketersediaan listrik meliputi jumlah pelanggan listrik	Aspek pembangunan  Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan  Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan
2.	Tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat	1. Lembaga pengelola / administrasi 2. Organisasi Kemasyarakatan meliputi jumlah organisasi masyarakat 3. Perubahan Tata kehidupan (struktur penduduk menurut mata pencaharian)	Aspek Pemerintahan Aspek Kemasyarakatan  Aspek Kemasyarakatan
3.	Usaha penataan wilayah dipinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan	1. Sistem penataan ruang 2. Aksesibilitas/ transportasi 3. Pola tata guna lahan meliputi perubahan pola tata guna lahan 4. Pembiayaan Pembangunan	Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan Aspek Pembangunan

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Tujuan diadakannya perluasan wilayah dijabarkan ke dalam aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan didasarkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada dasarnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan.

Untuk melengkapi kajian terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga perlu pula untuk mengetahui persepsi narasumber terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, yang informasinya diperoleh dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat. Kajian kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga meliputi perkembangan dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000.

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Spasial / Wilayah Studi

Ruang lingkup spasial / wilayah studi secara mikro adalah wilayah perluasan Kota Salatiga yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa, meliputi Desa Blotongan, Desa Bugel, Desa Kauman Kidul, Desa Pulutan, Desa Kalibening, Desa Sidorejo Kidul, Desa Tingkir Lor, Desa Tingkir Tengah, Desa Noborejo, Desa Kumpulrejo, Desa Randuacir, Desa Cebongan serta Desa Kecandran, serta secara makro adalah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup spasial seperti dijelaskan diatas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## KAB. SEMARANG

## ORIENTASI LOKASI



KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG

OTOS 23



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA

PETA

WILAYAH STUDI

## LEGENDA :

- BATAS KOTA / WILAYAH STUDI MAKRO
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- SUNGAI
- WILAYAH STUDI MIKRO

## WILAYAH PERLUASAN :

1. Blotongan
2. Bugel
3. Kauman Kidul
4. Pulutan
5. Kalibening
6. Sidorejo Kidul
7. Tingkir lor
8. Tingkir Tengah
9. Noborejo
10. Kumpulrejo
11. Randuacir
12. Cebongan
13. Kecandran

UTARA



NO. GAMBAR

SKALA

1.1

1 : 90.000

SUMBER

BAPPEDA  
KOTA SALATIGA



## 1.5 Kerangka Pemikiran

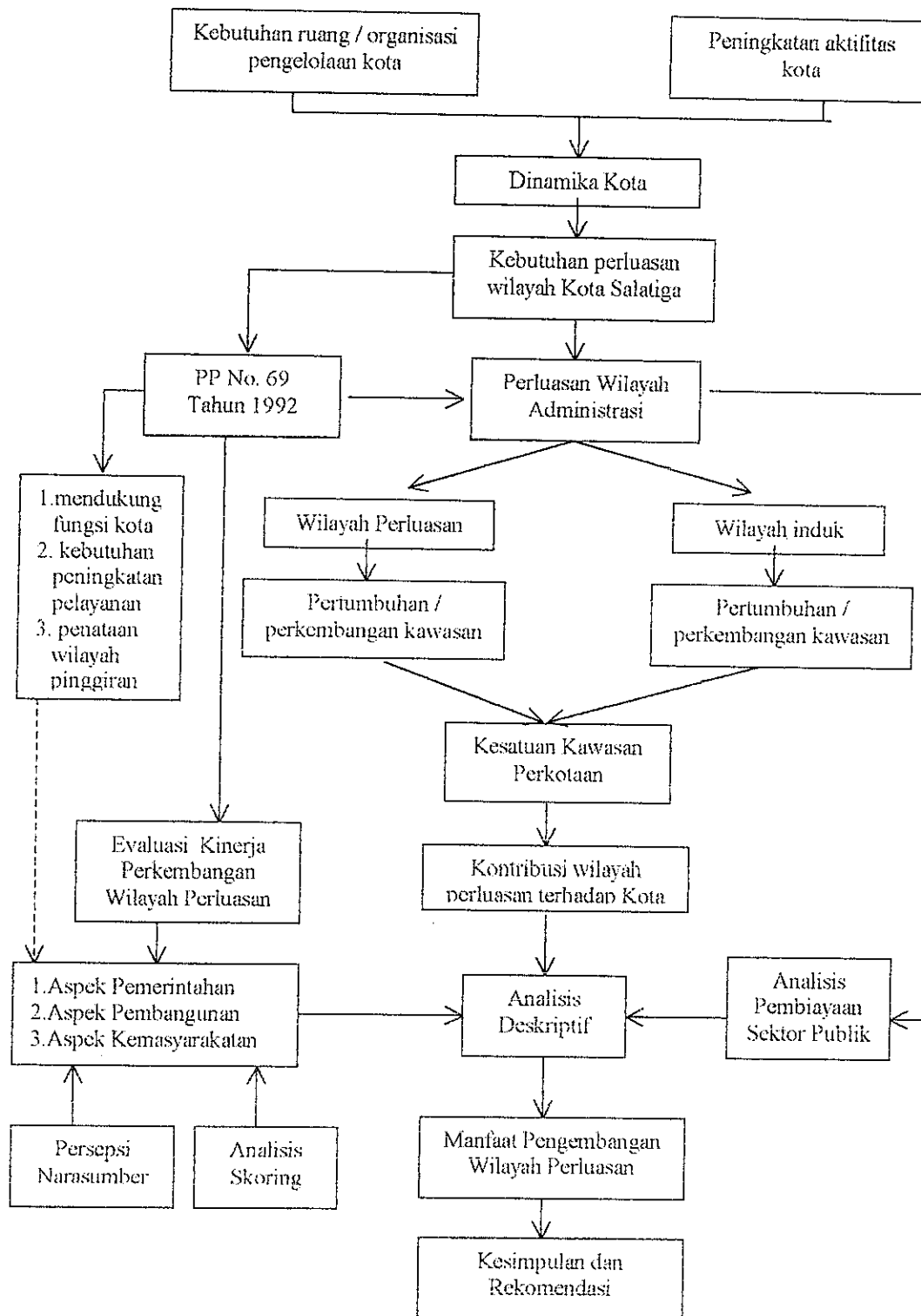
Peningkatan aktifitas / kegiatan di kota seperti pemukiman, perdagangan serta pemerintahan, semakin lama membutuhkan lahan yang semakin luas. Dinamika kota yang selalu meningkat membutuhkan perluasan wilayah. Kebijakan keruangan yang ditempuh adalah dengan perluasan wilayah. Terdapat 2 (dua) buah kawasan setelah terjadinya perluasan wilayah, yaitu wilayah induk dan wilayah perluasan, yang masing-masing wilayah tersebut mengalami pertumbuhan / perkembangan. Perkembangan yang dimaksud dalam studi ini adalah suatu perubahan yang menyangkut segala perubahan didalam masyarakat baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dilakukan studi mengenai kinerja terhadap perkembangan wilayah perluasan, sesuai latar belakang / tujuan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 dilihat dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, serta mengkaji kontribusi wilayah perluasan Kota Salatiga terhadap perkembangan Kota Salatiga melalui analisis pembiayaan dari sektor publik.

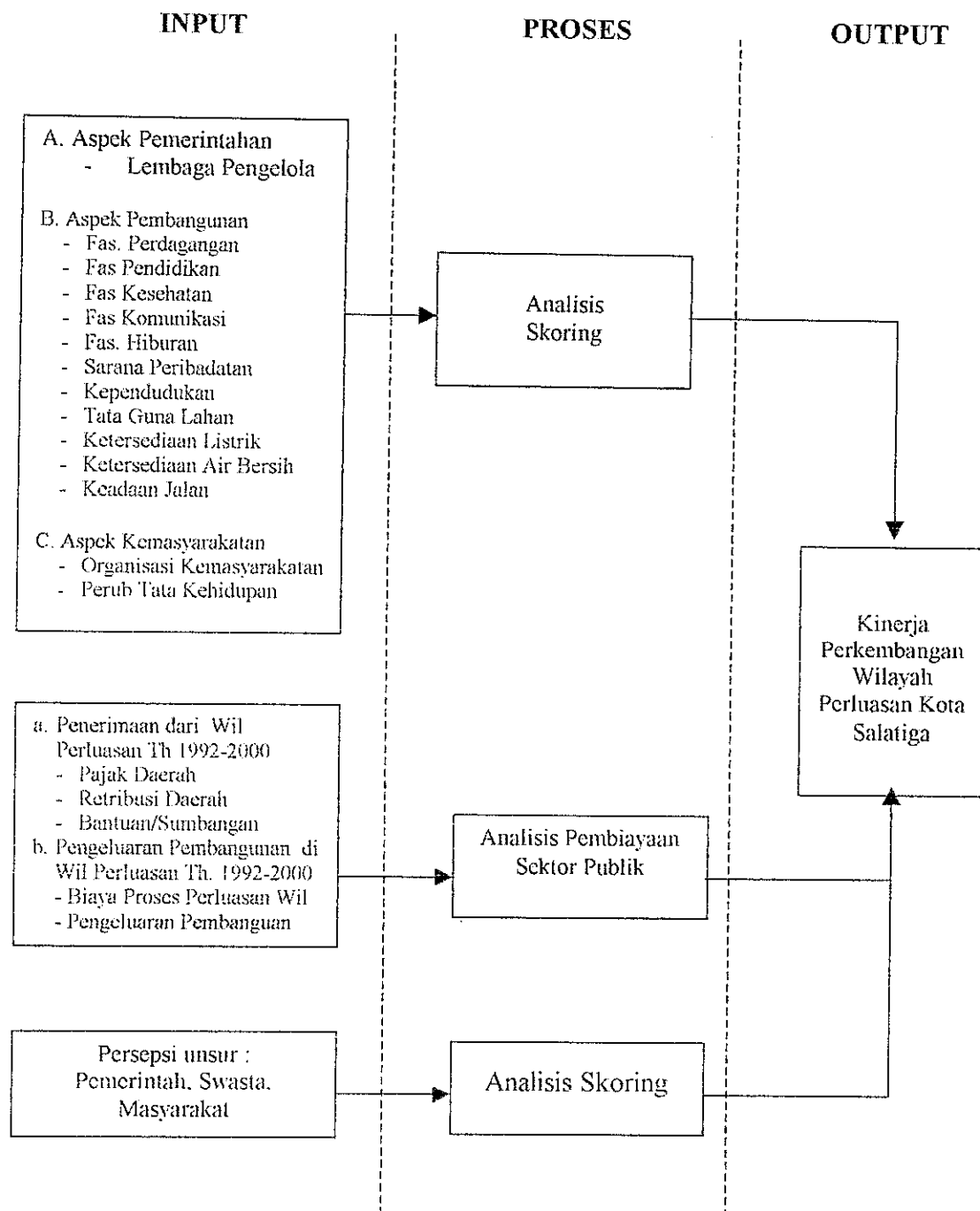
Dari evaluasi terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan tersebut, dapat diketahui kontribusinya terhadap perkembangan kota yang dapat bermanfaat/ menguntungkan ataupun tidak, sehingga akan diberikan arahan bagi kebijakan pengembangan di wilayah perluasan Kota Salatiga.

Kerangka pikir seperti diuraikan diatas, apabila disajikan dalam bentuk skema dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan kerangka analisisnya dapat dilihat pada Gambar 1.3.

**GAMBAR 1.2**  
**BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**



**GAMBAR 1.3**  
**KERANGKA ANALISIS STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**



## 1.6 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

### 1.6.1 Pendekatan Studi

Studi ini merupakan studi evaluasi yang menjawab pertanyaan *bagaimana kinerja perkembangan* wilayah perluasan Kota Salatiga. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan studi adalah menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif (*descriptive-explorative approach*) untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan perluasan wilayah.

Pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) dimaksudkan untuk menguraikan gambaran keadaan perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga melalui pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, sehingga akan diketahui kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dan kontribusinya terhadap perkembangan Kota Salatiga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

Pendekatan eksploratif (*explorative approach*) dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat yang terdiri dari unsur pemerintah / birokrasi, swasta dan masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga berdasarkan pengalaman dan wawasan dari nara sumber yang mengetahui kondisi Kota Salatiga.

Berdasarkan pendekatan diatas, pencapaian tujuan studi ditempuh dengan :

1. Melakukan kajian pustaka tentang kota dan perkembangannya, sehingga dapat diketahui variabel-variabel dalam menilai perkembangan kota.
2. Melakukan kajian terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dilihat dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan serta aspek kemasyarakatan dengan menggunakan metode skoring.

3. Melakukan kajian analisis pembiayaan untuk mengetahui kontribusi wilayah perluasan Kota Salatiga, sehingga dapat diketahui perluasan wilayah menguntungkan atau tidak dilihat dari pembiayaan sektor publik.
4. Melakukan kajian analisis deskriptif untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga sehingga dapat diberikan arahan bagi kebijakan pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga.

#### 1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu ataupun praktis. Dengan kata lain, metodologi penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian, atau merupakan acuan pelaksanaan studi yang meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data dan teknik analisis yang digunakan.

Metoda yang digunakan dalam studi ini adalah analisa deskriptif eksploratif, yang lebih berorientasi evaluatif.

##### 1.6.2.1 Kebutuhan Data

Agar analisis bisa dilaksanakan dan tujuan serta sasaran studi ini berhasil, diperkirakan membutuhkan data-data. Data terdiri dari Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi.

Pada studi ini, data yang dibutuhkan adalah :

#### A. Data primer

Data primer yang dibutuhkan dalam studi ini berasal dari unsur swasta, pemerintah daerah serta masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara berstruktur dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut mencakup pendapat, pengetahuan, pandangan, terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, yang erat kaitannya dengan variabel-variabel aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan seperti telah disebutkan pada bab terdahulu. Dalam usaha memperoleh data melalui wawancara ditentukan jumlah responden.

#### B. Data sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Data kondisi fisik wilayah studi, merupakan data kondisi eksisting fisik wilayah studi.
2. Data kependudukan, meliputi data kuantitas dan kualitas penduduk wilayah perluasan Kota Salatiga.
3. Data sosial ekonomi meliputi data kuantitas prasarana dan sarana perekonomian di wilayah perluasan Kota Salatiga
4. Data ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah perluasan Kota Salatiga, yang bermanfaat untuk menilai perkembangannya.
5. Data kelembagaan dan kebijakan terhadap wilayah perluasan Kota Salatiga
6. Data ekonomi dan keuangan, meliputi identifikasi dari penerimaan dan pengeluaran dari wilayah perluasan Kota Salatiga, dari pembiayaan sektor publik.

Secara rinci kebutuhan data dengan berbagai cara perolehannya, sebagai berikut  
(TABEL I.2) :

**TABEL I.2**  
**KEBUTUHAN DATA STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**

NO	JENIS DATA	VARIABEL	ASPEK	SUMBER
I	DATA PRIMER	Persepsi terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga	Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan	Unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat
II	DATA SEKUNDER (Th. 1992 dan 2000)			
A	DATA WILAYAH PERLUASAN	1. Luas wilayah terbangun 2. Pola Penggunaan lahan 3. RUTR Kota Salatiga	Pembangunan Pembangunan Pembangunan	BAPPEDA, BPN
B	KEPENDUDUKAN	4. Jumlah penduduk 5. Kepadatan Penduduk 6. Jumlah rumah tangga 7. Jumlah rumah tangga pelanggan telpon 8. Jumlah rumah tangga pelanggan listrik 9. Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih 10. Struktur penduduk menurut mata pencaharian 11. Pertumbuhan penduduk	Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Kemasyarakatan Pembangunan	BPS, BAPPEDA
C	DATA FASILITAS / SARANA PERKOTAAN	12. Jumlah warung / Toko 13. Jumlah Pasar 14. Jumlah TK/SD 15. Jumlah SMP 16. Jumlah SLTA 17. Jumlah Poliklinik, Praktek Dokter / Mantri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu 18. Jumlah hotel/penginapan 19. Jumlah restoran/rumah makan 20. Jumlah sarana rekreasi 21. Jumlah Masjid, Surau Gereja, Pura / Vihara 22. Data keadaan jalan, Jaringan jalan, panjang jalan 23. Jumlah Telpon umum, kiospon/wartel	Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan	BAPPEDA, BPS, Desa
D	DATA EKONOMI & KEUANGAN (Wilayah Perluasan)	24. APBD Kota Salatiga th. 1992-2000 25. Jumlah Pajak Daerah 26. Jumlah Retribusi, Daerah 27. Penerimaan lain yang sah	Pembangunan Pembangunan Pembangunan	BAPPEDA, BPS BPKD
E	SOSIAL KEMASYARAKATAN	28. Kelembagaan Pengelola 29. Jumlah organisasi Kemasyarakatan	Pemerintahan Kemasyarakatan	Bag.Tapem Kesbanglinmas

Sumber : Hasil Analisis, 2002

#### 1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan akan dilakukan melalui wawancara, kajian pustaka berupa produk-produk perencanaan, data sekunder yang berkaitan, dan observasi lapangan.

Data sekunder dipilih hanya data tertentu saja yang sesuai dengan variabel yang digunakan dalam studi ini. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam upaya memperoleh data-data tersebut diatas adalah melalui :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam mengenai persepsi terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, menanyakan hal-hal yang belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau catatan-catatan, yang ada pada kantor/ dinas/ instansi/ organisasi masyarakat.
- c. Observasi lapangan, dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi daerah perluasan

#### 1.6.2.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dari data yang terkumpul dilakukan pengelompokan sesuai kebutuhan agar memudahkan terhadap analisis data dimaksud. Tahap berikutnya adalah mengatur data sehingga dapat dilakukan analisis. Analisis data adalah proses mengkoordinasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan (Moleong, 1988:103).



#### 1.6.2.4 Teknik Sampling

Responden dalam studi ini terdiri dari unsur pemerintah daerah / birokrasi, unsur swasta dan unsur masyarakat, yang selama ini terlibat dalam pembangunan di wilayah perluasan, yang dapat menggambarkan persepsi terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga.

Metode yang digunakan untuk menetapkan responden adalah menggunakan purposif sampling dimana responden dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau obyek studi, yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Dalam Pabundu (1997:33) disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal besarnya sampel yang dapat diambil dan mewakili suatu populasi. Tetapi disebutkan pula bahwa sampel terkecil dan dapat mewakili distribusi normal adalah 30 (tiga puluh). Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka jumlah responden dalam studi ini ditetapkan sebanyak 49 orang yang secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut (TABEL I.3) :

**TABEL I.3**  
**KEBUTUHAN RESPONDEN STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**

KELOMPOK	JML RESP	KETERANGAN
Birokrasi	5 orang	Instansi Pemerintah Kota Salatiga
Swasta	5 orang	1. Ketua Gapensi 2. Ketua Kadinda 3. 3 (tiga) orang pengusaha yg berada di wilayah perluasan
Masyarakat	39 orang	Desa-desa wilayah perluasan, masing-masing 3 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua LKMD, dan Ketua PKK
Jumlah	49 orang	

Sumber : Hasil Analisis, 2002

### 1.6.3 Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah :

#### 1.6.3.1 Analisis skoring / pembobotan.

Metode skoring digunakan untuk memberikan penilaian terhadap variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria pembobotnya akan didapatkan dari variabel-variabel penentu yang didapatkan dari pengumpulan data.

Penetapan nilai skoring / pembobotan yang digunakan dalam studi ini mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2. Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1987.

Pemberian nilai skor untuk masing-masing aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan dijelaskan pada tabel berikut (TABEL 1.4):

**TABEL 1.4**  
**KRITERIA PENETAPAN SKORING**

ASPEK	VARIABEL	METODE PERHITUNGAN	KRITERIA
Pemerintahan	1. Lembaga Pengelola	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Desa 3 = Kelurahan
Pembangunan	1. Fasilitas Perdagangan	Rasio	1 = $\leq 0,33$ 2 = $0,34 - 0,66$ 3 = $\geq 0,67$
	2. Fasilitas Pendidikan	Rasio	1 = $\leq 0,33$ 2 = $0,34 - 0,66$ 3 = $\geq 0,67$
	3. Fasilitas Kesehatan	Rasio	1 = $\leq 0,33$ 2 = $0,34 - 0,66$ 3 = $\geq 0,67$
	4. Fasilitas Komunikasi	Rasio	1 = $\leq 0,33$ 2 = $0,34 - 0,66$ 3 = $\geq 0,67$

Tabel dilanjutkan ke hal berikut

Lanjutan Tabel I.4

	5. Fasilitas Hiburan	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Perub < Kota Salatiga 3 = Perub.> Kota Salatiga
	6. Sarana Peribadatan	Rasio	1 = $\leq 0,33$ 2 = $0,34 - 0,66$ 3 = $\geq 0,67$
	7. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Perub < Kota Salatiga 3 = Perub.> Kota Salatiga
	8. Wilayah terbangun	Persentase	1 = Peningkatan < 5 % 2 = Peningkatan 5-10 % 3 = Peningkatan > 10 %
	9. Pelanggan Telpn	Persentase	1 = Peningkatan < 25 % 2 = Peningkatan 26-50 % 3 = Peningkatan > 51 %
	10. Sistem Penataan Ruang	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Belum ada perencanaan 3 = Sdh ada perencanaan
	11. Pelanggan Air Bersih	Persentase	1 = Peningkatan < 25% 2 = Peningkatan 26-50 % 3 = Peningkatan > 51 %
	12. Pelanggan Listrik	Persentase	1 = Peningkatan < 25 % 2 = Peningkatan 26-50 % 3 = Peningkatan > 51 %
	13. Keadaan Jalan	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Blm semua diaspal 3 = Semua jalan diaspal
Kemasyarakatan	1. Perubahan Tata Kehidupan	Persentase	1 = Mata pench. Pert > non perta 3 = Mata pench pert < non pert
	2. Organisasi Kemasyarakatan	Perub. Keadaan / Jumlah	1 = Perub < Kota Salatiga 3 = Perub.> Kota Salatiga

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Metode perhitungan masing-masing variabel menggunakan rumus sebagai berikut :

A. Perhitungan nilai persentase

Metode perhitungan persentase dapat dilihat pada tabel (TABEL I.5) berikut :

**TABEL I.5**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI PERSENTASE**

NO	VARIABEL	RUMUS/CARA PERHITUNGAN
1	Persentase luas wilayah terbangun	Wilayah terbangun dibagi luas wilayah perluasan dikalikan 100
2	Persentase pelanggan telpon terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga pelanggan telpon dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
3	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga pelanggan listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
4	Persentase pelanggan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
5	Persentase penduduk yang bekerja disektor non pertanian	Jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian dibagi jumlah penduduk menurut mata pencaharian dikali 100

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

## B. Perhitungan nilai rasio

Metode perhitungan nilai rasio dapat dilihat pada table (TABEL I.6) berikut :

**TABEL I.6**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI RASIO**

NO	VARIABEL	RUMUS/CARA PERHITUNGAN
1	Rasio Lembaga Keuangan per 10000 penduduk	Jumlah Lembaga Keuangan dibagi jumlah penduduk dikali 10000
2	Rasio kelompok pertokoan per 10000 penduduk	Jumlah kelompok pertokoan dibagi jumlah penduduk dikali 10000
3	Rasio pasar per 10000 penduduk	Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10000
4	Rasio sekolah TK per 1000 penduduk	Jumlah sekolah TK dibagi jumlah penduduk dikalikan 1000
5	Rasio sekolah SD per 1600 jumlah penduduk	Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk dikalikan 1600
6	Rasio sekolah SLTP per 4800 penduduk	Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk dikalikan 4800
7	Rasio sekolah SLTA per 9600 penduduk	Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk dikalikan 9600
8	Rasio fasilitas kesehatan per 10000 penduduk	Jumlah Poliklinik, Puskesmas pembantu, puskesmas, praktek Dokter/mantri dibagi jumlah penduduk dikali 10000
9	Rasio fasilitas komunikasi per 10000 penduduk	Jumlah kiosk/wartel dibagi jumlah penduduk dikali 10000
10	Rasio sarana peribadatan per 10000 penduduk	Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10000

Sumber : 1. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

2. Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1987.

Perhitungan variabel dilakukan dengan memberikan nilai skor. Sebelum ditentukan skor masing-masing, ditetapkan terlebih dahulu interval nilai rasio, yang dibagi kedalam 3 (tiga) kelas/kategori seperti pada tabel berikut (TABEL I.7) :

**TABEL I.7**  
**INTERVAL NILAI RASIO**

No	Interval	Skor
1	$\leq 0,33$	1
2	$0,34 - 0,66$	2
3	$\geq 0,67$	3

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Perhitungan tersebut meliputi perhitungan keadaan tahun 1992 dan tahun 2000. Setelah diketahui nilai perhitungan masing-masing variabel pada tahun 1992 dan pada tahun 2000, untuk menilai tingkat perkembangannya, masing-masing nilai perhitungan variabel tahun 2000 dibagi dengan nilai perhitungan masing-masing variabel tahun 1992, menggunakan rumus :

$$\text{Proporsi (n)} = \frac{\text{Nilai perhitungan variabel Th.2000}}{\text{Nilai perhitungan variabel Th. 1992}}$$

-----(1)

*Apabila* nilai  $n > 1$  berarti perkembangan menunjukkan nilai positif, baik  
 $n = 1$  berarti tidak ada perubahan, tetap  
 $n < 1$  berarti perkembangan menunjukkan nilai negatif, kurang

### C. Perhitungan Perubahan Jumlah / Perubahan Keadaan

Selain berdasarkan rasio dan persentase ada beberapa variabel yang menggunakan perhitungan berdasarkan perubahan jumlah serta perubahan keadaan. Variabel tersebut meliputi :

1. Penataan Ruang
2. Perubahan Keadaan Jalan
3. Jumlah hotel / penginapan
4. Jumlah restoran / rumah makan,
5. Jumlah sarana rekreasi,
6. Lembaga pengelola,
7. Jumlah organisasi kemasyarakatan,
8. Pertumbuhan penduduk,
9. Kepadatan penduduk,

10. Tata kehidupan masyarakat yang meliputi struktur penduduk menurut mata pencaharian.

Pemberian nilai skor untuk variabel tersebut dijelaskan dalam tabel (TABEL I.8) berikut :

**TABEL I.8**  
**PENETAPAN SKORING VARIABEL MENURUT PERUBAHAN JUMLAH / KEADAAN**

No	Variabel	Nilai skor
1	Sistem Penataan Ruang	1 = Belum ada perencanaan 3 = Sudah ada perencanaan
2	Keadaan Jalan	1 = Belum seluruh jalan desa diaspal 3 = Seluruh jalan desa diaspal
3	Jumlah Hotel / Penginapan	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
4	Jumlah Restoran/Rumah Makan	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
5	Jumlah Sarana Rekreasi	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
6	Lembaga Pengelola	1 = Desa 3 = Kelurahan
7	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
8	Pertumbuhan Penduduk	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
9	Kepadatan Penduduk	1 = Pertumbuhan / Perubahan lebih rendah dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga 3 = Pertumbuhan / Perubahan lebih tinggi dari pertumbuhan /Perubahan di Kota Salatiga
10	Tata Kehidupan Masyarakat, meliputi struktur penduduk menurut mata pencaharian	1 = Prosentase penduduk bermata pencaharian pertanian lebih besar dari pada bermata pencaharian non pertanian 3 = Prosentase penduduk bermata pencaharian pertanian lebih kecil dari pada bermata pencaharian non pertanian

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Keterangan : nilai skor = 1, berarti belum berkembang  
nilai skor = 3, berarti perkembangannya baik.

### 1.6.3.2 Analisis Terhadap Persepsi Narasumber

Persepsi narasumber, berasal dari unsur pemerintah/birokrasi, unsur swasta dan unsur masyarakat. Untuk mengetahui persepsi dari unsur pemerintah / birokrasi, unsur swasta dan unsur masyarakat, hasil dari wawancara dimasukkan kedalam tabel hasil penilaian. Penilaian dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu penilaian untuk kategori tidak berkembang diberi nilai skor 1, kategori tetap diberi nilai skor 2 dan kategori sudah berkembang diberi nilai skor 3.

Untuk mengetahui persepsi dari narasumber terhadap perkembangan wilayah perluasan, total nilai hasil wawancara masing-masing unsur terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan di kelompokkan kedalam 3 kelas. Kelas pertama nilai skor 1, berarti di wilayah perluasan, perkembangannya belum memberikan kontribusi positif terhadap Kota Salatiga, nilai skor 2, berarti di wilayah perluasan belum berkembang/ tetap, dan nilai skor 3, berarti bahwa wilayah perluasan telah berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi Kota Salatiga.

### 1.6.3.3 Analisis Pembiayaan Sektor Publik

Analisis pembiayaan pembangunan dalam studi ini adalah analisis pembiayaan pembangunan dari sektor publik, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terhadap wilayah perluasan dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000. Dalam melakukan analisis pembiayaan sektor publik, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap komponen penerimaan dan komponen pengeluaran sehingga dapat diketahui nilai penerimaan dan nilai pengeluaran.

Setelah nilai penerimaan dan nilai pengeluaran untuk masing-masing tahun diketahui, maka nilai - nilai tersebut diperhitungkan menurut nilai sekarang (*present value*), dengan cara mengalikan besarnya penerimaan dan pengeluaran tersebut

dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = F(1+i)^n \quad \text{-----}(2)$$

Keterangan : P = nilai saat ini  
 F = nilai lampau  
 i = suku bunga, *digunakan suku bunga rata-rata antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2000.*  
 n = jumlah tahun

Setelah diketahui nilai pada saat ini (*present value*) ditentukan selisih antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Selisih} = \sum \text{penerimaan} - \sum \text{pengeluaran} \quad \text{-----}(3)$$

Dari hasil perhitungan tersebut apabila selisih bernilai positif/surplus, berarti menguntungkan, sedangkan apabila selisih bernilai negatif/defisit, maka perluasan wilayah tersebut kurang menguntungkan dari segi pembiayaan sektor publik.

#### A. Identifikasi Pengeluaran

Secara umum jenis pengeluaran meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan pengeluaran rutin. Pengeluaran pembangunan dilakukan hanya satu kali yaitu pada saat pembangunan atau penyediaan barang dan jasa umum tertentu.

Sedangkan pengeluaran rutin dilakukan secara berulang setiap tahun, untuk pengelolaan dan pemeliharaan barang dan jasa umum yang telah ada. Pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga diperhitungkan sebagai berikut :



### 1. Pengeluaran Rutin

Yang termasuk kedalam pengeluaran rutin adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Lain-lain.

### 2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan dilakukan satu kali yaitu pada pembangunan baru dan pemeliharaan barang dan jasa umum, meliputi :

- a. Biaya Proses Perluasan Wilayah Administrasi
- b. Pengeluaran pembangunan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk anggaran proyek-proyek pembangunan di wilayah perluasan.

Data komponen pengeluaran diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000.

### B. Identifikasi Penerimaan

Komponen penerimaan merupakan penerimaan pemerintah daerah di wilayah perluasan dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 yang meliputi :

#### 1. Penerimaan dari Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

#### 2. Penerimaan dari Retribusi Daerah

Penerimaan dari retribusi daerah, meliputi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Tempat Usaha / HO, Ijin Trayek, Ijin Prinsip/Lokasi, Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### 3. Bantuan dan sumbangan

Bantuan dan sumbangan meliputi Inpres Dati II, Inpres SD/MI, Inpres Sarana Kesehatan, Inpres Peningkatan Jalan

Secara rinci, komponen pengeluaran dan penerimaan disajikan dalam tabel (TABEL I.9) berikut :

**TABEL I.9**  
**KOMPONEN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN DARI WILAYAH**  
**PERLUASAN KOTA SALATIGA**

KOMPONEN PENGELUARAN	KOMPONEN PENERIMAAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Proses Perluasan Wilayah Administrasi</li> <li>2. Pengeluaran Rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.</li> <li>3. Pengeluaran pembangunan, merupakan anggaran proyek-proyek pembangunan di wilayah perluasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dari Pajak Daerah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Hotel dan Restoran</li> <li>b. Pajak Bumi dan Bangunan</li> <li>c. Pajak Penerangan Jalan Umum</li> <li>d. Pajak Reklame</li> <li>e. Pajak Hiburan</li> </ol> </li> <li>2. Penerimaan dari Retribusi Daerah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin Mendirikan Bangunan</li> <li>b. Ijin Tempat Usaha / HO</li> <li>c. Ijin Trayek</li> <li>d. Ijin Prinsip / Lokasi</li> <li>e. Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> </ol> </li> <li>3. Bantuan dan sumbangan Bantuan dan sumbangan meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inpres dari II</li> <li>b. Inpres SD/MI</li> <li>c. Inpres Sarana Kesehatan</li> <li>d. Inpres Peningkatan Jalan</li> </ol> </li> </ol>

*Sumber : Hasil Analisis, 2002*

#### 1.6.3.4 Analisis Deskriptif

Dari hasil analisis skoring, analisis pembiayaan serta persepsi dari narasumber terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga kemudian dideskriptifkan. Analisis deskriptif diperlukan untuk menjelaskan data yang bersifat kualitatif. Melalui analisis deskriptif dalam studi ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga sehingga dapat diberikan arahan terhadap kebijakan pengembangan wilayah perluasan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bab, yang menguraikan tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, mulai dari latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian. Uraian masing-masing bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada bab I berisi latar belakang, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat studi, ruang lingkup substansial dan wilayah, kerangka pemikiran, pendekatan dan metode pelaksanaan studi serta sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian teori, pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kajian tentang perkembangan kota, perluasan kota serta pembiayaan pembangunan kota.

Bab III adalah gambaran umum wilayah studi, meliputi gambaran umum Kota Salatiga dan gambaran umum wilayah perluasan Kota Salatiga ditinjau dari berbagai aspek meliputi geografis, administratif, kependudukan, ekonomi, sosial, serta fasilitas perkotaan.

Bab IV merupakan analisis kinerja perkembangan wilayah perluasan dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan serta aspek kemasyarakatan. Pada bagian ini juga terdapat upaya pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga.

Pada bab V adalah penutup yang akan menguraikan kesimpulan studi dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN KOTA DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA**

#### **2.1 Pengertian Kota**

Terdapat beberapa definisi kota bila dilihat dari karakteristiknya, yang mewakili disiplin ilmu. Dari segi geografi, kota didefinisikan sebagai Kota secara administratif adalah suatu kawasan yang merupakan suatu kesatuan dan biasanya karakternya didominasi oleh karakter kota, tetapi sering juga mencakup kawasan pedesaan didekat pinggirannya.

Dari segi morfologi, kota dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu dengan karakteristik tata guna lahan non agraris, tata guna lahan sebagian terbesar tertutup oleh bangunan non residensial maupun residensial, dalam satuan yang kompak dan relatif lebih besar dari pada satuan permukiman disekitarnya.

Dari segi jumlah penduduknya, kota adalah daerah tertentu dengan jumlah penduduk minimal yang tertentu dan penduduknya bertempat tinggal pada daerah pemukiman yang kompak.

Apabila dilihat dari kepadatan penduduknya, kota adalah daerah tertentu yang ditandai oleh kepadatan penduduk minimal tertentu, yang bertempat tinggal pada suatu pemukiman yang kompak. Kawasan perkotaan (*urban*) menurut definisi BPS didasarkan atas 4 indikator sebagai berikut : 1) mempunyai kepadatan penduduk lebih besar atau sama dengan 5000 jiwa/km<sup>2</sup>, 2) persentase rumah tangga pertaniannya lebih kecil atau sama dengan 25 %, 3) ada beberapa fasilitas umum lebih besar atau sama dengan 8 jenis diataranya SD, SLTP, SLTA, klinik, klinik bersalin, bank,

kantor pos, kendaraan umum bermotor, bioskop, hotel/asrama, dan penyewaan alat-alat pesta, serta 4) jarak desa yang dekat dengan fasilitas umum.

Menurut Branch (1985:51), kota secara fisik terdiri atas 3 tingkat bangunan-bangunan dan kegiatan yang berada diatas atau dekat dengan permukaan tanah, instalasi instalasi bawah tanah dan kegiatan dalam ruang kosong angkasa. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan di darat, bawah tanah dan udara.

Sebagaimana disampaikan oleh pakar perkotaan, Kusbiantoro (1993:4-5), sistem wilayah perkotaan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, lingkungan dan kelembagaan.

- Komponen utama meliputi sistem aktivitas / kegiatan atau *system demand* (penduduk dan segenap kegiatannya serta ruang, darat, laut dan udara, dan beragam penggunaannya) dan sarana pelayanan sosial dan ekonomi.
- Komponen lingkungan terdiri atas sistem lingkungan atau *system environment*, fisik - sosial - ekonomi - politik misalnya masalah produktivitas dan kemiskinan, dan lokal - regional - nasional - internasional, misalnya kota dengan wilayah sekitarnya dalam era *borderless country*.
- Komponen kelembagaan mencakup sistem kelembagaan/institusional atau sistem penunjang/pelengkap, aspek legal (kebijaksanaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan), keuangan atau sumber dana, dan organisasi (lembaga/pelaku terkait).

## 2.2 Aspek-aspek kota

Aspek-aspek kota terdiri dari aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi serta transportasi, (Widyaningsih, 2001:34-36).

### 2.2.1 Aspek Fisik

Aspek Fisik meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan penggunaan tanah, dan ruang yang merupakan sumber daya alam. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang terencana atau tidak. Dalam tata ruang terdapat penataan ruang yaitu proses penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan elemen-elemen pembentuk meliputi penggunaan dan rencana penggunaan lahan, kebutuhan dan keinginan individu, sarana dan prasarana transportasi, tipe dan fungsi bangunan, kegiatan individu atau kelompok yang rutin, kependudukan, potensi fisik serta persepsi dan perilaku.

Menurut Hans Blumenfeld dalam Nining (2000:7-3) menyebutkan bahwa terdapat empat komponen utama kota yaitu kompleks bisnis utama, industri manufaktur dan ikutannya, pemukiman dengan fasilitas pelayanannya serta tanah terbuka.

Secara fisik, kota dikembangkan pada system ruang (1) sistem pusat kota, yaitu lingkungan kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan utama atau kutub pertumbuhan, (2) sistem ruang kota yang dikembangkan untuk kegiatan produksi, yaitu untuk industri dan pertanian termasuk wilayah cadangan dan (3) sistem ruang kota yang dikembangkan sebagai wilayah pemukiman ideal.

### 2.2.2 Aspek Sosial

Aspek sosial menyangkut masalah kependudukan yang terkait dengan kota antara lain adalah masalah perkembangan, migrasi, aktifitas ekonomi, tenaga kerja dan beban ketergantungan. Dalam perencanaan penduduk dapat menjadi indikator perkembangan kota, yang salah satu aspeknya adalah pergerakannya.

Aspek-aspek yang menyangkut sumber daya manusia terdiri atas keadaan penduduk (jumlah, sebaran, struktur, agama, pendidikan, pendapatan),

proses penduduk (alamiah dan buatan) dan lingkungan sosialnya (pola kontrol, kegiatan dan konstruksi).

### 2.2.3 Aspek Ekonomi

Fungsi dasar kota menurut Branch (1995:71) adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 (tiga) bagian, (1) ekonomi pemerintah meliputi pelaksanaan pemerintahan kota, (2) ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, (3) ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nir laba. Ekonomi yang mendasari kota juga tercermin pada fasilitas dan bentuk fisiknya.

Menurut Koestoer (2001:6), dinamika ekonomi kota, dapat ditandai oleh penyebaran sektor-sektor ekonomi kota, penyebaran pasar, nilai tanah serta pergeseran penggunaan tanah. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini ditekankan pada pembangunan ekonomi. Dominasi kegiatan sektoral akan mempengaruhi secara fisik perkembangan fisik kota terutama menyangkut aspek tata guna tanah dan aksesibilitas dalam segi transportasi. Dominasi kegiatan tersebut merupakan penentu arah pengembangan fungsi kegiatan kota.

## 2.3 Perkembangan Kota

Perkembangan kota dapat diartikan perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. Dinamika perkembangan kota dapat ditinjau dari peningkatan aktifitas kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus mobilitas penduduk, yang pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang bagi pemukiman (Koestoer, 2001:4).

Perkembangan kota akan sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan aktifitas perekonomian yang ada di dalamnya serta perkembangan penggunaan lahan. Terjadinya perubahan pada aspek fisik dan non fisik dalam tata ruang perkotaan karena adanya dukungan dari faktor eksternal dan internal. Sebagai faktor eksternal adalah lokasi alam dan letak dari kota dengan sekitarnya, sedangkan faktor internal adalah kependudukan, pelayanan sosial ekonomi dan kemampuan mengelola pembangunan dalam menciptakan suatu iklim yang dapat merangsang pertumbuhan.

Richardson (1978) dalam Hendarto (1997:23) menyebutkan bahwa konsentrasi spasial yang diakibatkan adanya keuntungan ekonomi eksternal seperti keuntungan lokasional, keuntungan aglomerasi atau urbanisasi, juga merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota.

Perkembangan perkotaan merupakan gabungan bekerjanya faktor-faktor struktural pada tingkat internasional maupun nasional / regional serta faktor sosial demografi.

Disebutkan pula, Sadono Sukirno (1976) dalam Hendarto (1997:24) bahwa urbanisasi dan pembangunan ekonomi merupakan faktor penting yang menciptakan perkembangan kota. Untuk menentukan laju pembangunan suatu kota digunakan ukuran laju perkembangan penduduknya.

Menurut Branch (1985:46), terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu keadaan geografis, tapak (*site*), fungsi kota, sejarah dan kebudayaan kota, serta tahapan perkembangan kota. Keadaan geografis dan tapak kota mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota dikemudian hari. Fungsi kota akan menunjukkan keberadaannya, sedangkan sejarah dan kebudayaan kota akan mempengaruhi karakter dan sifat masyarakat kota. Tahapan perkembangan kota



berkaitan erat dengan tingkat ekonomi, sosial, kelembagaan dan penguasaan teknologi pada waktu tertentu didalam proses evolusinya.

Bila ditelusuri, bertumbuhnya kota dimulai dari sebuah pusat, yang dalam periode selanjutnya dipengaruhi oleh berfungsinya jalan raya, rute-rute transportasi. Pada akhirnya perkembangan atau pemekaran kota ditentukan oleh adaptasi manusia terhadap harga tanah berdasarkan tatagunanya.

Menurut Bintarto (1977), pemekaran kota pada umumnya digerakkan oleh pengaruh dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam berupa rencana pengembangan dari para perencana kota, desakan warga kota dari luar berupa berbagai daya tarik bagi daerah belakang kota. Apabila kedua pengaruh itu bekerja bersama-sama maka pemekaran kota akan terjadi lebih cepat. Djoko Sujarto (1972), menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu manusia, kegiatan manusia, pola pergerakan antara pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia lainnya. Faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan tempat kerja, status sosial dan perkembangan kemampuan dan teknologi. Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pola pergerakan adalah sebagai aktifitas dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan yang akan memacu pola perkembangan antara pusat-pusat kegiatan.

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus, 1978:2). Proses perubahan tersebut menyangkut perubahan secara alami maupun perubahan secara

artifisial dimana campur tangan manusia mengatur arah perubahan tersebut. Perkembangan perkotaan mempunyai titik berat dalam hal perubahan keadaan dari periode waktu yang lain. Tinjauan perkembangan perkotaan meliputi berbagai macam aspek kehidupan perkotaan seperti kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan secara spesifik ditandai dengan perubahan fungsi kota yang diikuti dengan perubahan fisik sebagai dampak dari perkembangan aktifitas masyarakat secara keseluruhan (aktifitas ekonomi masyarakat kota). Menurut Yunus (1981), untuk menyoroti perkembangan kota, dibandingkan keadaan sesuatu hal dari dua titik waktu (periode waktu). Kaitannya dengan faktor waktu, (1) semakin banyak titik waktu yang digunakan sebagai dasar pembanding adalah semakin baik, dan (2) bahwa makin lama jangka waktu yang digunakan akan semakin baik.

Francois Perroux (1955) dalam Estalita (2001:18) menyatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan (*development*) tidak terjadi disegala tempat pada ruang (*space*) tetapi terbatas pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda.

Indikator perkembangan suatu daerah atau wilayah yaitu :

1. Persebaran sumber daya alam, manusia dan kegiatan diatasnya, yang berkaitan dengan situasi relatif nilai keuntungan lokasional.
2. Jarak, yang berkaitan dengan harga ekonomi (ongkos produksi dan harga pasar).
3. Keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.
4. Pusat pertumbuhan ekonomi atau aglomerasi kegiatan sekunder dan tersier yang juga merupakan pengendali ekonomi wilayah.

Aspek perkembangan dan pengembangan wilayah tidak dapat lepas dari adanya ikatan-ikatan ruang perkembangan wilayah secara geografis. Menurut Yunus (1981) proses perkembangan dalam arti luas tercermin dalam proses perubahan tata guna lahan.

Chapin (dalam Soekonjono, 1998) mengemukakan ada 2 hal yang mempengaruhi tuntutan kebutuhan ruang yang selanjutnya menyebabkan perubahan penggunaan lahan yaitu (1) adanya perkembangan penduduk dan perekonomian, (2) pengaruh sistem aktifitas, sistem pengembangan dan sistem lingkungan.

Perkembangan kota menurut Raharjo ( dalam Widyaningsih, 2001:37 ) bermakna perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan dari kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas dan seterusnya. Variabel yang berpengaruh menurut Raharjo adalah :

1. Penduduk : keadaan penduduk, proses penduduk , lingkungan sosial penduduk
2. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi.
3. Fungsi kawasan perkotaan, merupakan fungsi dominan yang mampu menimbulkan perkembangan yang cepat, secara internal dan eksternal.
4. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan pusat kota
5. Kelengkapan sarana prasarana transportasi, untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk ke segala arah.
6. Faktor kesesuaian lahan
7. Faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi, yang mempercepat proses pusat kota mendapatkan perubahan yang lebih maju.

Menurut kecepatannya, perkembangan kota dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu wilayah dengan perkembangan :

- a. Cepat, berciri : arus migrasi masuk meningkat tiap tahun, dipengaruhi perkembangan kota besar sekitarnya, dan daya tarik fungsi wilayahnya.
- b. Sedang, berciri : alih fungsi lahan karena program pembangunan sesuai RUTRK , transformasi mata pencaharian cukup tinggi dengan pilihan lapangan kerja yang terbatas.
- c. Lambat, berciri ; transformasi lahan pertanian menjadi lahan terbangun sedikit, perubahan penggunaan lahan lambat

Menurut Soekotjo dalam Yunus (1978:53), faktor utama yang menarik perkembangan antara dua daerah pusat kegiatan tersebut adalah adanya jalur transportasi dan komunikasi yang baik antara kota yang satu dengan yang lain. Selain hal tersebut, prasarana kota juga merupakan pendukung utama kehidupan kota, meliputi fasilitas jalan, fasilitas listrik, fasilitas air bersih, fasilitas telpon serta fasilitas drainase, (Bintarto dalam Koestoer, 2001:44). Fasilitas jalan baik yang menghubungkan kota itu dengan kota lain atau daerah sekitarnya maupun jaringan jalan yang menghubungkan antar bagian kota, memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran aktifitas penduduk dan perkembangan kota, serta merupakan kerangka dasar yang membentuk struktur kota.

Studi perkembangan dan pengembangan perkotaan dapat menyangkut masalah-masalah yang bersifat fisik dan non fisik. Yunus (1981:1), menyebutkan bahwa terdapat 3 hal dalam mempelajari kehidupan suatu kota yaitu :

1. Faktor-faktor perubah sebagai kekuatan-kekuatan yang dinamis dalam proses perkembangan kota.
2. Akibat-akibat dari perubahan tersebut.

### 3. Usaha-usaha untuk mengelola perubahan tersebut.

Faktor dominan adalah manusia dan aspek kehidupan, menyangkut politik, ekonomi, sosial, kultural dan keadaan teknologinya. Dari waktu ke waktu kota selalu mengalami perubahan baik aspek fisik maupun non fisik, terkait dengan perubahan aspek kehidupan (Yunus, 1987). Perubahan tersebut terlihat pada perubahan mengenai jumlah penduduk maupun pola tata guna lahannya (Yunus, 1980:1).

Suatu kota akan mengalami proses pertumbuhan yang dapat berupa empat macam perubahan yaitu :

- a. Perubahan fisik (*lateral expansions*) yaitu pengisian dan perluasan areal kearah pinggiran kota yang umumnya terjadi disepanjang jalur jalan utama regional dan juga pembentukan wilayah-wilayah baru di kawasan pinggir kota.
- b. Perubahan struktur kota akibat pergeseran internal (*internal shift*), yaitu perubahan struktur kota akibat pergeseran penggunaan yang disebabkan adanya penyesuaian penggunaan terhadap kebutuhan pelayanan baru
- c. Pergerakan wilayah perumahan (*development of residensial areas*) yaitu perpindahan atau pergerakan wilayah perumahan karena motif-motif ekonomi dan kebutuhan sosial penduduk.
- d. Pergantian fungsi ekonomi (*economics of succession*) yaitu akibat adanya peningkatan nilai lahan.

Daldjoeni (1987), menyatakan bahwa pertumbuhan kota dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, keuntungan ekonomi eksternal dan lokasi pasar atau sumber daya.

## 2.4 Perluasan/Pemekaran kota

Yang dimaksud dengan perluasan kota dalam studi ini adalah perluasan wilayah administrasi kota, yaitu suatu penambahan luas wilayah yuridiksi kota. Kota yang dimaksud adalah kota yang berstatus hukum, yaitu kota yang statusnya ditetapkan oleh pemerintah. Perluasan kota/pemekaran merupakan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah perkembangan dan pertumbuhan kota. Pengertian perluasan atau lebih lanjut disebut pemekaran menurut Yunus, (1981) ada 2 pengertian yaitu (1) pemekaran sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh pemerintah untuk menentukan kembali (dalam artian memperluas) batas-batas kota yang baru pada jalur-jalur daerah baru) dan (2) pemekaran sebagai suatu proses perembetan kenampakan kota ke daerah pedesaan disekitarnya. Sehubungan dengan pemekaran dalam pengertian kedua, menurut Harvey dan Clark dalam Suharto (1999) ada 3 bentuk utama dari pemekaran kota (*urban sprawl*) yaitu : (1) pemekaran merata mengelilingi semua bagian luar kota (*continuous development sprawl*) (2) pemekaran memanjang mengikuti suatu garis tertentu (*ribbon development sprawl*) dan (3) pemekaran melompat yang terjadi berpencaran secara sporadis dan tumbuh ditengah-tengah lahan pertanian.

Menurut Sujarto dalam Yunus (1978:47-49) disebutkan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemekaran kota adalah (1) pertimbangan *sosio cultural*, (2) pertimbangan fisik dan (3) pertimbangan politis administratif.

Perluasan wilayah, harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, karena dengan masuknya wilayah yang bukan bersifat perkotaan ke dalam wilayah perkotaan akan terjadi proses perubahan tata nilai kehidupan masyarakat dalam proses penyesuaian dengan kondisi yang baru. Perubahan nilai-nilai sosial budaya tersebut

melibatkan masyarakat dalam hal perubahan tata kehidupan, sistem organisasi dalam masyarakat.

Pertimbangan fisik menyangkut batas-batas kota yang didasarkan pada analisa keadaan mengenai kependudukan, sosial, ekonomi dan politik yang ada dan prospeknya. Agar perluasan wilayah efektif dan efisien, perlu dipertimbangkan pula prasarana kehidupan perkotaan seperti penyediaan air minum, jaringan sanitasi, drainase, jaringan listrik dan jaringan jalan.

Pertimbangan administratif menyangkut masalah yang berhubungan dengan kemampuan daerah perkotaan untuk membiayai pembangunan daerah baru, sehingga perluasan wilayah tidak hanya didasari motif untuk menambah penghasilan daerah saja, tetapi juga mengenai pembangunan dan pengelolaannya, serta meningkatkan koordinasi antar departemen dan badan-badan / lembaga perkotaan.

Kebijaksanaan perluasan wilayah kota diharapkan berdampak positif untuk pusat kota maupun wilayah perluasannya, sehingga suatu kota dapat memenuhi fungsi internal dan eksternal kota. Fungsi internal mencakup pemenuhan tuntutan kebutuhan ruang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan fungsi eksternal mencakup peningkatan pembinaan kota agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan sesuai fungsi dan perannya.

Perluasan kota yang kurang memperhatikan aspek teknik obyektif, hanya cenderung mengakibatkan tambahan beban dan permasalahan bagi pemerintah daerah, terutama jika perluasan kota hanya mempertimbangkan aspek strategis dan politis saja. Perluasan kota akan berdampak positif jika perluasan daerah kota dengan pertimbangan berdasarkan perhitungan dan kriteria yang tepat, dalam suatu rangkaian kebijakan menyeluruh yang akan memberikan fungsi dan peranan kota sebagai pusat

pengembangan. Untuk hal itulah maka perluasan daerah kota perlu memperhatikan aspek-aspek tata ruang kota, yaitu (a) daerah perluasan hendaknya mempunyai orientasi kesatuan fisik, sosial, ekonomi sehingga secara geografis dapat menjamin usaha penataan struktur tata guna lahan untuk masa mendatang. Dengan kata lain bahwa daerah perluasan hendaknya sudah mempunyai gejala atau sifat kekotaan dan hendaknya berada dalam jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota (b) daerah perluasan hendaknya berada dalam wilayah pertanian non produktif sehingga pengaturan kedalam daerah administrasi kota dapat membantu meningkatkan taraf hidup penduduk (c) daerah perluasan hendaknya dapat menampung kecenderungan perkembangan aktifitas kota seperti perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya (d) dari segi administratif, usaha perluasan daerah kota perlu mempertimbangkan efisiensi dan aktifitas lingkup pengawasan.

Salah satu akibat perluasan kota adalah adanya perubahan tata guna lahan yang dialami oleh daerah tepi (Bintarto, 1983). Perluasan kota ke daerah tepi juga menumbuhkan kegiatan ekonomi modern atau kegiatan bidang industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Perubahan tata guna lahan kekotaan, khususnya penambahan areal kekotaan pada daerah pinggiran kota terdapat 2 elemen utama. Pertama, menyangkut pergerakan manusia ke daerah tersebut, kedua, menyangkut pindahnya fungsi-fungsi perkotaan seperti pendidikan, industri, perdagangan, jasa, rekreasi dan sebagainya (Rahmat Riyadi, dalam Hendro, 2001:97). Daljoeni (1987:74-175), menyebutkan bahwa dalam rangka perluasan kota, bermunculanlah kompleks perumahan penduduk mengikuti peraturan yang resmi. Disebutkan pula bahwa terdapat lima alasan tumbuhnya wilayah pinggiran kota, yaitu :



- a. Karena adanya peningkatan pelayanan transportasi kota, yang memungkinkan orang untuk bertempat tinggal jauh dari tempat kerjanya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang berasal dari perpindahan sebagian penduduk pusat kota ke pinggiran maupun masuknya penduduk baru dari pedesaan.
- c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.
- d. Gerakan pendirian bangunan pada masyarakat akibat rangsangan kredit pemilikan rumah oleh pemerintah.
- e. Dorongan dari hakekat manusia.

Secara spasial, suburbia terletak di *agricultural hinterland*, tetapi secara ekologis, merupakan kawasan yang menjadi sasaran invasi penduduk baru serta bangunan-bangunan baru. Penduduk non agraris bertambah pesat dengan jenis pekerjaan beragam. Perubahan sosial ekonomis dan demografis di *sub urbia* dapat mengubah ciri-ciri spasial dan demografisnya (Daldjoeni, 1998:208).

Perubahan tersebut akan membawa dampak terhadap tata kehidupan masyarakat yang ada, baik secara langsung, positif atau negatif. Budaya kota akan tetap muncul dikawasan *fringe*, dan penghuni asli masih meneruskan budaya desa, sehingga akan timbul kontak. Kontak tersebut terjadi adaptasi sehingga pada akhirnya tercapai integrasi. Masyarakat asli adalah masyarakat agraris yang mata pencahariannya terdesak karena pengurangan areal sawah/ladang, sehingga tenaga akan terserap ke sektor industri yang berkembang. Bertemunya hidup perkotaan dengan pedesaan, perlu disertai usaha untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial. Di wilayah *sub urbia* (perluasan wilayah) selain perumahan, perlu didirikan pusat pelayanan seperti sekolah.

Hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya perluasan wilayah. Perluasan lahan pertanian non produktif tidak masalah tetapi bagi

lahan pertanian produktif akan berpengaruh terhadap produksi pertanian apabila pada lahan tersebut terjadi perubahan fungsi.

Kebijakan perluasan wilayah kota akan memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Kota berupa 1) pembinaan fisik dan non fisik daerah perluasan, pengaturan tata guna lahan, membangun fasilitas kota, menggali dan mengelola sumber daya, 2) mencegah agar perluasan kota tidak menimbulkan terjadinya pembagian dan perubahan struktur pemilikan lahan, 3) perlunya suatu koordinasi antar pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembangunan dan perencanaan daerah yang lebih luas.

## **2.5 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota**

Secara harfiah kinerja berarti daya guna, prestasi, kemampuan atau hasil (Echols & Shadily, 1988:425). Secara terminologis, kinerja merupakan terjemahan dari performance. Kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu kinetika yang berarti kemampuan atau prestasi dan kerja. Oleh karena itu kinerja dapat diartikan dengan kemampuan kerja atau prestasi kerja (Webster Dictionary).

Berkaitan dengan pengertian tersebut maka kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dapat diartikan sebagai hasil atau prestasi dari pembangunan yang dilakukan pada wilayah perluasan Kota Salatiga serta kontribusinya terhadap perkembangan Kota Salatiga apabila dilihat dari tujuan perluasan wilayah sesuai Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 seperti telah disebutkan pada bab terdahulu. Penilaian kinerja perkembangan wilayah perluasan dapat menunjukkan keadaan atau posisi wilayah perluasan Kota Salatiga pada Tahun 2000.

## 2.6 Pembiayaan Pembangunan Kota

Pembiayaan pembangunan dalam studi ini adalah pembiayaan pembangunan dari sektor publik, yang terdiri dari komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Sektor publik menurut Abdullah dalam Halim (2002:143) adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Dalam pembiayaan pembangunan, sumber dana yang digunakan dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah serta dana yang berasal dari subsidi yang didrop dari tingkat pusat. Selama ini proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat rendah, sehingga terjadi ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat (Kuncoro, 2000:414). Ketergantungan fiskal tersebut disebabkan oleh 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, 3) sedikitnya pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, 4) alasan politis, yang menyatakan bahwa apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, serta 5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah adalah :

- Pendapatan asli Daerah Sendiri, terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
- Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, terdiri atas sumbangan dari Pemerintah, Sumbangan lain yang sesuai peraturan perundangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :

- Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendataan asli Daerah yang sah.
- Dana perimbangan
- Pinjaman daerah
- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Variabel Pendapatan Daerah meliputi :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah hasil pungutan pajak asli daerah maupun pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah. Ketentuan pokok dan pungutan pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 drt Tahun 1957 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai pembiayaan pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan / pekerjaan, jasa usaha atau milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pungutan retribusi daerah dipengaruhi jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan diperlukan masyarakat. Retribusi daerah terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan jasa. Ketentuan pokok pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

#### 3. Hasil Perusahaan Daerah

Hasil Perusahaan Daerah adalah bagian dari laba bersih dari Perusahaan Daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan

Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diatur dengan undang-undang.

#### 4. Lain-Lain usaha Daerah

Bagian sumber pendapatan asli daerah adalah hasil dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan.

#### 5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985, pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah :

- 10 % bagian penerimaan Pemerintah Pusat dan harus disetor ke kas
- 90 % dari hasil penerimaan merupakan bagian Pemerintah Daerah
- hasil penerimaan tersebut diatas setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10 % dibagi untuk Pemerintah Daerah.

Dari komposisi tersebut, hasil penerimaan PBB dibagikan secara bersih :

- pemerintah Pusat 10 %
- Biaya pemungutan 9 %
- Pemerintah Daerah Tingkat I 16,2 %
- Pemerintah Daerah Tingkat II 64,8 %.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

Variabel Pengeluaran / Belanja Pemerintah Daerah Kota :

Pengeluaran / Belanja terhadap wilayah perluasan Kota Salatiga dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Pengeluaran/belanja rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.
2. Pengeluaran/belanja pembangunan merupakan pengeluaran/belanja yang sifatnya sekali pada saat terjadi pembangunan dan yang sifatnya berulang yaitu dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan.

Untuk mengetahui kontribusi wilayah perluasan Kota Salatiga terhadap perkembangan Kota Salatiga, digunakan analisis pembiayaan pembangunan (Surplus/Defisit) dari pembiayaan sektor publik.

Langkah perhitungan dalam analisis pembiayaan pembangunan :

1. Memperkirakan nilai keuangan dari penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga bagi wilayah perluasan.
2. Membagi ke dalam *discount rate social* yang sesuai untuk digunakan dalam menentukan nilai sekarang (*present value*) dari penerimaan dan pengeluaran tersebut.
3. Mengurangkan nilai sekarang dari penerimaan dengan pengeluaran.

Besarnya nilai masing-masing penerimaan dan pengeluaran baik secara langsung dan tidak langsung diidentifikasi dengan cara kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Setelah besar nilai penerimaan dan pengeluaran diketahui, kemudian diperhitungkan menurut nilai sekarang (*Present Value*), dengan cara mengalikan besarnya

penerimaan dan pengeluaran tersebut dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku. Dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$P = F(1+i)^n,$$

(1)

dimana : P = nilai saat ini  
F = nilai lampau  
i = suku bunga  
n = jumlah tahun

## 2.7 Rangkuman kajian teori

Kota dilihat dari fungsinya, merupakan tempat dimana terjadi pemusatan kegiatan yang beraneka ragam dari suatu sistem kegiatan yang luas. Perluasan kota/pemekaran kota merupakan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah perkembangan dan pertumbuhan kota, yang mencakup pengertian pemekaran sebagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk menentukan kembali batas-batas kota atau pemekaran sebagai suatu proses perembetan kenampakan kota kearah pedesaan di sekitarnya. Tujuan perluasan kota adalah untuk mengatasi kebutuhan ruang kegiatan, mengatasi ketidakefisienan penggunaan lahan akibat perkembangan kota serta membina, menyeraskan dan menata kembali wilayah pinggiran kota.

Perluasan wilayah dapat mengakibatkan :

- a. Tumbuhnya kegiatan ekonomi modern yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja,
- b. Pindahnya fungsi-fungsi perkotaan seperti pendidikan, industri, perdagangan, jasa, rekreasi dan sebagainya,
- c. Perubahan tata guna lahan didaerah tepi,
- d. Perubahan tata kehidupan masyarakat.

Perluasan kota akan memberikan konsekuensi kepada pemerintah kota berupa :

- a. Pembinaan fisik dan non fisik daerah perluasan, pengaturan tata guna lahan, membangun fasilitas kota, menggali dan mengelola sumber daya,
- b. Mencegah agar perluasan kota tidak menimbulkan terjadinya pembagian dan perubahan struktur kepemilikan lahan,
- c. Koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan dan perencanaan daerah.

Kebijakan perluasan kota harus memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat, pertimbangan fisik serta pertimbangan politis administratif, sehingga tidak akan mengakibatkan tambahan beban dan permasalahan bagi pemerintah daerah.

Untuk mengetahui kinerja dari perkembangan wilayah perluasan, adalah dengan mengkaji perkembangannya sehingga dapat diketahui keberhasilan dari kebijakan perluasan wilayah. Perkembangan kota / wilayah perluasan adalah perubahan menyeluruh, yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. Perkembangan perkotaan mempunyai titik berat dalam hal perubahan keadaan dari periode waktu yang lain, yang tinjauannya meliputi berbagai aspek seperti kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Perkembangan kota dipengaruhi oleh :

- a. faktor internal meliputi penambahan penduduk, aktifitas perekonomian, perkembangan penggunaan lahan, pelayanan sosial, kelembagaan dan kemampuan mengelola pembangunan,
- b. faktor eksternal yang meliputi lokasi alam dan letak dari kota dengan sekitarnya.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

### **3.1 Gambaran Umum Kota Salatiga**

Kota Salatiga terletak di wilayah Jawa Tengah bagian tengah, tepatnya berada di dalam wilayah Kabupaten Semarang, berjarak  $\pm 54$  km kearah selatan dari Kota Semarang, Secara geografis berada pada  $110^{\circ}27' - 110^{\circ}32'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}17' - 7^{\circ}23'$  Lintang Selatan serta posisinya yang strategis karena berada pada jalur transportasi darat utama Jakarta – Semarang – Solo dan terletak diantara dua kota pusat pertumbuhan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang, dapat dijelaskan bahwa dilakukan penyesuaian batas wilayah dengan memperluas wilayah Kota Salatiga yang semula 3.890,86 ha dengan 9 kelurahan menjadi 5.678,11 ha dengan cara memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 13 (tiga belas) desa, sehingga memiliki 22 desa/kelurahan.

Secara geografis Kota Salatiga setelah perluasan memiliki potensi dan permasalahan yang spesifik dimana Kota Salatiga terletak pada jalur transportasi regional utama Jawa Tengah antara dua kota besar yang berkembang pesat, yaitu Semarang dan Surakarta. Dengan kedudukan tersebut, akan memberikan aspek hubungan dan fungsi secara regional terhadap kota Salatiga maupun daerah perluasannya. Potensi yang dimiliki yang merupakan peluang untuk dikembangkan adalah :

1. Kota Salatiga akan berperan sebagai *stop over* bagi para pelaku perjalanan antara Kota Semarang dengan Kota Surakarta, dengan demikian fungsi / peran tersebut dapat mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta industri kerajinan,

yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Kota Salatiga. Tetapi dilain pihak dari fungsi / peran tersebut menyebabkan pertumbuhan secara keseluruhan Kota Salatiga akan dipengaruhi oleh Kota Semarang maupun Kota Surakarta.

2. Kota Salatiga akan berperan sebagai simpul distribusi pariwisata bagi daerah dan wilayah sekitarnya yang potensial sebagai obyek pariwisata regional seperti Kopeng, Rawa Pening dan sebagainya.
3. Kota Salatiga berpeluang terhadap pengembangan potensi ekonomi wilayah dan daerah penyangga, yang berperan sebagai terminal hasil produksi pertanian. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sehingga antara Kota Salatiga dengan daerah penyangganya akan terjadi hubungan timbal balik yang serasi dan seimbang dalam menggerakkan perekonomian regional.
4. Kota Salatiga berpeluang terhadap pengembangan potensi kota pendidikan dan olah raga. Peluang pengembangan ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas pendidikan dari terendah sampai dengan pendidikan tinggi.

### 3.2 Kondisi Fisik dan Struktur Ruang Kota Salatiga

Fisik dasar merupakan wadah bagi pengembangan fisik kota. Kota Salatiga terletak pada ketinggian  $\pm 455 - 800$  meter diatas permukaan laut. Dilihat dari topografinya Kota Salatiga setelah perluasan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Daerah bergelombang  $\pm 65$  % dari luas wilayah yang meliputi Kelurahan Sidorejo Lor, Salatiga, Kutowinangun, Gendongan, Ledok, Dukuh, Desa Bugel, Kumpulrejo dan Desa Kauman Kidul.
2. Daerah miring,  $\pm 25$  % dari luas wilayah meliputi Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Desa Sidorejo Kidul, Tingkir lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah, Sidorejo Lor.

3. Daerah yang relatif datar,  $\pm 10\%$  dari luas wilayah meliputi Kelurahan Kalicacing, Desa Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Secara geologis Kota Salatiga sebagian besar terbentuk pada daerah yang berbatuan vulkanik dan sebagian kecil terletak pada daerah breksi vulkanik. Berdasarkan pembagian fisiografi Jawa, Kota Salatiga sebagian besar terletak pada zona tengah dan sebagian kecil pada zona utara. Bagian utara Kota Salatiga yang berupa perbukitan merupakan ujung barat dari Pegunungan Kendeng. Kondisi hidrologis suatu daerah ditentukan oleh struktur geologinya. Struktur geologi di Kota Salatiga merupakan pertemuan antara dua formasi, yaitu dari arah selatan diendapkan material dari vulkanik Gunung api Merbabu, sedangkan dibagian utara ditahan oleh deretan Pegunungan Kendeng yang berakhir di daerah Blotongan. Di daerah pertemuan kedua formasi ini terbentuk akuifer dangkal dan akuifer dalam yang berperan sebagai kantong-kantong air tanah, di daerah pertemuan dua formasi ini akan memberikan cukup air.

Arah perkembangan dan pertumbuhan Kota Salatiga cenderung berkembang secara linier memanfaatkan kegiatan pada jalur jalan regional / jalan utama dari arah Utara-selatan. Perkembangan fisik tersebut diakibatkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukungnya, antara lain dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang berkembang di pusat kota sepanjang jalur utama yang membelah Kota Salatiga, akibat adanya kecenderungan penduduk untuk ingin mendapatkan kesempatan terhadap fasilitas-fasilitas yang tersedia, disamping kecenderungan kemudahan pencapaian pada fasilitas tersebut, seperti prasarana jalan raya, fasilitas pelayanan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran, pemerintahan, rekreasi dan fasilitas lainnya yang terbangun di pusat kota dan cenderung terbangun dan berkembang di pinggiran pusat kota secara linier.

Pertumbuhan yang demikian akan menambah beban / kapasitas jalur jalan utama terhadap sarana transportasi yang ada. Dengan demikian sebenarnya yang dinamakan pusat kota Salatiga adalah kegiatan-kegiatan yang berada disepanjang jalan utama, yaitu Jalan Diponegoro dan Jalan Jendral Sudirman yang membelah Kota Salatiga. Hal ini menurut RUTRK Kota Salatiga dapat dilihat dari :

1. Asal mula tumbuhnya pemukiman Kota Salatiga juga terletak disepanjang jalan, misalnya bangunan-bangunan toko yang masih menunjukkan ciri arsitektur Cina, bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang sekarang dimanfaatkan untuk bangunan militer.
2. Kegiatan-kegiatan utama penduduk pusat kota semakin berkembang disepanjang jalan, misalnya perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas sosial dan lain-lain.
3. Pada jalan ini pula paling nampak sifat kekotaannya dibanding dengan bagian wilayah kota lainnya di Kota Salatiga.
4. Dibelakang kegiatan yang berkembang disepanjang jalan berkembang kampung-kampung yang padat.

Hal tersebut umum terjadi pada kota yang berkembang secara alamiah. Agak kedalam dari jalan berkembang pemukiman semi perkotaan dan perumahan baru yang bersifat kekotaan yang sekarang berkembang. Struktur ruang kota yang terbentuk dari perkembangan dan pertumbuhan Kota Salatiga adalah mendekati Multiple Nuclei yang menyebar dari satu inti.

### **3.3 Peran dan Fungsi Kota Salatiga**

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 dijelaskan bahwa fungsi-fungsi utama yang berkembang di Kota Salatiga adalah :

- a. Transit Wisata, hal ini diuntungkan dengan kedudukan Kota Salatiga yang berada pada jalur utama lintasan Semarang- Surakarta yang mengarah pada fungsi *stop over* dimana terjadi penyebaran arus wisatawan daerah wisata yang terletak diluar wilayah Kota

Salatiga. Lokasi Kota Salatiga yang terletak dilereng Gunung Merbabu memberikan udara yang nyaman untuk beristirahat.

- b. Fungsi Pusat Pendidikan dan Olah Raga, fungsi ini ditunjang oleh kondisi alam yang memiliki iklim sejuk. Sebagai kota pendidikan, Kota Salatiga terkenal karena keberadaan Universitas Kristen Satya Wacana .
- c. Pusat kegiatan perdagangan dan transportasi skala lokal (kota) dan wilayah belakangnya. Kegiatan perdagangan cukup menonjol akibat dukungan transportasi yang memadai serta banyaknya fasilitas perekonomian yang menunjang perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti fasilitas perbankan, perdagangan grosir maupun sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

### **3.4 Kebijakan Penataan Ruang Kota Salatiga**

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi bagian-bagian wilayah kota sesuai dengan tingkat/skala pelayanannya, dari bagian yang berskala besar sampai berskala kecil. Pembagian bagian wilayah kota tersebut merupakan usaha untuk meratakan kegiatan diseluruh wilayah kota dengan penyebaran fasilitas pelayanannya. Pembagian Wilayah Kota ini terdiri dari 5 (lima) BWK, yaitu (GAMBAR III.1) :

#### **1. Bagian Wilayah Kota I**

BWK I memiliki luas wilayah 261,91 ha yang meliputi wilayah kelurahan Sidorejo lor, Salatiga, Mangunsari, Kalicacing, Tegalrejo, Gendongan dan Kutowinangun. Adapun arah pengembangannya adalah sebagai fungsi pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial.

## 2. Bagian Wilayah Kota II

BWK II mencakup 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Salatiga serta 4 desa, yaitu Desa Blotongan, Bugel, Kauman Kidul dan Pulutan. Wilayah yang termasuk kedalam BWK II adalah seluas 1.547,75 ha dengan fungsi pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan pendidikan. Pertanian/agroindustri, perumahan/permukiman.

## 3. Bagian Wilayah Kota III

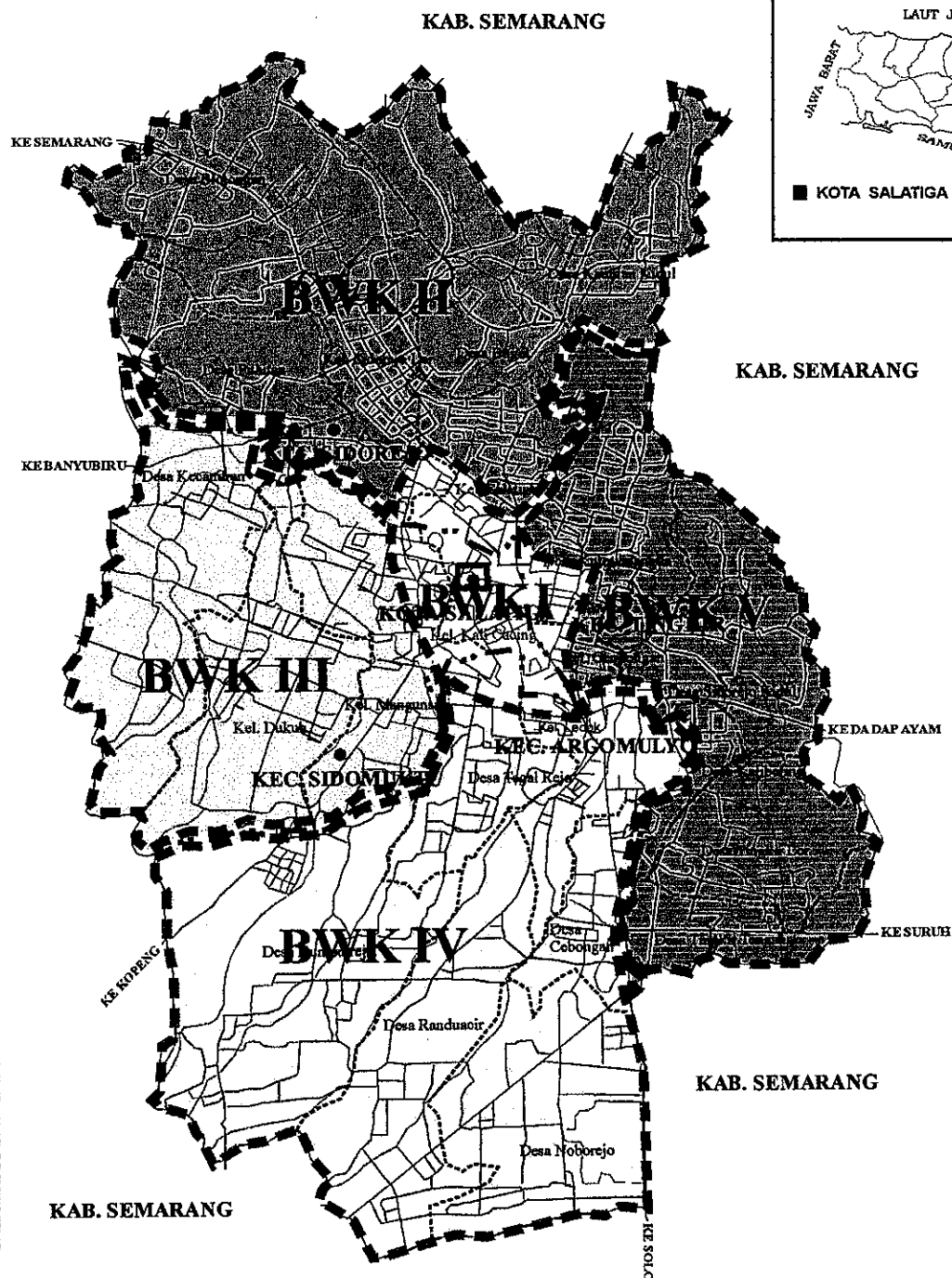
Yang termasuk dalam BWK III adalah Kelurahan Mangunsari, Dukuh, Kalicacing dan Desa Kecandran dengan luas wilayah 1.043,04 ha, dengan fungsi-fungsi pusat pemerintahan kecamatan, perumahan / permukiman (sedang-rendah), perkantoran dan pariwisata.

## 4. Bagian Wilayah Kota IV

Luas wilayah BWK IV adalah 1.837,19 ha yang meliputi wilayah Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Desa Cebongan, Desa Noborejo, Desa Kumpulrejo dan Desa Randuacir. Arah fungsi utama BWK IV adalah pusat pemerintahan kecamatan, perumahan/pemukiman, industri, dan perdagangan

## 5. Bagian Wilayah Kota V

BWK V mencakup wilayah Kelurahan kutowinangun, kelurahan Gendongan, desa Sidorejo Kidul, Desa kalibening, Desa Tingkir lor, dan desa Tingkir Tengah dengan luas wilayah 988,57 ha. Arah fungsi utama BWK V adalah pusat pemerintahan kecamatan, perumahan/pemukiman, pertanian, fasilitas transportasi, agroindustri.

**ORIENTASI LOKASI****LEGENDA :**

- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- SUNGAI
- BATAS BWK

UTARA



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

**STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA**

PETA

**PEMBAGIAN BWK  
(BAGIAN WILAYAH KOTA) SALATIGA**

NO. GAMBAR

SKALA

3.1

1 : 90.000

SUMBER

**BAPPEDA  
KOTA SALATIGA**

### 3.5 Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan disuatu daerah merupakan perwujudan interaksi antara manusia dengan tingkat teknologi yang dimiliki, jenis usaha, kondisi fisik dan jumlah penduduk yang ada didalam wilayah tersebut. Atas dasar itu, maka penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. penggunaan lahan diperkotaan (*urban*) yang pada umumnya merupakan tanah yang sudah terbangun (*built up area*)
- b. penggunaan lahan di perdesaan (*non urban*) yang pada umumnya masih bercirikan pola penggunaan tanah pertanian (*non built up area*).

Berdasarkan penggunaan lahan tersebut di wilayah Kota Salatiga pola penggunaan lahannya pada tahun 2000 adalah sebagai berikut (TABEL III.1):

**TABEL III.1**  
**POLA PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA SALATIGA TAHUN 2000**

No	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase(%)
I	Daerah terbangun		
	1. Perumahan	2.277,74	40,11
	2. Jasa	181,87	3,22
	3. Perusahaan/perdagangan	33,14	0,58
	4. Perindustrian	54,22	0,95
II	Non Urban		
	1. Sawah	886,56	15,61
	2. Tegalan	1.275,20	22,46
	3. Kebun campur	719,61	12,68
	4. Perkebunan	181,92	3,20
III	Lain-lain	67,85	1,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.678,11</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2000

Untuk lebih jelasnya pola penggunaan lahan di Kota Salatiga Tahun 2000 dapat dilihat pada gambar (GAMBAR III.2) berikut :

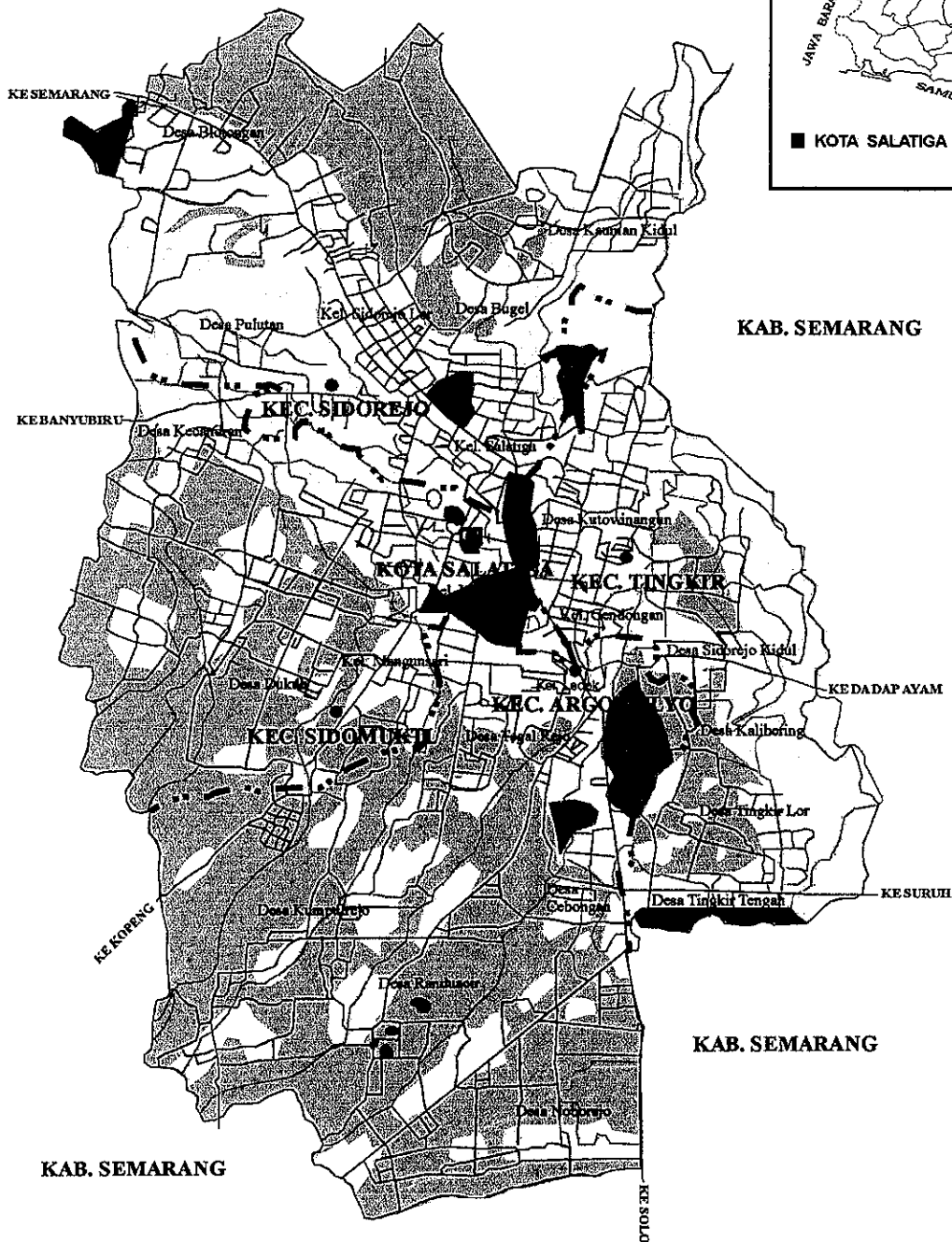


KAB. SEMARANG

## ORIENTASI LOKASI



KAB. SEMARANG



KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA

PETA

PENGUNAAN LAHAN  
KOTA SALATIGA TAHUN 2000

## LEGENDA :

- BATAS KOTA/KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- SUNGAI
- PERMUKIMAN
- INDUSTRI
- PERDAGANGAN DAN JASA
- PERTANIAN TANAH BASAH
- PERTANIAN TANAH KERING
- KONSERVASI

UTARA



NO. GAMBAR

SKALA

3.2

1 : 90.000

SUMBER

BAPPEDA  
KOTA SALATIGA

### 3.6 Pola Transportasi

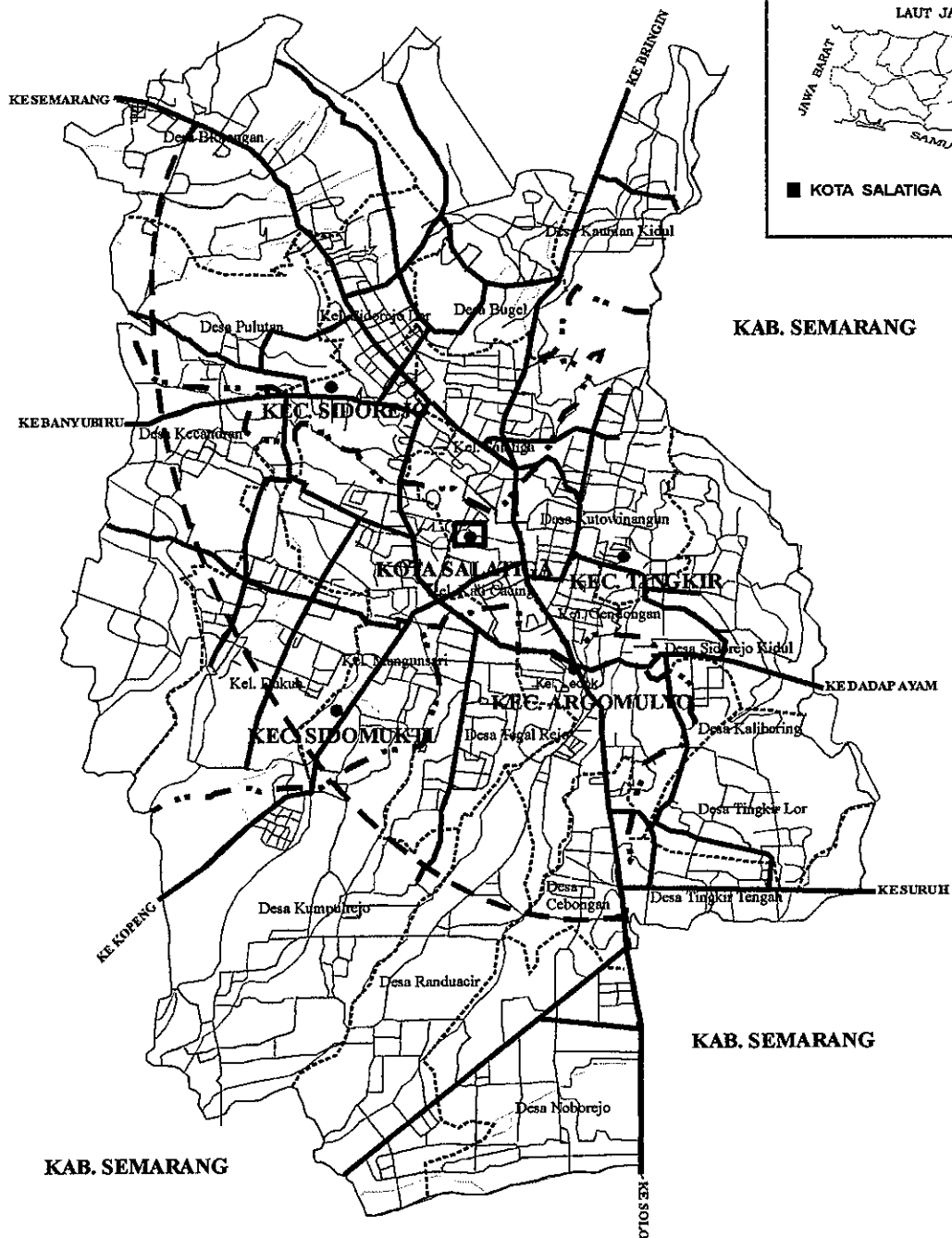
Transportasi termasuk dalam sektor perhubungan, sektor ini mempunyai peran yang sangat penting karena dapat mendukung berkembangnya sektor-sektor lain. Sektor perhubungan mendukung jasa-jasa lainnya melayani angkutan orang, barang dan informasi serta sebagai perangsang pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor potensial dan daerah-daerah. Dalam konstelasi regional Jawa Tengah Kota Salatiga termasuk kedalam jalur jaringan arteri sekunder, yaitu jaringan arteri Utara – Selatan : Semarang – Bawen – Salatiga – Surakarta. Pada jalur ini, ruas jalan Semarang – Bawen mempunyai kepadatan yang tinggi. Pola transportasi yang ada di Kota Salatiga pada umumnya masih terpusat menuju ke pusat kota, hal ini dikarenakan pusat Kota Salatiga dibelah oleh jalur utama Semarang – Surakarta.

Prasarana jalan bagi Kota Salatiga sangat penting peranannya, mengingat Kota Salatiga merupakan jalur utama transportasi antara Jakarta – Surabaya dan terletak diantara dua kota pusat pengembangan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Prasarana jalan yang memadai merupakan faktor yang menentukan untuk kelancaran mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Jalan di Kota Salatiga menurut pembinaannya dibagi menjadi jalan propinsi dan jalan kota.

Untuk memberikan pelayanan pergerakan yang tepat dan sesuai dengan sifat-sifat pergerakan, maka pola jaringan jalan dibentuk dalam spasi yang sesuai dengan fungsi dan jangkauan optimal pelayanannya. Sarana transportasi di Kota Salatiga adalah berupa angkutan kota, becak, andong. Jumlah trayek angkutan kota yang ada sebanyak 16 trayek dengan 335 unit angkutan kota dengan titik simpul trayek di Terminal Tamansari untuk trayek dalam kota. Sedang untuk bis antar kota dan sebagian angkutan kota dilayani oleh terminal Tingkir.

Jaringan jalan di Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar berikut (GAMBAR III.3):

## KAB. SEMARANG



## ORIENTASI LOKASI



■ KOTA SALATIGA

KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA

PETA

JARINGAN JALAN  
KOTA SALATIGA

## LEGENDA :

- BATAS KOTA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- SUNGAI
- ARTERI PRIMER
- KOLEKTOR PRIMER
- KOLEKTOR SEKUNDER
- RENCANA JALAN LINGKAR

UTARA



NO. GAMBAR

SKALA

3.3

1 : 90.000

SUMBER

BAPPEDA  
KOTA SALATIGA

### 3.7 Kependudukan

Kota merupakan wadah bagi penduduk dalam melakukan segala kegiatannya. Penduduk kota Salatiga memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi khususnya pada daerah pusat kota. Jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2000 sebanyak 144.796 jiwa. Data kependudukan per kecamatan dapat dilihat pada tabel (TABEL III.2) berikut :

**TABEL III.2**  
**JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 2000**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Julah penduduk (jiwa)	Kepadatan (Jiwa /km <sup>2</sup> )
1	Sidorejo	16,247	46.150	2.841
2	Tingkir	10,549	35.484	3.364
3	Argomulyo	18,526	29.754	1.606
4	Sidomukti	11,459	33.408	2.915
	JUMLAH	56,781	144.796	2.550

*Sumber : Salatiga Dalam Angka Tahun 2000*

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Salatiga pada Tahun 2000 dikelompokkan ke dalam 10 kelompok mata pencaharian, terdiri dari mata pencaharian petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS/ABRI, pensiunan dan lain-lain. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 7,73 %, dan penduduk yang bekerja di sektor non pertanian sebesar 92,27 % dari seluruh jumlah penduduk. Adapun struktur penduduk Kota Salatiga tahun 2000 berdasarkan mata pencaharian secara lengkap per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut (TABEL III.3) :

**TABEL III.3**  
**STRUKTUR PENDUDUK KOTA SALATIGA MENURUT MATA PENCAHARIAN,**  
**TAHUN 2000**

Jenis mata pencaharian	Jumlah penduduk (jiwa)				Jumlah (jiwa)
	Kec. Sidorejo	Kec. Tingkir	Kec. Argomulyo	Kec. Sidomukti	
Petani sendiri	1.151	617	1.438	714	3.920
Buruh tani	1.778	782	2.142	1.028	5.730
Pengusaha	466	319	797	1.168	2.750
Buruh industri	4.686	3.644	3.331	2.995	14.656
Buruh bangunan	4.579	2.658	1.208	3.662	12.107
Pedagang	4.071	2.517	1.720	2.946	11.254
Pengangkutan	2.852	1.535	740	1.581	6.708
PNS/ABRI	2.983	2.839	953	1.169	7.944
Pensiunan	1.838	1.380	697	1.302	5.217
Lain-lain	15.714	14.256	12.537	12.144	54.651
<b>JUMLAH</b>	<b>40.128</b>	<b>30.457</b>	<b>25.563</b>	<b>28.709</b>	<b>124.857</b>

*Sumber : Salatiga Dalam Angka Tahun 2000*

Berdasarkan tingkat pendidikan, struktur penduduk Kota Salatiga pada tahun 2000 adalah sebagai berikut (Tabel III.4) :

**TABEL III.4**  
**STRUKTUR PENDUDUK KOTA SALATIGA**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2000**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tamat SD	34.619
2	Tamat SLTP	23.231
3	Tamat SMU/SMK	17.937
4	Tamat Akademi/PT	4.366

*Sumber : Salatiga dalam Angka Tahun 2000*

### **3.8 Perekonomian Kota**

Selain dipengaruhi oleh jumlah dan pertumbuhan penduduknya, perkembangan kota juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian kota yang bersangkutan terutama yang menyangkut ekonomi basisnya.

#### **3.8.1 Pengaruh Potensi Fisik Dasar**

Ditinjau dari keadaan faktor fisik dasar (sumber daya alam) seperti iklim yang sejuk, sumber air, permukaan tanah dari datar sampai bergelombang, maka keadaan

ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang peran Kota Salatiga sebagai tempat peristirahatan, permukiman, perdagangan, pendidikan dan olah raga serta tempat rekreasi.

Sehingga dengan demikian Kota Salatiga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi tersebut dengan penyediaan fasilitas-fasilitas penginapam / perhotelan, pendidikan dan olah raga, industri termasuk wisata (restoran, cinderamata, tempat wisata buatan. Kedudukan dan letak Kota Salatiga pada jalur ekonomi Jakarta – Semarang – Surakarta, merupakan keuntungan lain bagi pengembangan perekonomian Kota Salatiga.

### 3.8.2 Pengaruh Potensi kegiatan Ekonomi

Secara statistik perkembangan perekonomian suatu daerah diindikasikan oleh besarnya laju pertumbuhan PDRB yang dialami oleh daerah tersebut. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut atau lebih dikenal dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga atas harga konstan 1993 pada tahun 2000 sebesar 3,57%, dengan pertumbuhan tertinggi sektor bangunan sebesar 18,01 %, sedangkan pertumbuhan terendah adalah sektor industri yaitu 0,23 %. Untuk Tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mencapai 3,57 %.

Kontribusi persektoral tertinggi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 adalah sektor jasa-jasa sebesar 27,51 % dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 0,70 %. Sedangkan atas dasar harga konstan 1993, sumbangan tertinggi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor jasa-jasa sebesar 27,72 % dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalan

sebesar 0,66 %. Berdasarkan atas dasar harga berlaku tahun 2000 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 63,97 %, sektor sekunder sebesar 29,9 % dan sektor primer sebesar 6,13 %. Sedangkan atas dasar harga konstan 1993, sektor tersier memberikan kontribusi 65,35 %, sektor sekunder sebesar 28,31 % dan sektor primer sebesar 6,34 %.

Sektor primer yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit yang ada didalamnya, sektor sekunder yaitu yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan / konstruksi, Sektor tersier atau lebih dikenal dengan sektor jasa-jasa yaitu sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, misalnya sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah dan jasa-jasa.

Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dikurangi penyusutan, pajak tak langsung dan arus pendapatan dari luar netto. Data penyusutan, pajak tak langsung dan arus pendapatan pada saat ini belum dapat diperhitungkan sehingga diasumsikan bahwa pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah kemampuan suatu wilayah / daerah dalam menghasilkan pendapatan pada tahun bersangkutan yang belum tentu pendapatan tersebut seluruhnya diterima oleh penduduk di wilayah itu. Secara agregat PDRB perkapita Kota Salatiga atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 adalah Rp. 3.969.864,00 sedangkan pendapatan regional perkapitanya sebesar Rp. 3.628.168,00. Sedangkan menurut harga konstan PDRB perkapita Kota Salatiga tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.756.791,00 Dan pendapatan regional perkapitanya adalah Rp. 1.604.270,00.

### 3.9 Fasilitas Perkotaan di Kota Salatiga

Fasilitas perkotaan yang tersedia di wilayah Kota Salatiga meliputi :

- a. Fasilitas Pendidikan
- b. Fasilitas Kesehatan
- c. Fasilitas Peribadatan
- d. Fasilitas Perekonomian
- e. Fasilitas Pemerintahan/Perkantoran

Ketersediaan fasilitas perkotaan pada tahun 2000 disajikan pada tabel berikut  
(TABEL III.5):

**TABEL III.5**  
**KETERSEDIAAN FASILITAS PERKOTAAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 2000**

FASILITAS	JENIS	JUMLAH
Pendidikan	TK	62
	SD	108
	SLTP	22
	SLTA	25
	Akademi/PT	4
Kesehatan	Rumah Sakit	3
	Rumah Bersalin	3
	Poliklinik/Balai Pengobatan	9
	Puskesmas	6
	Puskesmas Pembantu	15
	Praktek Dokter	74
Peribadatan	Mesjid	164
	Gereja	51
	Pura/Vihara	4
Perekonomian	Kios	459
	Rumah Toko	9
	Pasar	12
	Bank	12
Perkantoran	Kantor Lurah/Desa	22
	Kantor Camat	4
	Pos kebakaran	1
	Kantor Polisi Sektor	2
	Kantor Pos Cabang	1
	Kantor PLN	2
	Kantor PDAM	1
	Kantor Telpon	1
	Kantor Balai Kota	1
	Gedung Serba Guna	21

Sumber : Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2000.



### 3.10 Wilayah Perluasan Kota Salatiga

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang, wilayah Kota Salatiga yang semula 1.787, 25 ha dengan 9 kelurahan menjadi 5.678,11 ha dengan cara memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 13 (tiga belas) desa, sehingga memiliki 22 desa/kelurahan dengan 4 (empat) kecamatan .

Secara rinci data kelurahan/desa di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel (TABEL III.6) berikut :

**TABEL III.6**  
**PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SALATIGA**

NO	KECAMATAN /KEL/DESA	LUAS (HA)	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>Kecamatan Sidorejo</b>		
1	Blotongan	423,80	<i>Daerah perluasan</i>
2	Sidorejo lor	271,60	
3	Salatiga	202,00	
4	Bugel	294,37	<i>Daerah perluasan</i>
5	Kauman Kidul	195,85	<i>Daerah perluasan</i>
6	Pulutan	237,10	<i>Daerah perluasan</i>
<b>II</b>	<b>Kecamatan Tingkir</b>		
1	Kutowinangun	293,75	
2	Gendongan	68,90	
3	Kalibening	99,60	<i>Daerah perluasan</i>
4	Sidorejo Kidul	277,50	<i>Daerah perluasan</i>
5	Tingkir lor	177,30	<i>Daerah perluasan</i>
6	Tingkir Tengah	137,80	<i>Daerah perluasan</i>
<b>III</b>	<b>Kecamatan Argomulyo</b>		
1	Noborejo	332,20	<i>Daerah perluasan</i>
2	Ledok	187,33	
3	Tegalrejo	188,43	
4	Kumpulrejo	629,03	<i>Daerah perluasan</i>
5	Randuacir	377,60	<i>Daerah perluasan</i>
6	Cebongan	138,90	<i>Daerah perluasan</i>
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Sidomukti</b>		
1	Kecandran	399,20	<i>Daerah perluasan</i>
2	Dukuh	377,15	
3	Mangunsari	290,77	
4	Kalicacing	78,73	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.678,11</b>	

Sumber : Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2000

Wilayah administrasi Kota Salatiga berdasarkan PP No. 69 Tahun 1992 dapat dilihat pada gambar (GAMBAR 3.4) berikut :



### 3.11 Karakteristik Wilayah Perluasan Kota Salatiga

#### 3.11.1 Jumlah Penduduk di Wilayah Perluasan

Jumlah penduduk di wilayah perluasan pada tahun 1992 berjumlah 39.536 jiwa dan meningkat menjadi 44.733 jiwa pada tahun 2000. Selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 13,14 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut (TABEL III.7) :

**TABEL III.7**  
**JUMLAH PENDUDUK WILAYAH PERLUASAN**  
**KOTA SALATIGA TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

No	Desa	1992	2000	Kenaikan (%)
1	Blotongan	5.088	7.142	40,37
2	Bugel	2.154	2.125	-1,35
3	Kauman Kidul	2.064	2.398	16,18
4	Pulutan	2.532	3.093	22,16
5	Kalibening	1.172	1.438	22,70
6	Sidorejo Kidul	3.146	3.629	15,35
7	Tingkir lor	2.841	2.962	4,26
8	Tingkir Tengah	2.463	2.802	13,76
9	Noborejo	3.309	3.518	6,32
10	Kumpulrejo	5.182	5.236	1,04
11	Randuacir	3.515	3.688	4,92
12	Cebongan	2.837	3.076	8,42
13	Kecandran	3.233	3.626	12,16
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.536</b>	<b>44.733</b>	<b>13,14</b>

Sumber : 1. Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 1992  
2. Salatiga Dalam Angka Tahun 2000

Apabila dilihat dari tingkat kepadatannya maka angka kepadatan tertinggi pada tahun 1992 terdapat pada desa Tingkir lor dan pada Tahun 2000 terdapat pada desa Kumpulrejo. Secara rinci angka kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel (TABEL III.8) berikut:

**TABEL III.8**  
**KEPADATAN PENDUDUK PER KM<sup>2</sup> DI WILAYAH PERLUASAN KOTA**  
**SALATIGA TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	1992	2000	Kenaikan (%)
1	Blotongan	3,55	1.433	1.685	17,59
2	Bugel	2,99	720	722	0,28
3	Kauman Kidul	1,91	1.081	1.225	13,32
4	Pulutan	1,98	1.279	1.305	2,03
5	Kalibening	0,91	1.288	1.444	12,11
6	Sidorejo Kidul	3,98	790	1.308	65,57
7	Tingkir lor	1,05	2.706	1.671	-38,25
8	Tingkir Tengah	1,35	1.824	2.033	11,46
9	Noborejo	3,34	991	1.059	6,86
10	Kumpulrejo	5,64	919	2.796	204,24
11	Randuacir	4,06	866	977	12,82
12	Cebongan	1,1	2.579	2.227	-13,65
13	Kecandran	3,23	1.001	908	-9,29

Sumber : 1. *Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994*  
 2. *Salatiga Dalam Angka Tahun 2000.*

### 3.11.2 Struktur Penduduk menurut mata pencaharian di wilayah perluasan

Struktur penduduk menurut mata pencaharian dibagi kedalam jenis mata pencaharian petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, angkutan, PNS/ABRI, Pensiunan dan Lain-lain.

Struktur penduduk menurut mata pencahariannya pada tahun 1992 dan pada tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut (TABEL III.9) :

**TABEL III.9**  
**STRUKTUR PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	PETANI		BURUH TANI		PENGUSAHA		BURUH INDS		BRH BANG		PEDAGANG		ANGKUTAN		PNS/ABRI		PENSUN		LAIN-LAIN		JUMLAH	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blotongan	195	407	392	703	0	22	97	709	56	360	0	413	5	247	149	616	94	335	0	2395	988	6211
2	Bugel	116	113	93	138	0	1	96	102	98	124	113	105	8	23	33	22	10	39	633	1181	1200	1848
3	Kauman Kidul	234	171	154	157	0	13	126	213	40	67	33	74	10	22	83	120	31	40	839	1208	1550	2085
4	Pukitan	131	193	104	275	19	7	59	94	143	161	39	39	0	15	105	73	33	34	1653	1798	2286	2689
5	Kalbening	70	72	80	90	0	14	27	87	7	41	6	61	4	11	23	23	4	7	25	828	246	1234
6	Sidorejo Kidul	198	114	138	128	4	4	239	343	235	467	87	321	3	31	90	102	23	29	11	1576	1029	3115
7	Tingkir lor	224	231	197	208	46	60	345	432	30	86	291	330	75	54	132	123	23	26	979	992	2342	2542
8	Tingkir Tengah	135	135	196	202	136	45	59	235	26	54	30	184	29	75	61	74	18	30	0	1371	690	2405
9	Noborejo	651	165	71	90	8	9	54	88	54	57	260	331	62	10	21	33	7	13	0	2226	1188	3022
10	Kumpulrejo	815	519	816	520	0	174	199	225	97	108	26	453	12	17	84	85	19	36	816	2361	2884	4498
11	Ranductir	223	586	1274	652	0	144	17	176	142	151	15	108	16	82	53	98	35	67	96	1105	1871	3169
12	Cebongan	20	20	402	459	10	15	59	582	62	52	10	101	56	72	78	86	66	78	0	1177	763	2643
13	Kecandran	142	139	574	574	49	50	430	605	269	597	185	158	144	154	44	46	16	22	62	771	1916	3115
JUMLAH		3154	2865	4492	4196	272	558	1807	3891	1259	2325	1096	2678	424	813	956	1501	379	757	5114	18989	18953	38576

Sumber : 1. Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994.  
2. Salafat Pekar, angka Tahun 2000.

### 3.11.3 Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Perluasan

Pola guna lahan erat kaitannya dengan aktifitas penduduk. Untuk wilayah perluasan, kawasan terbangun pada tahun 1992 seluas 1.131,23 ha meningkat menjadi 1.279,97 ha pada tahun 2000, kawasan non urban pada tahun 1992 seluas 2.566,78 ha menjadi 2.393,03 ha pada tahun 2000, dan untuk penggunaan lain-lain pada tahun 1992 seluas 241,36 ha menjadi 41,96 ha pada tahun 2000.

Secara rinci, pola guna lahan di wilayah perluasan pada tahun 1992 dan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut (TABEL III.10) :

**TABEL III.10**  
**POLA GUNA LAHAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	PERUBAHAN		JASA-JASA		PERUSAHAAN		INDUSTRI		SAWAH		TEGALAN		KEBUN CAMPUR		PERKEBUNAN		LAIN-LAIN		JUMLAH	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blotongan	129,81	159,93	3,20	2,13	0	0,40	0	0	91,70	82,46	122,64	157,79	16,41	15,79	0	0	60,04	5,30	423,80	423,80
2	Bugel	51,69	63,75	4,19	2,24	0	0	0	0	50,42	48,35	114,96	0,35	64,52	47,98	0	129,57	8,40	2,13	294,37	294,37
3	Kauman Kidul	37,71	56,96	1,93	0,87	0	0	0	0	60,20	128,76	49,10	3,22	17,29	9,46	0	14,63	1,37	1,20	176,60	215,10
4	Pukutan	34,53	48,27	1,61	1,49	0	0	0	0	61,09	164,55	112,30	2,45	18,95	18,82	0	0	10,62	3,51	237,10	237,10
5	Kalibering	66,65	100,78	6,01	1,16	0	0	0	0	60,60	84,14	69,21	122,26	35,02	1,51	0	0	5,88	1,78	243,37	311,63
6	Sidorejo Kidul	9,15	16,89	1,54	2,71	0	0	4,22	0	3,20	58,97	27,70	9,05	14,36	6,56	0	0	43,65	1,21	99,60	99,60
7	Tingkir lor	64,05	65,74	3,44	1,12	0	0	2,02	0	46,78	59,40	47,26	43,26	5,20	5,45	0	0	8,88	1,98	175,61	178,99
8	Tingkir Tengah	58,09	69,74	1,38	1,64	0	0	0	0	2,42	51,78	32,34	7,34	12,81	6,74	0	0	30,76	0,56	137,80	137,80
9	Noborejo	75,81	99,53	5,29	2,74	0	0	1,27	0	59,27	1,37	114,10	154,36	45,51	64,50	0	0	32,22	8,43	332,20	332,20
10	Kumpulrejo	147,56	178,85	5,14	3,50	0	0	0	0	91,93	0,00	192,50	202,35	189,90	212,98	0	28,79	2,00	2,56	629,03	629,03
11	Randuar	96,34	172,14	7,82	2,43	0	0	0	0	39,26	0,00	104,90	103,18	125,30	93,30	0	0	3,98	6,55	377,60	377,60
12	Cebongan	73,62	102,05	4,55	1,84	0	0	9,1	14,65	4,20	11,99	29,80	2,02	10,13	2,05	0	0	6,70	3,50	138,10	138,10
13	Kecandran	84,13	150,99	1,45	1,34	0	0	0	1,56	44,50	36,54	214,45	161,27	51,85	43,08	0	0	2,82	4,32	399,20	399,20
JUMLAH		929,33	1.285,61	47,55	25,21	0,00	0,40	9,10	23,82	624,57	728,32	1.231,26	968,92	605,25	526,22	0,00	172,99	217,32	43,03	3664,38	3774,52

Sumber : 1. Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994.  
2. Salatiga Dalam Angka Tahun 2000.

### 3.11.4 Sarana Pendidikan di Wilayah Perluasan

Jumlah sarana pendidikan di wilayah perluasan mengalami pengurangan sejak tahun 1992 sampai dengan 2000. Jumlah TK mengalami penurunan 5 buah, jumlah SD mengalami penurunan sebanyak 8 buah, SLTP mengalami penurunan sebanyak 4 buah dan SLTA mengalami penurunan sebanyak 6 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (TABEL III.11) :

**TABEL III.11**  
**SARANA PENDIDIKAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

No	Desa	TK		SD		SLTP		SLTA	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blotongan	3	2	4	3	-	-	-	-
2	Bugel	1	1	3	2	-	-	-	-
3	Kauman Kidul	2	2	3	1	-	-	-	-
4	Pulutan	1	-	3	2	-	-	-	-
5	Kalibening	1	-	1	1	-	-	-	-
6	Sidorejo Kidul	2	-	5	3	4	1	2	-
7	Tingkir lor	2	1	4	2	1	-	4	-
8	Tingkir Tengah	1	1	3	2	2	1	-	1
9	Noborejo	2	2	3	2	-	-	-	-
10	Kumpulrejo	-	3	-	4	-	-	-	-
11	Randuacir	4	3	3	3	-	1	-	-
12	Cebongan	2	3	3	3	-	-	1	-
13	Kecandran	2	-	3	2	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Sumber : 1. Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994  
2. Salatiga Dalam Angka Tahun 2000.

Ket : SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah  
SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah  
SLTA termasuk Madrasah Aliyah



### 3.11.5 Sarana Kesehatan di Wilayah Perluasan

Sarana kesehatan di wilayah perluasan masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari segi kuantitasnya. Puskesmas pada tahun 1992 sebanyak 1 (satu) buah menjadi 2 (dua) buah pada tahun 2000, demikian pula untuk puskesmas pembantu, pada tahun 1992 belum ada dan pada tahun 2000 telah tersedia sebanyak 3 (tiga) buah puskesmas pembantu. Selengkapnya sebaran sarana kesehatan disajikan pada tabel berikut (TABEL III.12) :

**TABEL III.12**  
**SARANA KESEHATAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

No	Desa	BKIA		Puskesmas		Pustu		Dokter/Prwt		Poliklinik		Rumah Bersalin	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blolongan	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
2	Bugel	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3	Kauman Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pulutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalibening	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Sidorejo Kidul	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7	Tingkir lor	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Tingkir Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Noborejo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Kumpulrejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Randuacir	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Cebongan	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1
13	Kecandran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	-	1	2	-	3	6	4	-	1	-	1

Sumber : 1. Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994  
2. Salatiga Dalam Angka Tahun 2000

### 3.11.6 Sarana Peribadatan di Wilayah Perluasan

Sarana peribadatan yang ada di wilayah perluasan adalah surau, mesjid, gereja, serta pura/vihara. Jumlah mesjid mengalami peningkatan sebanyak buah dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, jumlah surau tidak mengalami peningkatan, jumlah gereja meningkat dari 9 menjadi 15 dan jumlah pura / vihara menurun dari 6 buah menjadi 3 buah. Sebaran sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (TABEL III.13) :

**TABEL III.13**  
**SARANA PERIBADATAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

No	Desa	Mesjid		Surau		Gereja		Pura/Vihara	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blotongan	5	8	17	15	1	1	1	1
2	Bugel	2	3	10	19	-	-	-	-
3	Kauman Kidul	3	5	15	18	-	1	-	-
4	Pulutan	4	4	18	22	-	-	-	-
5	Kalibening	2	2	5	7	-	-	-	-
6	Sidorejo Kidul	7	8	9	9	1	1	-	-
7	Tingkir lor	3	3	18	22	-	-	-	1
8	Tingkir Tengah	1	2	16	17	-	-	-	-
9	Noborejo	5	6	7	9	1	1	-	1
10	Kumpulrejo	5	7	4	4	-	4	4	-
11	Randuacir	4	6	9	1	4	5	-	-
12	Cebongan	6	10	10	1	2	2	1	-
13	Kecandran	5	7	26	20	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber : 1. Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi Kota Salatiga, 1994  
2. Salatiga Dalam Angka Tahun 2000

### 3.11.7 Sarana Perdagangan di Wilayah Perluasan

Sarana perdagangan/perekonomian di wilayah perluasan meliputi pasar, pertokoan dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam studi ini adalah Badan Kredit Desa, yang dikelola oleh masyarakat desa sendiri. Jumlah pasar pada tahun 1992 sebanyak 2 buah meningkat menjadi 4 (empat) buah pada tahun 2000, pertokoan terjadi peningkatan 110 buah,

dan untuk lembaga keuangan tidak mengalami perubahan jumlah. Selengkapnya disajikan pada Tabel III. 14 berikut :

**TABEL III.14**  
**JUMLAH SARANA PERDAGANGAN**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	Pasar		Pertokoan		Lemb. Keuangan	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Blotongan	-	-	9	27	-	-
2	Bugel	-	-	1	5	-	-
3	Kauman Kidul	-	-	1	6	-	-
4	Pulutan	1	1	-	7	1	1
5	Kalibening	-	-	-	5	-	-
6	Sidorejo Kidul	-	-	-	7	1	1
7	Tingkir Lor	1	1	5	15	1	1
8	Tingkir Tengah	-	-	6	25	-	-
19	Noborejo	-	-	1	6	-	-
10	Kumpulrejo	-	-	-	5	-	-
11	Randuacir	-	1	-	4	-	-
12	Cebongan	-	-	7	21	1	1
13	Kecandran	-	1	-	7	-	-
	JUMLAH	2	4	30	140	4	4

Sumber : *Bagian Perekonomian, 2002.*

### 3.11.8 Sarana Komunikasi di Wilayah Perluasan

Sarana komunikasi di wilayah perluasan meliputi jumlah pelanggan telpon, jumlah telpon umum serta jumlah wartel/kiostel. Pelanggan telpon pada tahun 1992 berjumlah 15 meningkat menjadi 1.829 pada tahun 2000, dan wartel padan tahun 1992 belum ada menjadi 27 buah pada tahun 2000. Selengkapnya disajikan pada Tabel III.15 berikut :

**TABEL III.15**  
**JUMLAH SARANA KOMUNIKASI**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	Telpon		Telpon Umum		Wartel	
		1992	2000	1992	2000	1992	2000
1	Noborejo	-	69	-	-	-	-
2	Cebongan	8	158	-	-	-	8
3	Randuacir	-	56	-	-	-	3
4	Kumpulrejo	-	121	-	-	-	-
5	Tingkir Tengah	2	123	-	-	-	2
6	Tingkir Lor	1	158	-	-	-	-
7	Kalibening	-	32	-	-	-	-
8	Sidorejo Kidul	-	78	-	-	-	3
9	Kecandran	-	54	-	-	-	-
10	Pulutan	-	151	-	-	-	2
11	Blotongan	4	681	-	-	-	5
12	Bugel	-	46	-	-	-	1
13	Kauman Kidul	-	102	-	-	-	3
	JUMLAH	15	1.829	-	-	-	27

Sumber : PT. Telkom Salatiga, 2002.

### 3.11.9 Sarana Air Bersih di Wilayah Perluasan

Sarana air bersih dalam studi ini adalah air bersih yang berasal dari PDAM Kota Salatiga. Jumlah pelanggan air bersih pada tahun 1992 sebanyak 677 pelanggan meningkat menjadi 1.902 pelanggan pada tahun 1992. Terdapat beberapa desa yang belum terlayani oleh PDAM, yang selengkapnya disajikan pada Tabel III.16 berikut :

**TABEL III.16**  
**JUMLAH PELANGGAN AIR BERSIH**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	1992	2000
1	Noborejo	-	-
2	Cebongan	38	143
3	Randuacir	-	-
4	Kumpulrejo	-	-
5	Tingkir Tengah	2	3
6	Tingkir Lor	10	32
7	Kalibening	25	64
8	Sidorejo Kidul	50	150
9	Kecandran	25	360
10	Pulutan	15	91
11	Blotongan	512	1.054
12	Bugel	-	5
13	Kauman Kidul	-	-
	JUMLAH	677	1.902

*Sumber : PDAM Kota Salatiga, 2002*

### 3.11.10 Sarana Listrik di Wilayah Perluasan

Sarana listrik telah melayani seluruh wilayah perluasan. Dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 terjadi peningkatan pelanggan sebanyak 5.954 rumah tangga pelanggan listrik. Selengkapnya pelanggan listrik di wilayah perluasan disajikan pada Tabel III.17 berikut :

**TABEL III.17**  
**JUMLAH PELANGGAN LISTRIK**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

NO	DESA	1992	2000
1	Noborejo	65	640
2	Cebongan	1.007	1.255
3	Randuacir	95	627
4	Kumpulrejo	195	887
5	Tingkir Tengah	341	677
6	Tingkir Lor	180	568
7	Kalibening	78	196
8	Sidorejo Kidul	181	641
9	Kecandran	171	727
10	Pulutan	154	484
11	Blotongan	910	1.801
12	Bugel	135	419
13	Kauman Kidul	298	842
	JUMLAH	3.810	9.764

*Sumber : Data Pokok untuk Pembangunan Daerah  
Kota Salatiga, Tahun 1992 & 2000.*

### 3.11.11 Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Perluasan

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok masyarakat yang bersifat sosial budaya, yang di dalam kegiatannya banyak membantu program pemerintah. Yang dimaksud dengan jumlah organisasi kemasyarakatan dalam studi ini adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga. Jumlah organisasi masyarakat di wilayah perluasan pada tahun 1992 berjumlah 2 buah dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 9 buah. Di Kota Salatiga pada tahun 1992 terdapat 74 buah organisasi masyarakat meningkat menjadi 128 buah pada tahun 2000.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**

Analisis kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, dibagi kedalam analisis terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Dari hasil ketiga analisis tersebut akan dirumuskan kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, apabila dikaitkan dengan tujuan diadakannya perluasan wilayah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

#### **4.1 Aspek Pemerintahan**

Aspek Pemerintahan meliputi Lembaga Pengelola bagi desa-desa yang termasuk wilayah Perluasan. Seperti telah disebutkan oleh Kusbiantoro bahwa kelembagaan merupakan salah satu komponen dari sistem wilayah perkotaan, yang menyangkut sistem kelembagaan / institusional, aspek legal (kebijaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan), keuangan atau sumber dana, dan organisasi (lembaga / pelaku terkait).

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang berarti bahwa Lembaga Pengelola wilayah perluasan Kota Salatiga adalah Desa.

Peraturan Daerah tersebut sampai dengan Tahun 2000 masih berlaku, sehingga bentuk pengelolaannya belum terdapat perubahan, dengan demikian nilai skor untuk aspek pemerintahan adalah 1. Penilaian terhadap aspek pemerintahan menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum berkembang.

## 4.2 Aspek Pembangunan

Penilaian terhadap aspek pembangunan meliputi :

### 4.2.1 Fasilitas Perdagangan / Perekonomian

Perkembangan kota dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dengan kota lain. Perkembangan kota pada dasarnya merupakan wujud fisik dari perkembangan ekonomi. Fasilitas perdagangan dapat merupakan penggerak mobilitas penduduk, serta merupakan tempat interaksi masyarakat produsen dengan konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardjo, bahwa kelengkapan fasilitas sosial ekonomi merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan kota.

Dalam studi ini, fasilitas perdagangan/perekonomian meliputi jumlah warung/toko, pasar dan lembaga keuangan. Jumlah warung/toko meningkat dari 30 (tiga puluh) buah pada tahun 1992 menjadi 140 (seratus empat puluh) buah pada tahun 2000. Jumlah pasar meningkat dari 2 (dua) buah pada tahun 1992 menjadi 4 (empat) buah pada tahun 2000. Yang dimaksud lembaga keuangan adalah badan kredit desa yang dikelola oleh masyarakat desa. Jumlah badan kredit desa tidak mengalami perubahan antara Tahun 1992 sampai dengan 2000 yaitu sebanyak 4 (empat) buah. Diwilayah perluasan belum terdapat lembaga keuangan yang berbentuk bank. Penilaian terhadap fasilitas perdagangan / perekonomian menggunakan perhitungan rasio. Perkembangan terhadap fasilitas perdagangan / perekonomian menunjukkan bahwa yang mengalami peningkatan hanya sarana pasar, sedangkan untuk lembaga keuangan dan pertokoan adalah tetap. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.1



#### 4.2.2 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan sarana yang penting untuk menilai perkembangan suatu wilayah. Sebaran fasilitas pendidikan akan mempengaruhi tingkat mobilitas penduduk serta dapat meningkatkan aktifitas perekonomian lain.

Fasilitas pendidikan dalam studi ini meliputi jumlah TK, SD, SLTP dan SLTA. Jumlah TK mengalami penurunan sebanyak 5 (lima) unit dari 23 (dua puluh tiga) unit pada tahun 1992 menjadi 18 (delapan belas) unit pada tahun 2000. Jumlah SD mengalami penurunan sebanyak 8 (delapan) unit, dari 38 (tiga puluh delapan) unit pada tahun 1992 menjadi 30 (tiga puluh) unit pada tahun 2000. Jumlah SLTP mengalami penurunan sebanyak 4 unit, dari 7 (tujuh) unit pada tahun 1992 menjadi 3 (tiga) unit pada tahun 2000. Demikian pula untuk jumlah SLTA, mengalami penurunan sebanyak 6 (enam) unit, dari 7 (tujuh) unit pada tahun 1992 menjadi 1 (satu) unit pada tahun 2000. Penilaian terhadap fasilitas pendidikan menggunakan metode perhitungan rasio. Perkembangan fasilitas pendidikan dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan untuk TK dan SD tidak terdapat perubahan, untuk sarana SLTP dan SLTA ketersediannya cenderung menurun. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV. 1

#### 4.2.3 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu sarana dan prasarana perkotaan yang penting dalam menentukan perkembangan kota. Tersedianya fasilitas kesehatan secara merata merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Fasilitas kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter dan poliklinik. Jumlah puskesmas mengalami peningkatan 1 (satu) unit, puskesmas pembantu mengalami peningkatan sebanyak 3 (tiga) unit, dan untuk poliklinik dan rumah bersalin masing-masing mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu)

unit. Penilaian terhadap fasilitas kesehatan menggunakan metode perhitungan rasio. Perkembangan fasilitas kesehatan dapat dijelaskan bahwa perkembangan fasilitas kesehatan Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 adalah tetap, apabila dilihat berdasarkan ketersediaannya per 10.000 jumlah penduduk. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV. 1.

#### 4.2.4 Fasilitas Komunikasi

Fasilitas komunikasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan kemudahan berkomunikasi dengan daerah lain. Tersedianya sarana komunikasi dapat mempercepat berkembangnya suatu wilayah.

Dalam studi ini, fasilitas komunikasi meliputi jumlah sambungan telpon, telpon umum dan kiospon / wartel. Jumlah pelanggan telpon mengalami peningkatan sebanyak 1.814 pelanggan, dari 15 pelanggan pada tahun 1992 menjadi 1.829 pelanggan pada tahun 2000. Telpon umum belum terdapat di wilayah perluasan. Untuk wartel, pada tahun 1992 belum ada menjadi 27 buah pada tahun 2000. Penilaian terhadap fasilitas komunikasi menggunakan metode perhitungan rasio. Perkembangan fasilitas komunikasi dapat dilihat bahwa untuk fasilitas komunikasi ketersediaannya di wilayah perluasan masih kurang. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV. 1

#### 4.2.5 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dalam studi ini, sarana peribadatan meliputi jumlah mesjid, gereja serta pura / vihara. Jumlah mesjid mengalami peningkatan sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dari 52 (lima puluh dua) unit pada tahun 1992 menjadi 71 (tujuh puluh satu) unit pada tahun 2000. Gereja mengalami peningkatan sebanyak 6 (enam) unit, dari 9 (sembilan) unit pada tahun 1992 menjadi (lima belas)

pada tahun 2000. Sedangkan Pura/Vihara mengalami penurunan sebanyak (tiga) unit, dari 6 (unit) pada tahun 1992 menjadi 3 (tiga) unit pada tahun 2000. Penilaian terhadap sarana peribadatan menggunakan perhitungan rasio. Perkembangan sarana peribadatan menunjukkan bahwa perkembangan sarana peribadatan adalah tetap apabila dilihat dari ketersediannya per 10.000 jumlah penduduk. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.1

**TABEL IV.1**  
**PERHITUNGAN SKOR ASPEK PEMBANGUNAN BERDASARKAN RASIO**  
**DI WILAYAH PERLUASAN TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

Parameter	1992		2000		Nilai Skor Th 2000/1992	Keterangan
	Rasio	Skor	Rasio	Skor		
Fas. Perdagangan						
1. Lemb.Keuangan	1,01	3	0,89	3	1	Tetap
2. Pertokoan	7,58	3	31,29	3	1	Tetap
3. Pasar	0,50	2	0,89	3	1,5	Baik
Fasilitas Pendidikan						
1. TK	0,58	2	0,40	2	1	Tetap
2. SD	1,54	3	1,07	3	1	Tetap
3. SLTP	0,85	3	0,32	1	0,33	Kurang
4. SLTA	1,69	3	0,21	1	0,33	Kurang
Fasilitas Kesehatan	2,02	3	2,45	3	1	Tetap
Fas. Komunikasi	0	1	6,04	3	3	Baik
Sarana Peribadatan	16,95	3	19,89	3	1	Tetap

Sumber : Hasil Analisis, 2002

#### 4.2.6 Fasilitas Hiburan

Fasilitas hiburan menjadi penting karena menunjang fungsi kota sebagai Kota Transit Pariwisata. Dalam studi ini, fasilitas hiburan meliputi jumlah rumah makan, penginapan/hotel, sarana rekreasi. Sarana rekreasi / hiburan yang dimaksud disini mencakup kolam renang, *game*, bilyard serta gedung bioskop. Fasilitas hiburan di wilayah perluasan tidak mengalami perubahan jumlah aptara tahun 1992 sampai dengan tahun 2000.

Penilaian terhadap fasilitas hiburan menggunakan perhitungan menurut Perubahan Keadaan/Jumlah. Perkembangan fasilitas hiburan di wilayah perluasan tidak mengalami perubahan sama sekali. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.2.

#### 4.2.7 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk akan berakibat salah satunya adalah tingginya kepadatan penduduk, yang dapat menyebabkan penduduk berkeinginan untuk mengadakan mobilitas. Sedang kepadatan penduduk merupakan perwujudan geografis dan merupakan akumulasi penduduk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis seperti topografi, iklim dan sebagainya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang didiami dalam satuan luas. Pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan kota.

Penilaian terhadap pertumbuhan dan kepadatan penduduk menggunakan perhitungan menurut perubahan keadaan. Perkembangan pertumbuhan penduduk di wilayah perluasan antara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 sebesar 13,14 %, sedang untuk Kota Salatiga pada waktu yang sama sebesar 1,33 %. Peningkatan kepadatan penduduk di wilayah perluasan, antara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 sebesar 13,08 %, sedang untuk Kota Salatiga periode waktu yang sama menunjukkan peningkatan sebesar 1,35 %. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di wilayah perluasan mengalami perubahan yang lebih besar daripada perubahan yang terjadi di Kota Salatiga. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV. 2.

**TABEL IV.2**  
**PERHITUNGAN SKOR ASPEK PEMBANGUNAN BERDASAR PERUBAHAN**  
**KEADAAN/JUMLAH DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

Parameter	Kota Salatiga		Wilayah Perluasan		Perubahan		Skor	Ket.
	1992	2000	1992	2000	Kota Slgtg	Wil.Perls		
Fas.Hibm Restoran / Rmh Makan, dsb.	33	54	2	2	21	0	1	Kurang
Kependdk Pertumb. Penddk	142.893	144.796	39.536	44.733	1,33 %	13,14 %	3	Baik
Kepdtn Penddk	2.516	2.550	1.063	1.202	1,35 %	13,08 %	3	Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2002

#### 4.2.8. Wilayah terbangun

Wilayah terbangun merupakan salah satu komponen dari pola guna lahan. Penggunaan lahan merupakan akibat dari kegiatan manusia yang berlangsung diatasnya, yang merupakan ekspresi kegiatan manusia dalam menguasai lingkungan untuk kepentingannya. Penggunaan ruang yang meningkat sebagai salah satu akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Dari berbagai penelitian didapat gambaran bahwa wilayah terbangun dari tahun ke tahun selalu berubah seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang dapat dilihat dengan adanya bangunan-bangunan baru seperti rumah, pabrik, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain. Seperti dikemukakan oleh Bintarto, proses perluasan kota akan mengakibatkan perubahan tata guna lahan yang dialami oleh daerah tepi. Hal ini menyangkut pergerakan manusia ke daerah tersebut, yang ditandai dengan bermunculannya kompleks perumahan penduduk, yang didukung peningkatan pelayanan transportasi kota, peningkatan taraf hidup masyarakat serta dorongan dari hakekat kebutuhan manusia. Munculnya kompleks perumahan juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yunus, yang menyebutkan bahwa proses perkembangan dalam arti luas tercermin dalam proses perubahan tata guna lahan.

Penilaian terhadap wilayah terbangun menggunakan metode perhitungan persentase terhadap wilayah terbangun. Perkembangan wilayah terbangun di wilayah perluasan pada Tahun 1992 sebesar 27,99% dan pada Tahun 2000 sebesar 34,41%, dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 6,42 % dari keseluruhan luas daerah perluasan. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.4.

Apabila dilihat perubahan persentase lahan terbangun tiap desa di wilayah perluasan antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, Desa Cebongan mengalami

perubahan tertinggi (22,64%) dan Desa Tingkir lor mengalami perubahan terendah (1,12%). Untuk mengetahui tingkat perubahannya, nilai persentase dikelompokkan kedalam tiga interval nilai. Perubahan 1-7 % dikategorikan tinggi, perubahan 8-15 % dikategorikan sedang dan perubahan 16-23 % dikategorikan tinggi. Perubahan lahan terbangun masing-masing desa selengkapnya disajikan pada tabel berikut (Tabel IV.3) :

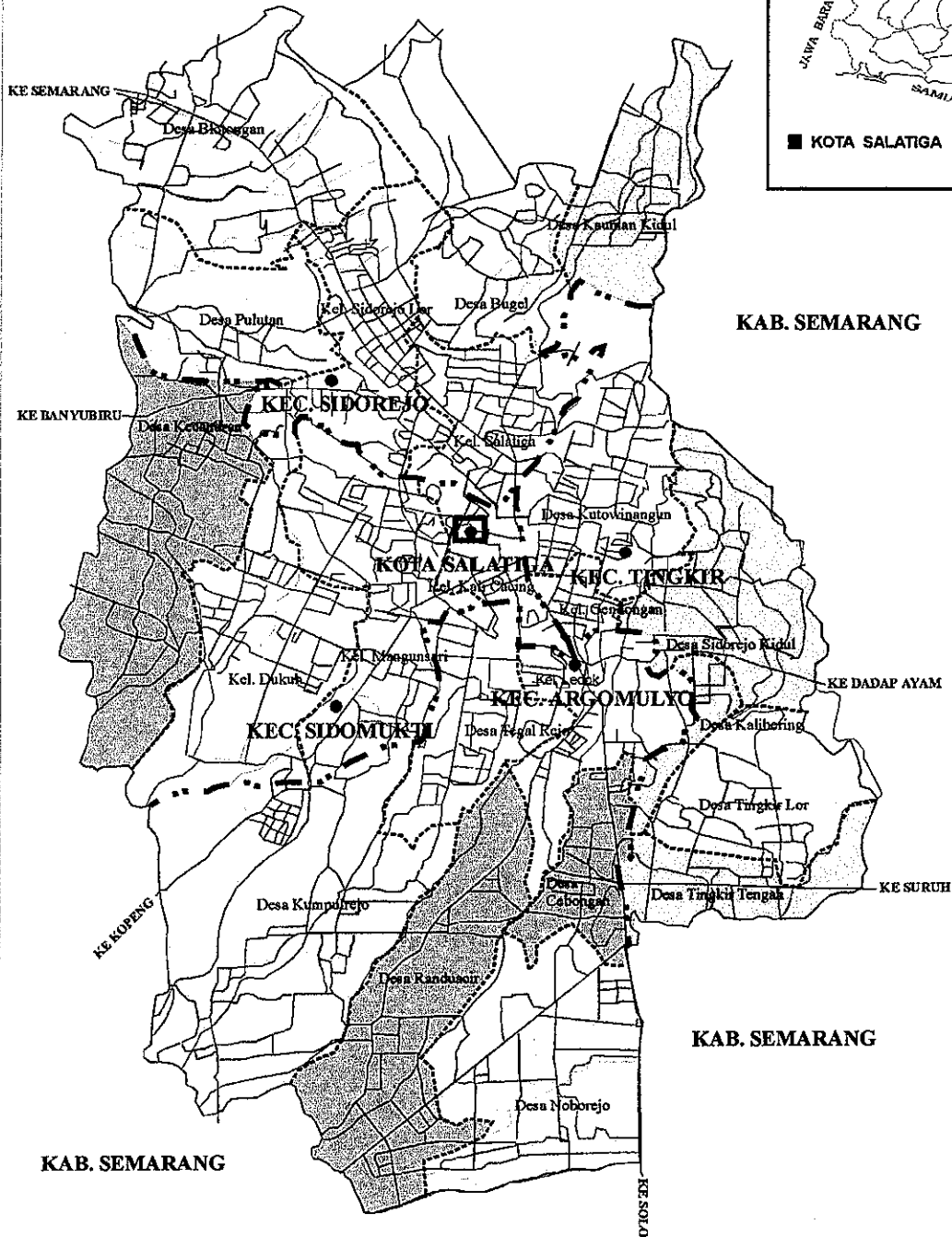
**TABEL IV.3**  
**PERUBAHAN LAHAN TERBANGUN DESA-DESA**  
**WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA TAHUN 1992-2000**

NO	DESA	LUAS (Ha)	LAHAN TERBANGUN (Ha)		PERUBAHAN (%)	KATEGORI
			1992	2000		
1	Blotongan	423,80	133,01	162,06	6,86	Rendah
2	Bugel	294,37	56,07	65,99	3,37	Rendah
3	Kauman Kidul	195,85	38,58	58,89	10,37	Sedang
4	Pulutan	237,10	36,14	49,76	5,75	Rendah
5	Kalibening	277,50	67,81	106,79	14,04	Sedang
6	Sidorejo Kidul	99,60	10,69	23,81	13,17	Sedang
7	Tingkir Lor	177,30	67,19	69,18	1,12	Rendah
8	Tingkir Tengah	137,80	59,47	71,38	8,63	Sedang
9	Noborejo	332,20	81,1	103,54	6,76	Rendah
10	Kumpulrejo	629,03	152,7	182,35	4,72	Rendah
11	Randuacir	377,60	104,16	174,57	18,65	Tinggi
12	Cebongan	138,10	87,27	118,54	22,64	Tinggi
13	Kecandran	399,20	85,58	153,99	17,14	Tinggi

Sumber : Tabel III.10, diolah.

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa persentase perubahan lahan terbangun dengan kategori tinggi berada di desa Randuacir, Desa Cebongan dan Desa Kecandran. Apabila dilihat dari letaknya, desa-desa tersebut berada di sebelah tenggara dan barat daya Kota Salatiga. Untuk lebih jelasnya, perubahan lahan terbangun tersebut disajikan kedalam gambar berikut (Gambar 4. 1) :

## KAB. SEMARANG



## ORIENTASI LOKASI



KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG

KAB. SEMARANG



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA

PETA

PERSENTASE PERUBAHAN LAHAN  
TERBANGUN TAHUN 1992-2000

## LEGENDA :

- BATAS KOTA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JALAN ASPAL
- JALAN BATU
- JALAN TANAH
- SUNGAI
- PERSENTASE PERUBAHAN RENDAH
- PERSENTASE PERUBAHAN SEDANG
- PERSENTASE PERUBAHAN TINGGI

UTARA



NO. GAMBAR

SKALA

4.1

1 : 90.000

SUMBER

HASIL ANALISIS

#### 4.2.9 Pelanggan Telepon

Telpon merupakan salah satu alat komunikasi yang mempermudah hubungan dengan daerah lain serta merupakan salah satu sarana perkotaan / utilitas publik yang mendukung kehidupan kota. Jumlah pelanggan telpon disuatu wilayah terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat dan ketersediaan jaringan / satuan sambungan yang tersedia. Fasilitas telepon merupakan utilitas tambahan, karena belum merupakan kebutuhan pokok seperti air bersih dan listrik, meskipun bagi sekelompok masyarakat sudah merupakan kebutuhan pokok.

Penilaian terhadap pelanggan telpon di wilayah perluasan menggunakan metode perhitungan persentase. Persentase rumah tangga pelanggan telpon pada tahun 1992 sebesar 0,17 % menjadi 18,36 % pada tahun 2000. Dengan demikian pelanggan telpon di wilayah perluasan Kota Salatiga pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar 18,19 % dari jumlah rumah tangga. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.4

#### 4.2.10 Sistem Penataan Ruang

Penataan ruang terkait dengan rencana guna lahan, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi pengembangan kota dan kesesuaian lahan. Perencanaan tata ruang juga bertujuan untuk mengarahkan perkembangan fisik kota.

Penilaian terhadap penataan ruang untuk mengetahui bahwa di wilayah perluasan telah terdapat Perencanaan Tata Ruang. Rencana Tata Ruang di wilayah perluasan Kota Salatiga tercakup dalam Rencana Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006, yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006.



#### 4.2.11 Pelanggan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting serta merupakan salah satu prasarana dasar perkotaan. Konsumsi air bersih diperkotaan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, serta kualitas air.

Penilaian terhadap pelanggan air bersih di wilayah perluasan menggunakan metode perhitungan persentase. Persentase rumah tangga pelanggan air bersih pada tahun 1992 sebesar 7,54 % menjadi 19,09 % pada tahun 2000. Dengan demikian pelanggan air bersih di wilayah perluasan Kota Salatiga dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 11,55 % terhadap jumlah rumah tangga yang ada. Selengkapnya disajikan dalam Tabel IV. 4

#### 4.2.12 Pelanggan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan merupakan sarana utilitas publik. Pemanfaatan listrik oleh kelompok rumah tangga adalah merupakan kebutuhan pokok, yang persentasenya selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah pelanggan listrik terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat dan ketersediaan jaringan / kuantitas daya yang tersedia.

Penilaian terhadap pelanggan listrik di wilayah perluasan Kota Salatiga menggunakan metode perhitungan persentase. Perkembangan persentase rumah tangga pelanggan listrik di wilayah perluasan Kota Salatiga pada tahun 1992 sebesar 42,45 % menjadi 98,02 % pada tahun 2000, dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 55,57 % dari jumlah rumah tangga yang ada (Tabel IV.4).

**TABEL IV.4**  
**PERHITUNGAN SKOR ASPEK PEMBANGUNAN**  
**BERDASAR PERSENTASE**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGATAHUN 1992 DAN 2000**

PARAMETER	1992	2000	PERUBAHAN	SKOR	KETERANGAN
Pelanggan Listrik	42,45 %	98,02 %	Meningkat 55,57 %	3	Perkemb. Baik
Pelanggan Air Bersih	7,54 %	19,09 %	Meningkat 11,55 %	1	Perkemb. Kurang
Pelanggan Telpn	0,17 %	18,36 %	Meningkat 18,19 %	1	Perkemb. Kurang
Wilayah Terbangun	27,99 %	34,41 %	Meningkat 6,42 %	2	Perkemb. Sedang

*Sumber : Hasil Analisis, 2002.*

#### 4.2.13 Keadaan Jalan

Keadaan jalan / jaringan transportasi menentukan tingkat aksesibilitas suatu wilayah dan berperan sebagai alat bantu yang dapat mengarahkan perkembangan kota. Aksesibilitas menunjukkan kemudahan bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah dan ada sangkut pautnya dengan jarak. Tingkat aksesibilitas daerah dapat diukur menurut baik / tidaknya kondisi jalan di daerah tersebut. Disebutkan pula oleh Soekotjo bahwa faktor utama yang menarik perkembangan antara dua daerah pusat kegiatan adalah adanya jalur transportasi dan komunikasi yang baik. Kondisi jaringan jalan merupakan hal penting karena akan berpengaruh terhadap kemudahan pencapaian disamping fungsi jalan dan jarak tempuh.

Penilaian terhadap keadaan jalan menggunakan perhitungan menurut perubahan keadaan. Perkembangan keadaan jalan kota dan jalan lingkungan di wilayah perluasan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kondisi jalan (lingkungan) seluruhnya beraspal menunjukkan bahwa kondisi keseluruhan berklasifikasi baik/berkembang.

**TABEL IV.5**  
**PERHITUNGAN SKOR ASPEK PEMBANGUNAN BERDASAR PERUBAHAN**  
**KEADAAN/ JUMLAH DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

Parameter	1992	2000	Skor	Keterangan
Penataan Ruang	-	Ada	3	Perkemb. Baik
Keadaan Jalan	Belum semua diaspal	Semua telah diaspal	3	Perkemb. Baik

*Sumber : Hasil Analisis, 2002.*

Hasil penilaian terhadap masing-masing parameter dari aspek pembangunan disajikan dalam tabel IV.6 berikut :

**TABEL IV.6**  
**HASIL PERHITUNGAN SKOR TERHADAP ASPEK PEMBANGUNAN**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992-2000**

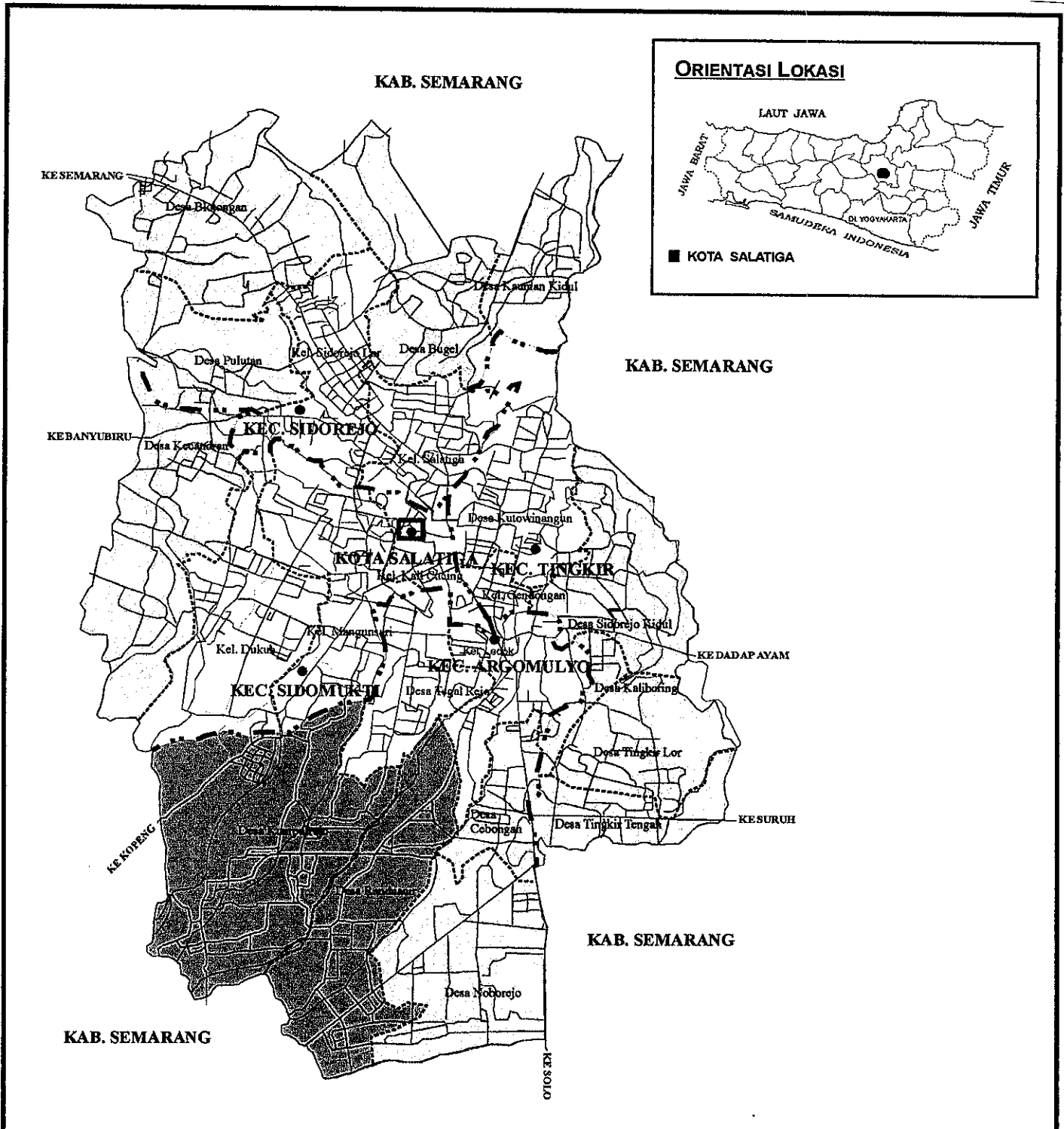
Variabel	Skor	Keterangan
1. Fasilitas Perdagangan		
- Lemb. Keuangan	1	Tetap
- Pertokoan	1	Tetap
- Pasar	1,5	Baik
2. Fasilitas Pendidikan		
- TK	1	Tetap
- SD	1	Tetap
- SLTP	0,33	Kurang
- SLTA	0,33	Kurang
3. Fasilitas Kesehatan	1	Tetap
4. Fasilitas Komunikasi	3	Baik
5. Fasilitas Hiburan	1	Kurang
6. Sarana Peribadatan	1	Tetap
7. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	3	Sedang
8. Wilayah terbangun	2	Sedang
9. Pelanggan Telpn	1	Kurang
10. Sistem Penataan Ruang	3	Baik
11. Pelanggan Air Bersih	1	Kurang
12. Pelanggan Listrik	3	Baik
13. Keadaan Jalan	3	Baik
	27,6	

*Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2002*

Untuk mengetahui perkembangan wilayah perluasan dari aspek pembangunan, nilai skor dari parameter aspek pembangunan di bagi kedalam 3 interval nilai, yaitu nilai 18-30 skor 1, berarti tidak berkembang, nilai 31-43 skor 2, berarti tetap dan nilai lebih

dari 44 skor 3 berarti wilayah perluasan telah berkembang. Total nilai untuk aspek pembangunan adalah 27,6, termasuk dalam nilai skor 1, yang menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum berkembang.

Desa-desa di wilayah perluasan bukan berarti belum berkembang sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari perubahan masing-masing parameter aspek pembangunan di desa-desa wilayah perluasan, antara tahun 1992-2000. Untuk mengetahui tingkat perkembangannya, jumlah nilai dari perubahan parameter aspek pembangunan dibagi kedalam tiga kategori (Lampiran C.4). Desa yang mengalami perkembangan paling signifikan adalah di desa Kumpulrejo dan Randuacir, sedang desa-desa wilayah perluasan lainnya termasuk kedalam kategori tetap. Apabila dilihat letak desa Kumpulrejo dan Randuacir, maka desa tersebut berada di sebelah tenggara Kota Salatiga. Untuk lebih jelasnya tingkat perkembangan desa-desa di wilayah perluasan disajikan dalam gambar berikut (Gambar 4.2) :



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

## TESIS







**STUDI KINERJA  
PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN  
KOTA SALATIGA**

**PETA**

**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA WILAYAH  
PERLUASAN KOTA SALATIGA TAHUN 2000**

**LEGENDA :**



	BATAS KABUPATEN/KOTA
	BATAS KECAMATAN
	BATAS DESA
	SUNGAI
	PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN
	TETAP



**UTARA**

**NO. GAMBAR**

## SKALA

## 4.2

**1 : 90.000**

**SUMBER**

## HASIL ANALISIS

#### 4.2.14 Pembiayaan Sektor Publik

Kebijakan perluasan wilayah salah satunya berdasarkan pertimbangan administratif, yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kemampuan daerah perkotaan untuk membiayai pembangunan daerah baru.

Perhitungan pembiayaan Sektor Publik terhadap wilayah perluasan dimulai Tahun 1994, hal ini disebabkan karena secara fisik wilayah yang merupakan wilayah perluasan Kota Salatiga secara resmi baru diserahkan pada Tahun 1994, meskipun telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

##### 4.2.14.1 Perhitungan Penerimaan

Komponen penerimaan yang berasal dari wilayah perluasan dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2000 yang dapat teridentifikasi meliputi :

##### a. Penerimaan dari Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan hasil pungutan pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah. Penerimaan dari Pajak Daerah meliputi :

##### - Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah :

Pemerintah Pusat	: 10,0 %
Biaya Pemungutan	: 9,0 %
Pemerintah Daerah Tingkat I	: 16,2 %
Pemerintah Daerah Tingkat II	: 64,8 %.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah perluasan Tahun 1994-2000 disajikan pada Tabel IV.7.

- Pajak Penerangan Jalan Umum

Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998. Tarif pajak ditentukan sebagai berikut :

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan industri sebesar 9 %.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 %.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9 %.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 3 %.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum di wilayah perluasan dari tahun 1994-2000 disajikan pada Tabel IV.7.

b. Penerimaan dari Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan hasil pungutan daerah sebagai pembiayaan pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan/pekerjaan, jasa usaha atau milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan dari retribusi daerah meliputi:

- Ijin Mendirikan Bangunan

Pemberian ijin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Dati II Salatiga dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di wilayah perluasan Tahun 1994-2000 disajikan pada Tabel IV.7.

- Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pemberian ijin peruntukkan penggunaan tanah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998. Penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah di wilayah perluasan Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2000 disajikan pada Tabel IV.7.

- Ijin Tempat Usaha / Ijin Gangguan / HO

Retribusi ijin tempat usaha/ ijin gangguan/HO diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Ijin Tempat Usaha di Kotamadya Dati II Salatiga, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Penerimaan retribusi izin gangguan di wilayah perluasan dari Tahun 1992 – 2000 disajikan pada Tabel IV.7.

- Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum

Retribusi Izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kota di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga, yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995, yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.

Penerimaan retribusi izin trayek angkutan penumpang umum di wilayah perluasan Tahun 1994 – 2000 disajikan dalam Tabel IV.7.

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Penerimaan retribusi penerimaan KTP diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Perubahan dalam



**TABEL IV.7**  
**PENERIMAAN DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1994 - 2000**

KOMPONEN	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>I. Pajak</b>							
a. PBB	46.438.065	72.950.122	104.720.518	98.949.656	153.482.161	104.826.547	160.824.338
b. PPJU	199.731.197	225.261.068	255.636.302	282.327.974	396.077.460	385.808.546	422.505.998
Jml Pajak	246.169.262	298.211.190	360.356.820	381.277.630	549.559.621	490.635.093	583.330.336
<b>II. Retribusi</b>							
a. IMB	0	0	0	0	0	3.394.000	21.948.500
b. HO	1.435.000	13.275.000	14.270.000	15.205.000	4.920.000	5.545.000	14.964.625
c. Yankes		4.363.100	6.809.950	6.251.950	5.986.225	6.787.227	9.093.672
d. Ijin Lokasi	-	235.920	3.557.740	1.524.550	1.930.290		
e. Ijin Trayek	285.000	705.000	540.000	705.000	1.305.000	585.000	2.576.000
f. KTP	5.728.500	12.775.500	3.450.000	11.850.000	54.597.000	6.745.500	3.150.000
Jml Retribusi	7.448.500	31.354.520	28.627.690	35.536.500	68.738.515	23.056.727	51.732.797
<b>JUMLAH I + II</b>	<b>253.617.762</b>	<b>329.565.710</b>	<b>388.984.510</b>	<b>416.814.130</b>	<b>618.298.136</b>	<b>513.691.820</b>	<b>635.063.133</b>

Sumber : Diolah dari Lampiran D. Tabel D22-D9.

Komponen penerimaan tersebut diperhitungkan menurut nilai sekarang (Tahun 2000). Perhitungan nilai penerimaan berdasarkan nilai sekarang didasarkan pada asumsi bahwa nilai sejumlah penerimaan pada masa lalu, dengan mendapat bunga dari waktu ke waktu akan berkembang menjadi jumlah yang lebih besar tergantung pada waktu dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang dipergunakan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku dipasar. Tingkat suku bunga bank yang dikeluarkan Bank Indonesia antara Tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 disajikan pada tabel IV.8 berikut :

**TABEL IV.8**  
**TINGKAT SUKU BUNGA BANK TAHUN 1992-2000**

TAHUN	SUKU BUNGA (%)
1992	21,13
1993	16,25
1994	12,99
1995	15,04
1996	16,69
1997	16,28
1998	21,84
1999	27,60
2000	15,07
Rata-rata	18,45

*Sumber : Bank Indonesia, 2002*

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat suku bunga bank antara tahun 1992 sampai dengan 2000 sebesar 18 %. Oleh karenanya perhitungan penerimaan menurut nilai tahun 2000 digunakan tingkat suku bunga sebesar 18 %. Hasil perhitungannya disajikan pada Tabel IV.9 berikut :

**TABEL IV.9**  
**PENERIMAAN DI WILAYAH PERLUASAN**  
**MENURUT NILAI TAHUN 2000**

TAHUN	PENERIMAAN (Rp)
1994	684.654.883
1995	753.966.509
1996	754.154.517
1997	684.838.954
1998	860.918.325
1999	606.156.348
2000	635.063.133
JUMLAH	4.979.752.668

*Sumber : Hasil Perhitungan, 2002.*

Perhitungan penerimaan di wilayah perluasan Kota Salatiga belum termasuk penerimaan yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Hotel dan Restoran, hal ini dikarenakan tidak tersedianya data secara terperinci menurut asal wajib pungut pajak tersebut.

#### 4.2.14.2 Perhitungan Pengeluaran

Perhitungan pengeluaran pembangunan bagi wilayah perluasan Kota Salatiga terdiri dari :

- a. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.
- b. Pengeluaran pembangunan meliputi biaya proses perluasan wilayah administrasi, serta pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk anggaran proyek-proyek pembangunan.

Dalam perhitungan pengeluaran, untuk pengeluaran rutin tidak dapat diidentifikasi, hal ini dikarenakan untuk pengeluaran rutin tergabung dalam

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga serta mengingat lembaga pengelola yang masih berstatus desa.

Pengeluaran pembangunan bagi wilayah perluasan Kota Salatiga disajikan pada table IV.10 berikut :

**TABEL IV.10**  
**PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERLUASAN**  
**TAHUN 1990/1991 – 2000**

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PEMBANGUNAN (Rp)
1990/1991	3.000.000,00
1991/1992	23.000.000,00
1992/1993	29.177.000,00
1993/1994	106.300.000,00
1994/1995	1.029.721.000,00
1995/1996	2.276.016.000,00
1996/1997	1.541.297.000,00
1997/1998	2.021.759.000,00
1998/1999	1.147.635.400,00
1999/2000	3.166.720.085,00
2000	3.094.912.990,00

*Sumber: Diolah dari Lampiran E1 – E9 , 2002.*

Komponen pengeluaran tersebut diperhitungkan menurut nilai Tahun 2000, menggunakan tingkat suku bunga sebesar 18 %, seperti halnya pada perhitungan penerimaan Hasil perhitungannya disajikan pada Tabel IV.11 berikut :

**TABEL IV.11**  
**PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERLUASAN**  
**MENURUT NILAI TAHUN 2000**

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PEMB. (Rp)
1990/1991	13.306.361,58
1991/1992	86.453.761,66
1992/1993	92.942.572,00
1993/1994	286.962.606,47
1994/1995	2.355.752.205,09
1995/1996	4.412.689.202,20
1996/1997	2.532.400.292,50
1997/1998	2.815.097.231,60
1998/1999	1.354.209.772,00
1999/2000	3.166.720.085,00
2000	3.094.912.990,00
<b>JUMLAH</b>	<b>20.211.447.080,10</b>

*Sumber : Hasil Perhitungan, 2002.*

Dari jumlah pengeluaran pembangunan tersebut diatas, untuk tiap-tiap tahun anggaran terdapat proyek-proyek yang dibiayai dengan dana yang berasal dari bantuan/sumbangan. Jumlah dana yang berasal dari bantuan/sumbangan untuk tiap-tiap tahun anggaran beserta nilainya menurut tahun 2000 disajikan pada Tabel IV.12 berikut :

**TABEL IV.12**  
**PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERLUASAN YANG**  
**BERASAL DARI DANA SUMBANGAN/BANTUAN TA.1993/1994-2000**

NO	THN ANGGRN	JUMLAH	NILAI TH. 2000 (Rp)
1	1993/1994	27.200.000	86.644.890
2	1994/1995	889.489.000	2.401.223.724
3	1995/1996	1.239.907.000	2.836.606.857
4	1996/1997	545.853.000	1.058.287.657
5	1997/1998	1.031.560.000	1.694.886.090
6	1998/1999	698.532.950	972.637.280
7	1999/2000	2.917.012.615	3.442.074.886
8	2000	2.490.367.300	2.490.367.300
<b>JUMLAH</b>			<b>14.982.728.683</b>

*Sumber : Diolah dari Lampiran E 10*

Dari tabel tersebut nampak bahwa untuk pengeluaran pembangunan diwilayah perluasan antara Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000 menggunakan dana yang berasal dari bantuan / sumbangan sebesar Rp. 14.982.728.683 atau 75,4 % dari total pengeluaran pembangunan, dan yang berasal dari pajak dan retribusi memberikan kontribusi sebesar 24,6 % dari total pengeluaran pembangunan.

Apabila diasumsikan bahwa nilai pengeluaran pembangunan yang berasal dari sumbangan/bantuan diperhitungkan sebagai penerimaan, maka total penerimaan dari wilayah perluasan menjadi sebesar Rp. 19.962.481.351.

#### 4.2.14.3 Perhitungan Selisih Penerimaan dan Pengeluaran

Untuk mengetahui sejauhmana wilayah perluasan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Salatiga apabila dilihat dari pembiayaan sektor publik, maka dapat membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran yang menjadi beban pemerintahan antara Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel IV.13 berikut :

**TABEL IV.13**  
**SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA TAHUN 1992-2000**

PENERIMAAN / PENGELUARAN	PAJAK+RETRIBUSI	PAJAK+RETR+SUMB/BANT
Penerimaan	4.979.752.668,00	19.962.481.351,00
Pengeluaran	20.211.447.080,10	20.211.447.080,10
Selisih	(15.231.694.412,1)	(248.965.729,1)

*Sumber : Hasil Perhitungan, 2002.*

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa selisih antara penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan Kota Salatiga tanpa sumbangan/bantuan bernilai negatif sebesar Rp (15.231.694.412,1), demikian pula apabila bantuan/sumbangan

diperhitungkan sebagai penerimaan, selisih antara penerimaan dan pengeluaran juga bernilai negatif yaitu sebesar Rp.(248.965.729,1). Hal ini menunjukkan bahwa untuk pembiayaan pembangunan sektor publik di wilayah perluasan masih sangat tergantung pada dana yang berasal dari bantuan/sumbangan. Tingginya ketergantungan keuangan ini menurut Kuncoro, terdapat beberapa hal yang menyebabkan diantaranya, meskipun jenis pajak daerah beraneka macam, tetapi hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan serta alasan politis. Penerimaan yang berasal dari daerah sendiri ( Pajak dan Retribusi) nilai kontribusinya terhadap pengeluaran pembangunan masih sangat kecil, yang dapat diartikan pula bahwa dari sisi pembiayaan sektor publik, wilayah perluasan Kota Salatiga ternyata membebani bagi Pemerintah Kota Salatiga.

#### **4.3 Aspek Kemasyarakatan**

##### **4.3.1 Perubahan Tata Kehidupan**

Interaksi antara penduduk menimbulkan berbagai bentuk aktivitas. Aktivitas yang terjadi menimbulkan beberapa perubahan diantaranya perubahan tata kehidupan.

Perubahan tata kehidupan mencakup perubahan struktur penduduk menurut mata pencaharian. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui jenis mata pencaharian, perbandingan jumlah antara jenis pekerjaan yang satu dengan yang lain, gambaran tentang struktur ekonomi suatu daerah. Mata pencaharian secara umum adalah jenis kegiatan pekerjaan yang dominan dilakukan sekelompok orang, dalam hal ini dibedakan menjadi sektor pertanian dan sektor non pertanian. Apabila suatu daerah penduduk lebih banyak yang bekerja di sektor non pertanian berarti terjadi penurunan di bidang pertanian.

Wilayah perluasan Kota Salatiga merupakan kawasan dipinggiran Kota Salatiga, yang merupakan sasaran invasi penduduk baru dan bangunan baru, sehingga dapat meningkatkan jenis pekerjaan non agraris/ sektor non pertanian.

Perkembangan persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian pada tahun 1992 sebesar 59,66% dan pada tahun 2000 sebesar 81,60 %, dengan demikian persentase penduduk yang bekerja disektor non pertanian lebih besar dari pada yang bekerja di sektor pertanian, baik untuk tahun 1992 maupun tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perluasan telah menampakkan ciri kekotaan. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.14.

#### 4.3.2 Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok masyarakat yang bersifat sosial budaya. Dalam pelaksanaannya organisasi kemasyarakatan ini banyak membantu dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penilaian terhadap organisasi kemasyarakatan, menggunakan perhitungan menurut perubahan jumlah. Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 mengalami peningkatan sebanyak 54 buah, sedangkan di wilayah perluasan antara tahun yang sama mengalami peningkatan sebanyak 7 buah organisasi kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode waktu yang sama di wilayah perluasan, perkembangan organisasi kemasyarakatan dari sisi kuantitas peningkatannya sangat rendah. Selengkapnya disajikan pada Tabel IV.14.



**TABEL IV.14**  
**PERHITUNGAN SKOR ASPEK KEMASYARAKATAN**  
**DI WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA**  
**TAHUN 1992 DAN TAHUN 2000**

PARAMETER	KOTA SALATIGA		WILAYAH PERLUASAN		PERUBAHAN		SKOR	KET.
	1992	2000	1992	2000	KOTA SLTG	WIL.PERLSN		
Jumlah Ormas	74	128	2	9	54	7	1	Kurang
Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian			59,66%	81,69%			3	Baik

*Sumber : Hasil Perhitungan, 2002*

Penilaian terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dari sisi aspek kemasyarakatan menunjukkan bahwa di wilayah perluasan belum terdapat perubahan/ tetap.

#### **4.4 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga dari Aspek Pemerintahan, Aspek Pembangunan dan Aspek kemasyarakatan**

Penilaian kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga meliputi penilaian terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Hasil perhitungan nilai skor terhadap masing-masing aspek selengkapnya disajikan dalam Tabel IV.15 berikut :

**TABEL IV.15**  
**SKOR PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN**  
**TAHUN 1992 - 2000**

ASPEK	VARIABEL	SKOR	KETERANGAN
Pemerintahan	1. Lembaga Pengelola	1	Tetap
Pembangunan	3. Fasilitas Perdagangan		
	Lemb. Keuangan	1	Tetap
	Pertokoan	1	Tetap
	Pasar	1,5	Baik
	4. Fasilitas Pendidikan		
	TK	1	Tetap
	SD	1	Tetap
	SLTP	0,33	Kurang
	SLTA	0,33	Kurang
	3. Fasilitas Kesehatan	1	Tetap
	4. Fasilitas Komunikasi	3	Baik
	5. Fasilitas Hiburan	1	Kurang
	6. Sarana Peribadatan	1	Tetap
	7. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	3	Sedang
	8. Wilayah terbangun	2	Sedang
	9. Pelanggan Telpon	1	Kurang
	10. Sistem Penataan Ruang	3	Baik
	11. Pelanggan Air Bersih	1	Kurang
	12. Pelanggan Listrik	3	Baik
	13. Keadaan Jalan	3	Baik
Kemasyarakatan	1. Perubahan Tata Kehidupan	3	Baik
	2. Organisasi Kemasyarakatan	1	Kurang
Jumlah		33,16	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2002

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa untuk variabel yang menunjukkan perkembangan baik adalah fasilitas komunikasi, persentase pelanggan listrik, keadaan jalan, perubahan tata kehidupan masyarakat, pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta sistem penataan ruang. Variabel yang perkembangannya tetap adalah lembaga pengelola, fasilitas perdagangan, fasilitas pendidikan (TK dan SD), fasilitas kesehatan, sarana peribadatan, serta yang perkembangannya kurang adalah

fasilitas pendidikan (SLTP dan SLTA), Fasilitas hiburan, persentase pelanggan air bersih, pelanggan telpon serta organisasi kemasyarakatan.

Untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan dari ketiga aspek tersebut, maka jumlah nilai skor tersebut dibagi kedalam 3 kelas, dengan interval nilai sebagai berikut ( Tabel IV.16) :

**TABEL IV.16**  
**INTERVAL NILAI PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN**  
**KOTA SALATIGA, 1992- 2000**

INTERVAL	SKOR	KETERANGAN
21- 35	1	Perkembangan kurang
36 – 50	2	Tetap
≥ 51	3	Perkembangan bernilai positif

*Sumber : Hasil Analisis, 2002*

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 1, yang berarti relatif belum berkembang.

Apabila dilihat dari sektor pembiayaan publik, selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembangunan sektor publik di wilayah perluasan menunjukkan nilai negatif. Pembangunan sektor publik di wilayah perluasan, pembiayaannya masih tergantung kepada dana yang berasal dari bantuan / sumbangan. Hal ini tercermin dari besarnya persentase sumber dana yang berasal dari bantuan / sumbangan, besarnya mencapai 75,4 % dari total biaya yang telah dikeluarkan. Penerimaan dari wilayah perluasan hanya memberi kontribusi sebesar 24,6 % dari total pengeluaran pembangunan sektor publik. Keadaan ini menunjukkan bahwa wilayah perluasan belum memberikan kontribusi yang nyata bagi Kota Salatiga, dan mempunyai peluang membebani bagi Kota Salatiga.

#### 4.5 Persepsi Terhadap Perkembangan Wilayah Perluasan

Persepsi adalah bentuk penilaian seseorang atau sekelompok orang/masyarakat terhadap sesuatu sehingga dapat ditentukan apa yang akan dilakukannya. Dalam memberikan penilaian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah umur, tingkat pendidikan, status sosial, pengalaman serta profesi seseorang.

Dalam studi ini, penilaian/ persepsi terhadap perkembangan wilayah perluasan meliputi persepsi dari unsur pemerintah / birokrasi, unsur swasta dan unsur masyarakat. Dipilihnya ketiga unsur tersebut karena merupakan *stakeholder* atau pelaku pembangunan kota. Hasil penilaian terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan dijelaskan sebagai berikut :

##### 4.5.1 Persepsi terhadap aspek pemerintahan

Persepsi dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat terhadap aspek pemerintahan, menunjukkan bahwa dari sisi pemerintahan, wilayah perluasan Kota Salatiga telah berkembang dengan baik, yang berarti memiliki nilai skor 3 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.2). Hal ini apabila dilihat dari faktor kemudahan pelayanan dan faktor jarak terhadap kantor-kantor pelayanan masyarakat, serta seringnya kedatangan aparatur pemerintah ditingkat atas desa yaitu kecamatan dan pemerintah kota ke desa-desa wilayah perluasan.

##### 4.5.2 Persepsi terhadap aspek pembangunan

Persepsi dari unsure pemerintahan terhadap aspek pembangunan menunjukkan bahwa dari sisi pembangunan, wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 2 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.2) yang berarti belum mengalami

perkembangan yang berarti. Apabila dilihat lebih jauh lagi, penilaian terhadap sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dari sisi anggaran dan pendapatan belanja daerah, wilayah perluasan ternyata menyerap dana yang besar apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima, serta fasilitas pendidikan terutama pendidikan lanjutan tingkat pertama serta sekolah menengah umum/kejuruan masih memusat dikota. Sebagai Kota Transit Pariwisata, ternyata wilayah perluasan Kota Salatiga untuk sarana hiburan/rekreasi masih sangat kurang.

Penilaian dari unsur swasta menunjukkan bahwa dari aspek pembangunan, wilayah perluasan berada pada nilai skor 1 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan lampiran C.2), yang berarti bahwa wilayah perluasan belum menunjukkan perkembangan. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa sarana dan prasarana penunjang untuk investasi seperti prasarana jalan, jaringan air bersih dan jaringan telpon masih terbatas disamping adanya keterbatasan dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Penilaian dari unsur masyarakat terhadap aspek pembangunan, menunjukkan bahwa wilayah perluasan berada pada nilai skor 2 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.2), yang berarti bahwa wilayah perluasan belum mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa sebagian sarana dan prasarana perkotaan belum memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terutama untuk sarana komunikasi, air bersih, sarana hiburan/rekreasi, perdagangan serta fasilitas pendidikan terutama setingkat SLTP dan SMU/SMK.

#### 4.5.3 Persepsi terhadap aspek kemasyarakatan

Penilaian terhadap aspek kemasyarakatan di wilayah perluasan, dari unsur pemerintah dan unsur swasta menunjukkan pada nilai skor 2 (Tabel IV.17 dikaitkan

Lampiran C.2), yang berarti belum menunjukkan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa pola aktifitas organisasi kemasyarakatan di Kota Salatiga terpusat pada wilayah inti kota. Penilaian terhadap struktur penduduk menurut mata pencaharian, didasarkan pada keadaan bahwa sebelum menjadi wilayah Kota Salatiga, penduduk yang bekerja disektor non pertanian sudah lebih besar dari pada penduduk yang bekerja disektor pertanian.

Dari unsur masyarakat, penilaian juga menunjukkan pada nilai skor 2 ( Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.2), yang berarti belum menunjukkan perkembangan. Hal ini didasarkan pada perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan, juga aktifitas dan peranannya terhadap pembangunan di wilayah perluasan, serta penilaian terhadap kemudahan membuka usaha, kemudahan mencari pekerjaan serta kemungkinan untuk beralih mata pencaharian. Organisasi kemasyarakatan disini adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah Kota Salatiga. Organisasi masyarakat selama ini berkembang di wilayah pusat kota, mengingat bahwa sebagian besar aktifitas dari organisasi tersebut berskala kota.

#### 4.5.4 Persepsi terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga

Hasil penilaian terhadap perkembangan wilayah perluasan, dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat dinyatakan pada Tabel IV.17 berikut :

**TABEL IV.17**  
**HASIL PENILAIAN TERHADAP**  
**PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN**

UNSUR	A1	A2	A3	JUMLAH
PEMERINTAH	39	122	21	182
SWASTA	40	50	25	115
MASYARAKAT	328	1.740	628	2.696
JUMLAH	407	1.912	674	2.993

*Sumber : Hasil Analisis, 2002.*

Keterangan :     A1 = Aspek Pemerintahan  
                      A2 = Aspek Pembangunan  
                      A3 = Aspek Kemasyarakatan

Untuk mengetahui penilaian dari ketiga unsur terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga, hasil penilaian terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, dikelompokkan kedalam 3 kelas ( Lampiran C.3). Hasil penilaian menunjukkan bahwa perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 2 ( Lampiran C.3) yang berarti wilayah perluasan relatif belum berkembang.

Penilaian dari unsur pemerintah, unsur swasta serta unsur masyarakat terhadap aspek pemerintahan di wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 3 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.3) menunjukkan bahwa di wilayah perluasan telah berkembang.

Penilaian terhadap aspek pembangunan, dari ketiga unsur menyatakan bahwa di wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 2 (Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.3) yang berarti belum menampakkan perkembangan. Hal ini apabila dikaitkan dengan tujuan dilakukannya perluasan wilayah sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 1992, menunjukkan bahwa wilayah perluasan belum mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat kesehatan regional serta kota transit pariwisata.

Terhadap aspek kemasyarakatan, penilaian dari ketiga unsur, menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga berada pada nilai skor 2 ( Tabel IV.17 dikaitkan dengan Lampiran C.3), yang berarti wilayah perluasan belum berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan berkembang dengan baik hanya di pusat kota dan belum menyebar ke wilayah perluasan. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud disini adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga.

Dari sisi jenis mata pencaharian, pada tahun 2000 sebagian besar penduduk di wilayah perluasan memiliki mata pencaharian di sector non pertanian (81,69 %). Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah perluasan, kegiatan di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan.

#### 4.6 Kinerja Perkembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga

Kinerja perkembangan wilayah perluasan diartikan sebagai hasil atau prestasi dari pembangunan yang dilakukan di wilayah perluasan Kota Salatiga. Penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dilakukannya perluasan wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 yaitu a) mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional serta kota transit pariwisata, b) tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan c) sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan.

Untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga secara keseluruhan, hasil penilaian skor terhadap data sekunder dipersandingkan dengan hasil penilaian skor terhadap data primer. Hasil penilaian skor terhadap masing-masing aspek disajikan pada tabel IV.18 berikut :

**TABEL IV.18**  
**PERSANDINGAN NILAI SKOR DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER**

ASPEK	DATA PRIMER		DATA SEKUNDER	
	SKOR	KETERANGAN	SKOR	KETERANGAN
Pemerintahan	3	Perkemb. Baik	1	Perkemb Kurang
Pembangunan	2	Tetap	1	Perkemb.Kurang
Kemasyarakatan	2	Tetap	2	Tetap
Ketiga Aspek	2	Tetap	1	Perkemb.Kurang

*Sumber : Hasil Analisis, 2002.*



Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui, bahwa terdapat perbedaan antara nilai skor dari data primer dengan data sekunder. Penilaian terhadap aspek pemerintahan dari data primer menunjukkan nilai skor 3 yang berarti perkembangan baik, sedang dari data sekunder menunjukkan nilai skor 1 yang berarti perkembangan kurang. Perbedaan ini dikarenakan pada data sekunder, penilaian hanya didasarkan pada bentuk lembaga pengelola desa-desa di wilayah perluasan, tetapi pada data sekunder penilaian juga menyangkut pada kemudahan mendapatkan pelayanan masyarakat serta kedekatan terhadap sarana pelayanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan masuk ke wilayah Kota Salatiga, desa-desa di wilayah perluasan tersebut mengalami peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta jarak terhadap sarana pelayanan masyarakat yang semakin dekat.

Penilaian terhadap aspek pembangunan, dari data primer menunjukkan nilai skor 2, yang berarti bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum mengalami perkembangan, dan dari data sekunder menunjukkan nilai skor 1, yang berarti belum berkembang.

Penilaian terhadap aspek kemasyarakatan dari data primer dan data sekunder menunjukkan nilai skor sama yaitu 2, yang berarti bahwa di wilayah perluasan belum berkembang. Penilaian terhadap aspek kemasyarakatan didasarkan pada struktur penduduk menurut mata pencaharian dan jumlah organisasi masyarakat. Struktur penduduk yang bekerja disektor non pertanian lebih besar daripada yang bekerja di sektor pertanian, yang berarti bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga telah menunjukkan ciri kotaan. Organisasi masyarakat hanya berkembang di pusat kota dan belum berkembang di wilayah perluasan Kota Salatiga, apabila dilihat dari jumlahnya.

Penilaian terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, dari data primer menunjukkan nilai skor 2, yang berarti bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum berkembang/tetap. Sedangkan dari data sekunder menunjukkan nilai skor 1, yang berarti bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga perkembangannya kurang.

Penilaian terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan yang berasal dari data primer bersifat subyektif karena menyangkut persepsi/rasa. Sedangkan penilaian yang berasal dari data sekunder lebih dapat diterima karena terjaga kekonsistennannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga perkembangannya belum mengarah pada tujuan diadakannya perluasan wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

#### **4.7 Pengembangan Wilayah Perluasan Kota Salatiga**

Pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga diartikan sebagai upaya menangani perkembangan dimasa yang akan datang sebagai konsekwensi atas perkembangan wilayah perluasan yang merupakan hasil studi.

Melalui analisis skoring terhadap masing-masing parameter dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan serta aspek kemasyarakatan (Tabel IV.15) menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga relatif belum berkembang. Hasil nilai skor tersebut apabila dikelompokkan menurut perkembangannya, disajikan pada tabel IV.19 berikut :

**TABEL IV. 19**  
**VARIABEL KINERJA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAANNYA**  
**DI WILAYAH PERLUASAN**  
**KOTA SALATIGATAHUN 1992-2000**

KURANG	TETAP	BAIK
a. Fas.Pendidikan(SLTP,SLTA)	a. Lembaga Pengelola	a. Fas Perdagangan (Pasar)
b. Fas. Hiburan	b. Fas perdagangan (Lembaga Keuangan, Pertokoan)	b. Fas Komunikasi
c. Pelanggan Telepon	c. Fas Pendidikan (TK,SD)	c. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
d. Pelanggan air bersih	d. Fas. Kesehatan	d. Sistem Penataan Ruang
e. Orgnisasi Kemasyarakatan	e. Fas Peribadatan	e. Pelanggan Listrik
	f. Wilayah terbangun	f. Keadaan Jalan
		g. Perub. Tata Kehidupan Masyarakat

*Sumber : Diolah dari Tabel IV.15, 2002*

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa jumlah parameter yang menunjukkan belum berkembang dan kondisi tetap sebanyak 10 (sepuluh) parameter, sedangkan yang telah menunjukkan perkembangan sebanyak 7 (tujuh) parameter. Hal ini mengakibatkan penilaian secara keseluruhan, wilayah perluasan Kota Salatiga perkembangannya belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diadakannya perluasan wilayah.

Penilaian/persepsi dari unsur pemerintah, unsur swasta serta unsur masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan dilihat dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan juga menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan.

Seperti telah diungkapkan oleh Koestoer bahwa perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor internal meliputi kependudukan, kemampuan sosial ekonomi dan kemampuan mengelola pembangunan serta faktor eksternal yang meliputi lokasi alam dan letak dari kota sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam studi ini, faktor internal diartikan perubahan / perkembangan keadaan disebabkan

oleh kemampuan dari wilayah perluasan sendiri, sedangkan faktor eksternal menunjukkan bahwa perubahan / perkembangan keadaan disebabkan karena adanya pengaruh dari luar wilayah perluasan Kota Salatiga. Dari variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui kinerja perkembangan wilayah perluasan dapat dikelompokkan menurut tinggi rendahnya tingkat pengaruh dari kedua faktor tersebut, sebagai berikut (Tabel IV.20) :

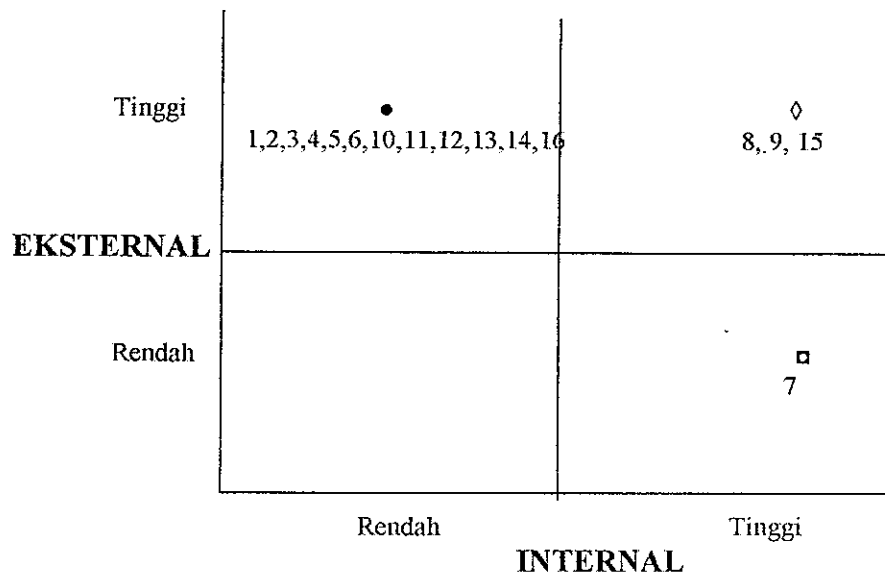
**TABEL IV. 20**  
**TINGKAT PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**  
**TERHADAP PARAMETER PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN**  
**KOTA SALATIGA**

ASPEK	VARIABEL	FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
Pemerintahan	1. Lembaga Pengelola	Rendah	Tinggi
Pembangunan	2. Fasilitas Perdagangan	Rendah	Tinggi
	3. Fasilitas Pendidikan	Rendah	Tinggi
	4. Fasilitas Kesehatan	Rendah	Tinggi
	5. Fasilitas Komunikasi	Rendah	Tinggi
	6. Fasilitas Hiburan	Rendah	Tinggi
	7. Sarana Peribadatan	Tinggi	Rendah
	8. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	Tinggi	Tinggi
	9. Wilayah terbangun	Tinggi	Tinggi
	10. Pelanggan Telpon	Rendah	Tinggi
	11. Sistem Penataan Ruang	Rendah	Tinggi
	12. Pelanggan Air Bersih	Rendah	Tinggi
	13. Pelanggan Listrik	Rendah	Tinggi
	14. Keadaan Jalan	Rendah	Tinggi
Kemasyarakatan	15. Perubahan Tata Kehidupan	Tinggi	Tinggi
	16. Organisasi Kemasyarakatan	Rendah	Tinggi

*Sumber : Hasil Analisis, 2002.*

Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan kedalam matrik pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap variabel-variabel perkembangan wilayah perluasan nampak sebagai berikut :

**GAMBAR 4.3**  
**DIAGRAM PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**  
**TERHADAP VARIABEL PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN**  
**KOTA SALATIGA**



Dari diagram tersebut nampak bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap variabel perkembangan wilayah perluasan. Faktor internal hanya berpengaruh terhadap sarana peribadatan, pertumbuhan penduduk, wilayah terbangun dan tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan keadaan / perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga selama ini dipengaruhi oleh faktor dari luar, dan kemampuan wilayah perluasan sendiri masih rendah.

Kebijakan yang dapat dilakukan terhadap pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Kota Salatiga adalah dengan meningkatkan parameter-parameter yang belum menunjukkan perkembangan. Parameter-parameter yang belum menunjukkan perkembangan yaitu lembaga pengelola, fasilitas pendidikan (SLTP dan SLTA), fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan, sarana komunikasi/telpon, sarana air bersih. Kebijakan pengembangan yang dapat diambil terhadap masing-masing aspek adalah :

## 1. Aspek Pemerintahan

Kebijakan yang diambil dengan mengubah status lembaga pengelola dari Desa menjadi Kelurahan, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lembaga pengelola yang berbentuk Kelurahan akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, dan pembinaan sumber daya manusia pengelolanya.

## 2. Aspek Pembangunan

Kebijakan yang dapat diambil dalam rangka pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dari aspek pembangunan adalah dengan :

- a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi berskala lokal diluar kawasan inti kota, sehingga mendorong perkembangan wilayah yang merupakan perluasan Kota Salatiga. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pasar-pasar desa sehingga berfungsi optimal, meningkatkan sarana air bersih dan telpon dengan menambah jaringan, mengembangkan sarana pendidikan khususnya SLTP/SLTA serta mengembangkan fasilitas hiburan.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah perluasan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan internal bagi pengembangan wilayah perluasan.
- c. Untuk mengembangkan jaringan jalan dan meningkatkan aksesibilitas di wilayah perluasan maka perlu segera direalisasikan kebijakan pembuatan jalan lingkar luar Salatiga. Dengan adanya jaringan jalan baru tersebut dapat mendorong perkembangan wilayah perluasan di bagian selatan Kota Salatiga.

d. Dari analisis pembiayaan sektor publik, selisih antara penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan antara Tahun 1992-2000 menunjukkan nilai negatif, yang berarti wilayah perluasan belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Kota Salatiga dan ada kecenderungan untuk membebani Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, PAD diharapkan bisa optimal untuk menunjang penerimaan daerah. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan di wilayah perluasan sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar, beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

- 1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah perluasan.
- 2) Pengawasan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari wilayah perluasan.
- 3) Memacu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat dengan peningkatan investasi di wilayah perluasan. Hal ini akan tercapai apabila kondisi sarana dan prasarana yang menunjang investasi seperti keadaan jalan, fasilitas telpon, fasilitas air bersih, serta fasilitas listrik telah tersedia.
- 4) Mengkaji tentang aspek-aspek yang mendukung terhadap peningkatan penerimaan, seperti aspek sosial budaya masyarakat.

### 3. Aspek Kemasyarakatan

Kebijakan yang dapat diambil dalam rangka mengembangkan wilayah perluasan Kota Salatiga dari aspek kemasyarakatan adalah dengan :

- a. Mendorong keberlangsungan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah perluasan Kota Salatiga sehingga dapat berperan dalam pembangunan Kota Salatiga.
- b. Memberikan peluang kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Salatiga untuk berperan dalam pengembangan wilayah perluasan Kota Salatiga.

Mengingat posisi Kota Salatiga yang strategis terletak antara Semarang – Surakarta, tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan kota-kota lain disekitarnya, pemanfaatan segala potensi yang ada secara optimal, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan maka upaya pengembangan wilayah perluasan akan dapat mendukung fungsi Salatiga sebagai kota pendidikan dan olah raga, pusat kegiatan perdagangan dan transportasi serta kota transit pariwisata.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis pada bab terdahulu dapat diambil kesimpulan mengenai kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga apabila dikaitkan dengan tujuan diadakannya perluasan wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Dari kesimpulan studi diberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil studi .

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dari studi ini dapat disimpulkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 belum berkembang. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan, yaitu dari metode skoring dan penilaian dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil analisis skoring dapat diketahui bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga, belum menunjukkan perkembangan dan belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi Kota Salatiga. Dari fasilitas perkotaan yang telah menunjukkan perkembangan baik adalah ketersediaan fasilitas listrik dan keadaan jalan. Fasilitas pelayanan masyarakat yang ketersediaanya menunjukkan perbandingan tetap adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan serta sarana peribadatan. Untuk sarana pelayanan masyarakat yang perkembangannya masih kurang adalah sarana hiburan/rekreasi, fasilitas komunikasi dalam hal ini telpon, serta sarana air bersih menyangkut jumlah rumah tangga terlayani

Penilaian dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan serta aspek kemasyarakatan menunjukkan bahwa wilayah perluasan Kota Salatiga belum berkembang. Hal ini dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan diadakannya perluasan wilayah adalah belum tercapai.

Wilayah perluasan Kota Salatiga, dari sisi pembiayaan sektor publik, belum memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Salatiga. Untuk pengeluaran pembangunan sektor publik, penerimaan yang berasal dari wilayah perluasan (Pajak dan Retribusi), hanya memberikan kontribusi sebesar 24,6 % dari total pengeluaran. Pembiayaan pembangunan sektor publik masih tergantung pada dana yang bersumber dari bantuan/sumbangan yang besarnya mencapai 75,4 % dari total pengeluaran. Perhitungan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran menunjukkan nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa wilayah perluasan cenderung membebani bagi Pemerintah Kota Salatiga.

Dengan demikian perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga belum mengarah pada tujuan dilakukannya perluasan wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992.

## **5.2\_Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan dan hasil studi secara keseluruhan dapat direkomendasikan beberapa hal, yaitu :

### **a. Untuk Pemerintah Kota Salatiga**

Untuk meningkatkan kinerja perkembangan wilayah perluasan, maka kebijakan yang diambil agar mengarah pada upaya terwujudnya tujuan diadakan perluasan wilayah, yaitu :

- (1) Perlu dikembangkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi berskala lokal diluar kawasan inti kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pasar-pasar desa sehingga berfungsi optimal, meningkatkan sarana air bersih dan telpon dengan menambah jaringan, mengembangkan sarana pendidikan khususnya SLTP/SLTA serta mengembangkan fasilitas hiburan.
- (2) Untuk lembaga pengelola, dengan mengubah status lembaga pengelola dari Desa menjadi Kelurahan, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lembaga pengelola yang berbentuk Kelurahan akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, dan pembinaan sumber daya manusia pengelolanya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari wilayah perluasan beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :
  - Melakukan intensifikasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi di wilayah perluasan
  - Memacu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat dengan peningkatan investasi di wilayah perluasan.

b. Untuk Studi Lanjut

Berdasarkan pada kesimpulan studi seperti yang telah disebutkan diatas, maka perlu dilakukan studi lanjutan yang diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik wilayah perluasan untuk mengetahui potensi sumberdaya yang ada, sehingga dapat ditentukan upaya pengembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bintarto, 1977a. *Pola Kota dan Permasalahannya* Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- \_\_\_\_\_. 1983b. *Interaksi Desa dan Kota*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1986c. *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Branch, Melville. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Daljoeni. 1987a. *Geografi Baru.Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1998b. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Alumni.
- Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa et al. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.,
- Halim,Abdul. 2002., *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit : Salemba Empat.
- Koestoer, Raldi Hendro (ed.). 2001., *Dimensi Keruangan Kota*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan* Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Moleong,J Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya .
- Nining, I Soesilo 2000. *Ekonomi, Perencanaan & Manajemen Kota*. Jakarta : Magister Perencanaan & Kebijakan Publik, UI .
- Yunus,Hadi Sabari. 1978a. *Konsep Perkembangan dan Pengembangan Daerah Perkotaan*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 1980b. *Evaluasi Sarana Fisik & Non Fisik Daerah Perkotaan (Studi Kasus di Kelurahan Taman Agung Kota Muntilan)*. Yogyakarta : Fakultas Geografi, UGM.
- \_\_\_\_\_. 1981c. *Studi Pemekaran Kota Daerah Kotamadya Yogyakarta. Laporan Penelitian*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada .

\_\_\_\_\_. 1987d. *Beberapa Determinan Perkembangan Permukiman Kota (Dampak & Pengelolannya)* Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

Pabundu Tika, Moh. 1997. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : Penerbit : Gramedia Pustaka Utama.

### **Artikel / Makalah**

Estalita, Lidya. 2001. "Strategi dan Usulan Alternatif Konsep Menyiasati Kesenjangan Perkembangan Wilayah dan Kota. " Jurnal Planit, Jurusan Planologi, Institut Teknologi Nasional Malang, Edisi Mei-Juni 2001.

Hendarto, Mulyo. 1997. "Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota." Makalah pada diskusi rutin Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang.

Koesbiantoro. 1993. "Manajemen Perkotaan Indonesia." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB Bandung, Edisi Khusus Pebruari.

Sujarto, Djoko. 1992. "Perkembangan Perencanaan Tata Ruang di Indonesia." Seri Perkotaan Nomor 02/DS/92, ITB, Bandung.

Widyaningsih NS. 2001. "Relevansi Preferensi Penduduk Terhadap Fasilitas Kota Yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota." Jurnal Planit, Jurusan Planologi, Institut Teknologi Nasional Malang, Nomor 2 Juli-Agustus 2001.

Yunus, Hadi Sabari. 1981 "Perkembangan Kota dan Faktor-Faktornya." Makalah Seminar Foto Udara, Fakultas Geografi, UGM Yogyakarta.

Zulkaidi, Denny. 1991. "Masalah Perluasan Kota." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB Bandung, No. 1/Januari 1991.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang.

### **Skripsi/Tesis**

- Edy Suharto 1999. "Analisis Prioritas Arah Pengembangan Kota di Daerah Perluasan, Studi Kasus Kota Salatiga." Tesis tidak diterbitkan, Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM Yogyakarta.
- Hidayat, Imam. 1999. "Studi Evaluasi Konsolidasi Lahan Perkotaan dalam Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kudus," Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UNDIP Semarang
- Dhidhik, WPA. 2001. "Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Perkembangan Kota Salatiga sebagai Daerah Otonom." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNDIP Semarang.
- Sjaroni, Moh, Djohar. 1998. "Dampak Rencana Perluasan Wilayah Kotamadya Dati II Cirebon Terhadap Keuangan Daerah." Tesis tidak diterbitkan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB Bandung.
- Soekonjono. 1998. "Kajian Ekonomi Perluasan Wilayah Perkotaan Ibukota Kabupaten Nganjuk." Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM, Yogyakarta.
- Sumardi. 2001. "Kajian Alternatif Untuk Kelembagaan Pengelola Pembangunan Kota Juwana." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UNDIP Semarang.

### **Data / Laporan**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga, Tahun 1991-2000.
- Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Tahun 2000, BPS dan Bappeda Kota Salatiga, 2001
- Kabupaten Semarang dalam Angka 1992, BPS Kabupaten Dati II Semarang, 1993.
- Laporan Penelitian Potensi Sosial Ekonomi, Bappeda Kodya Dati II Salatiga dan Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, 1994.
- Salatiga dalam Angka 2000, BPS dan Bappeda Kota Salatiga 2001.
- Pendapatan Regional Kota Salatiga Tahun 2000. BPS dan Bappeda Kota Salatiga, 2001.
- Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996-2006, Bappeda Kodya Dati II Salatiga.